

# BAB I

## RUANG LINGKUP PENDIDIKAN IPS DAN MULTIKULTURAL

### A. Pendidikan IPS

Pendidikan adalah pilar kebudayaan dan landasan pembangunan peradaban suatu bangsa. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang masyarakat, budaya, dan interaksi sosial. Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, pentingnya memasukkan elemen multikultural dalam pendidikan IPS semakin mendesak. Multikulturalisme mengacu pada pengakuan, penghargaan, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya, agama, bahasa, dan tradisi yang ada dalam masyarakat.

Pendidikan IPS diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat dan memiliki sikap kritis terhadap fenomena sosial. Pendidikan IPS juga mempertautkan dan memadukan bahan aneka cabang ilmu-ilmu sosial dan kehidupan masyarakat sehingga menjadi pelajaran yang mudah dicerna. Pengorganisasian materi mata pelajaran IPS menganut pendekatan terpadu (*integrated*), artinya mata pelajaran dikembangkan dan disusun tidak mengacu pada disiplin ilmu yang terpisah melainkan mengacu pada aspek kehidupan nyata peserta didik.

Dalam konteks pendidikan IPS, integrasi multikultural tidak hanya memperkaya pemahaman siswa tentang realitas sosial global, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat yang

semakin terhubung secara global. Oleh karena itu, memahami hubungan erat antara ruang lingkup pendidikan IPS dan multikultural merupakan langkah krusial dalam memajukan sistem pendidikan yang inklusif dan relevan.

Pendidikan IPS memiliki peran penting dalam perkembangan multikultural dan berhubungan erat dengan era globalisasi saat ini. Pendidikan IPS memberikan pembelajaran pengetahuan tentang nilai-nilai demokrasi, kebudayaan, ilmu politik, sejarah, hukum, filsafat, antropologi, dan sosiologi (Mahendra, P.R.A., 2023). Beberapa orientasi ilmu sosial dalam IPS antara lain adalah mempelajari hakikat dan karakteristik konsep dasar IPS, sejarah perkembangan IPS, ruang lingkup dan lingkungan IPS, serta metode dan teknik pengajaran IPS (Nasution, 2018).

Dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural dalam IPS, guru dan administrator harus memperhatikan setiap dari lima dimensi pendidikan multikultural: integrasi konten, proses konstruksi pengetahuan, pengurangan prasangka, paedagogi kesetaraan, dan budaya sekolah yang memberdayakan dan struktur sosial (Musyarofah, dkk., 2021). Integrasi konten melibatkan penggunaan contoh dan konten dari berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep-konsep kunci, generalisasi, dan masalah dalam bidang atau disiplin mereka. Implementasi dimensi ini memerlukan reformasi lingkungan total sekolah, termasuk sikap, keyakinan, dan tindakan guru serta administrator, kurikulum dan program studi, prosedur penilaian dan pengujian, serta gaya dan strategi yang digunakan oleh guru.

Pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan pendidikan multikultural adalah dua bidang yang saling terkait dalam rangka menciptakan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di masyarakat yang multikultural.

Dari pemaparan di atas, maka dirasa perlu untuk sedikit membahas ruang lingkup pendidikan IPS dan multikultural untuk menambah pengetahuan guru sebagai bekal mengajar.

## **B. Pengertian Pendidikan IPS**

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki peran yang luas dalam segala bentuk terutama yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Masyarakat dalam kesehariannya memiliki budaya dan kebiasaan.

Pembelajaran IPS merupakan bagian dari kurikulum sekolah bagi siswa dewasa agar mereka dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai untuk berpartisipasi dalam masyarakat, negara bahkan dunia. Secara sederhana, ditarik kesimpulan bahwa pendidikan IPS adalah salah satu mata pembelajaran dengan mengkaji berbagai disiplin ilmu agar siswa mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat, negara, dan dunia.

### **C. Ruang Lingkup Pendidikan IPS**

Menurut Tasrif (2008:4) ruang lingkup IPS adalah menyangkut kegiatan dasar manusia, maka bahan-bahannya bukan hanya mencakup ilmu-ilmu sosial dan humaniora melainkan juga segala gerak kegiatan dasar manusia, seperti agama, sains, teknologi, seni, budaya, dsb yang bisa memperkaya IPS.

Ruang lingkup pembelajaran IPS mencakup :

1. Ditinjau dari hubungannya; hubungan ekonomi, hubungan sosial, hubungan geografi, dll.
2. Ditinjau dari kelompoknya; keluarga, RT, RW, warga desa bangsa.
3. Ditinjau dari tingkatannya; lokal, regional, nasional, global.
4. Ditinjau dari interaksinya; kebudayaan, politik, ekonomi.

Ruang Lingkup IPS menurut Muhsinatun :

1. Manusia, Tempat, dan Lingkungan
2. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan
3. Sistem Sosial dan Budaya
4. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan.

Ruang Lingkup Materi IPS di Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan diri dan lingkungannya sebagai proses awal sosialisasi dan interaksi untuk mengenal nilai dan norma yang berlaku di masyarakat;
2. Kondisi geografis sekitar rumah, sekolah, dan daerahnya yang mempengaruhi keberagaman hayati serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari;

3. Perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penggunaan teknologi sederhana; dan
4. Perjuangan para pahlawan bangsa dan nilai-nilai yang dapat diteladani dalam kehidupan sekarang dan masa yang akan datang untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pendidikan IPS meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Ruang lingkup pendidikan IPS mencakup pemahaman tentang struktur dan fungsi masyarakat, sistem politik, lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan IPS bertujuan untuk mengembangkan pemahaman kritis, keterampilan berpikir, dan sikap yang positif terhadap perubahan sosial.

#### **D. Konsep Multikultural dalam Pendidikan IPS**

##### **1. Pengertian Multikultural**

Pendidikan Multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (*set of beliefs*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara (Banks, 2001).

Pendidikan multikultural adalah ide, gerakan pembaharuan pendidikan, dan proses pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa, baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah.

Konsep multikultural menekankan pentingnya menghargai, memahami, dan merangkul keberagaman budaya, agama, dan latar belakang etnis dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan IPS, multikulturalisme berarti memasukkan perspektif dan pengalaman beragam ke dalam kurikulum dan metode pengajaran.

#### **E. Integrasi Multikultural dalam Pembelajaran IPS**

Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *integrasion* yang memiliki arti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan jika dipandang dari segi politis, integrasi merupakan proses

menyatukan berbagai kelompok sosial, aliran, dan kekuatan-kekuatan lainnya dari seluruh wilayah tanah air untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat, dinamis, berkeadilan, sosial, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Integrasi Multikultural sebenarnya tidak hanya dalam pembelajaran IPS, namun bisa ke dalam mata pelajaran lainnya. Kita sebagai guru perlu mempunyai pedoman dalam melaksanakannya termasuk ke dalam pembelajaran IPS. Indonesia memiliki berbagai macam etnis, agama, bahasa, dan status sosial. Pembelajaran IPS tidak hanya mengajari murid untuk mempelajari pelajaran tersebut namun juga mengajarkan murid bagaimana sikap bertoleransi terhadap semua perbedaan.

Tujuan Integrasi Multikultural bangsa Indonesia tentunya menjadikan bangsa kita yang makmur, aman, dan memiliki identitas bangsa yang kuat. Kita sebagai warga yang baik tentunya mampu menerapkan cara agar bangsa Indonesia mampu menjadi bangsa yang kokoh walaupun di dalamnya terdapat banyak perbedaan. Perbedaan itu menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya dan kehidupan sosialnya.

Integrasi Multikultural dalam pembelajaran di sekolah dasar, tidak hanya terdapat dalam mata pelajaran IPS saja. Namun di dalam pembelajaran IPS, pendidikan multikultural sudah dapat menjelaskan bagaimana keadaan yang menggambarkan bangsa Indonesia.

## **F. Dampak Pendidikan IPS Multikultural**

Pendidikan IPS multikultural memiliki dampak yang positif, seperti pengembangan pemahaman dan toleransi yang lebih baik, peningkatan keterampilan komunikasi lintas budaya, dan penguatan hubungan sosial. Namun, juga ada dampak negatif yang perlu diperhatikan, seperti konflik budaya, miskomunikasi, dan ketidakseimbangan representasi.

Secara lebih rinci dampak positif Pendidikan IPS multikultural diantaranya:

1. Meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, kebudayaan, ilmu politik, sejarah, hukum, filsafat, antropologi, dan sosiologi (Mahendra, P. R. A., 2023).

Siswa diajarkan untuk menghargai dan memahami perbedaan budaya dan latar belakang etnis, mempromosikan penghargaan terhadap nilai-nilai dan tradisi yang berbeda.

2. Meningkatkan toleransi dan sikap terbuka terhadap perbedaan budaya dan etnis (Sartika, Dewi. dkk., 2020)

Melalui pendidikan multikultural, siswa belajar untuk lebih memahami dan menerima orang lain, bahkan ketika mereka berbeda dari mereka sendiri. Hal ini dapat mengurangi stereotip dan prasangka.

3. Meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan analitis (Nurhayati, S., & Shintasiwi, F. (2023)

Siswa diajarkan untuk mempertanyakan perspektif mereka sendiri dan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis.

4. Meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di sekolah dasar (Sudrajat. 2014)

Siswa akan belajar cara berkomunikasi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, memajukan keterampilan komunikasi mereka di dunia yang semakin terhubung secara global.

5. Meningkatkan karakter bangsa dan identitas nasional masyarakat Indonesia (Sipuan, dkk., 2022)

Dampak Negatif Pendidikan IPS dan Multikultural:

1. Munculnya sikap meremehkan kebudayaan lain
2. Munculnya sikap keyakinan yang kuat terhadap suatu keyakinan atau agama tertentu
3. Penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya (NAPZA), tawuran pelajar, mahasiswa, kriminalitas (Sudrajat. 2014) )
4. Masih terfokus pada penyampaian materi dengan mengejar target sesuai kurikulum tanpa memasukan wawasan multikultural didalamnya ((Nurhayati, S., & Shintasiwi, F.2023)
5. Dampak negatif dari kemajuan teknologi seperti mudahnya melakukan komunikasi tidak langsung (Sipuan, dkk., 2022).

Pendidikan IPS memiliki peran penting dalam perkembangan multikultural dan berhubungan erat dengan era globalisasi saat ini. Pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan pendidikan multikultural

adalah dua bidang yang saling terkait dalam rangka menciptakan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di masyarakat yang multikultural. Ruang lingkup pendidikan IPS mencakup pemahaman tentang struktur dan fungsi masyarakat, sistem politik, lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks pendidikan IPS, multikulturalisme berarti memasukkan perspektif dan pengalaman beragam ke dalam kurikulum dan metode pengajaran.

## **BAB II**

# **KONSEP DAN TEORI PENDIDIKAN IPS BERBASIS MULTIKULTURAL**

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural, memiliki masyarakat yang beragam, mulai dari budaya, bahasa, agama, etnis dan sebagainya. Akhir-akhir ini banyak permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, seperti permasalahan agama yang dimulai dari perbedaan agama sampai permasalahan dalam agama yang sama, permasalahan kebijakan pemerintah, partai politik ataupun perbedaan suku. Permasalahan lain di bidang pendidikan, misalnya kenakalan remaja, pembunuhan, pelecehan seksual atau pemerkosaan yang pelaku masih dibawah umur pun kini meningkat. Berbagai permasalahan di atas merupakan tantangan untuk ditingkatkannya pendidikan di negeri ini karena memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, agama, dan budaya masyarakat. Sehingga pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) mempunyai peranan yang sangat penting dalam hubungannya dengan multikultural di Indonesia. Dalam pendidikan sosial diberikan pemahaman bahwa di lingkungan kehidupan bermasyarakat selalu berdampingan dengan latar belakang yang tidak sama tetapi diharapkan kita dapat hidupberdampingan dalam perbedaan tersebut.

Pendidikan multikultural merupakan gejala baru dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan persamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang. Penerapan strategi ini tidak hanya bertujuan agar siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran

mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis. Untuk lebih memahami pendidikan IPS berbasis multikultural, perlu dipelajari konsep dan teori dari pendidikan IPS berbasis multikultural tersebut. Buku ini akan membahas tentang konsep dan teori pendidikan IPS berbasis multikultural.

## **A. Pengertian Pendidikan Multikultural**

Kamus Oxford Dictionary of English dalam Ubadah (2022:21) menjelaskan kata multikultural (kata sifat) diartikan “mengandung beberapa budaya atau etnis atau kelompok-kelompok etnis dalam masyarakat”. Secara etimologis, Tilaar menjelaskan multikultural ataupun multikulturalisme berasal dari kata “multi” yang berarti plural atau berjenis-jenis (banyak), “kultur” berarti budaya, sedangkan “isme” berarti paham atau aliran. Sedangkan menurut Mulyana (2000:56) dalam Nurasmawi & Ristiliana (2021:1), istilah multikultural secara etimolog berarti keragaman kultur atau budaya, yakni kompleksitas yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh anggota-anggota suatu masyarakat.

Scot Lash dan Mike Featherstone (2002:2-6) dalam Nurasmawi & Ristiliana (2021:1) menjelaskan secara terminologi bahwa multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Ada tiga istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang mempunyai keberagaman tersebut (agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda) yaitu pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*).

Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai adanya pluralitas keberagaman budaya, menurut H.A.R Tilaar (2004: 185-190) bahwa pendidikan multikultural tidak mengenal fanatisme atau fundamentalisme sosial-budaya termasuk agama. Setiap komunitas mengenal dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, demikian pula pendidikan multikultural tidak mengenal adanya xenophobia (kebencian terhadap barang atau orang asing. Bahkan pendidikan multikultural harus bisa mewujudkan peserta didik yang dapat belajar untuk hidup bersama dalam perbedaan (*learning to live together*).

## B. Dasar Pendidikan Multikultural

Keragaman dan perbedaan merupakan desain Tuhan (*sunatullah*) yang tidak dapat dielakkan dari kehidupan, *conditio sine qou non*. Pepatah Arab menyebutnya sebagai *min lawazim al-hayah* (keniscayaan hidup). Kehadirannya akan senantiasa ada. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al Hujurat/49:13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

Artinya :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diciptakan secara berbeda-beda dan yang paling mulia hanya dengan ketaqwaannya. Kendati demikian, ternyata nilai-nilai pluralitas dan multikulturalitas kurang cukup diapresiasi oleh kebanyakan orang. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya individu yang ingin meniadakan kebinnekaan menggantinya dengan ketunggalan dan keseragaman, kekerasan, terorisme, dan peperangan dengan mengatasnamakan agama dan etnisitas.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk baik secara etnis, budaya, dan agama. Setiap etnis memiliki budayanya tersendiri yang berbeda dengan etnis yang lain yang telah ada di negeri ini dan mentradisi sejak lama, bahkan sejak Indonesia belum dikenal. Kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, pertama secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan kedua secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam (Nasikun, 2004:34).

Masing-masing orang memiliki kelebihan dan kekurangannya, dengan perbedaan tersebut diharapkan bisa saling menghargai dan menghormati dengan hidup rukun dan damai. Dalam pendidikan multikultural diajarkan untuk tidak mendiskriminasi terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda atau memiliki kekurangan. Keberagaman adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh siapapun dan merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari.

Multikulturalisme berhubungan dengan kebudayaan dan kemungkinan konsepnya dibatasi dengan muatan nilai atau memiliki kepentingan tertentu. Pendidikan multikultural hadir dengan harapan dapat menghapus sikap diskriminasi yang ada dalam lingkungan sosial yang beragam. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk bisa menghargai perbedaan adalah dengan memberikan pendidikan multikultural.

Paradigma multikultural secara implisit bisa ditemukan pada Pasal 4 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdikns. Pasal ini menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dalam menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Prinsip multikulturalisme mengajarkan kita untuk mengakui berbagai potensi dan legitimasi keragaman dan perbedaan sosio-kultural tiap kelompok etnis.

### **C. Tujuan Pendidikan Multikultural**

Tujuan pendidikan multikultural menurut (Mahendra, 2023:4472) salah satunya adalah upaya untuk menanamkan perbedaan yang ada pada sesama manusia sebagai suatu kondisi yang alamiah, dapat menumbuhkan sifat sadar tentang keanekaragaman, tentang kesetaraan, kemanusiaan, keadilan, menanamkan nilai-nilai demokrasi yang saat ini sangat diperlukan berkaitan dengan beragam permasalahan sosial.

Pay dalam Nurasmawi & Ristiliana (2021:25) mengatakan bahwa pendidikan multikultural merupakan tujuan utama dari pembelajaran seumur hidup (*lifelong learning*). Secara lebih rinci D.J Skeel dalam Nurasmawi & Ristiliana (2021:25) menjelaskan tujuan pendidikan berbasis multikultural dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam;

2. untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan;
3. memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya; dan
4. untuk membantu siswa dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok.

Secara konseptual, pendidikan multikultural menurut Gorsky dalam Nurasmawi & Ristiliana (2021:25-26) mempunyai tujuan dan prinsip sebagai berikut:

1. Setiap siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi;
2. Siswa belajar dan berpikir secara kritis;
3. Mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan;
4. Mengakomodasi semua gaya belajar;
5. Mengapresiasi kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda;
6. Mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai latar belakang yang berbeda;
7. Untuk menjadi warga negara yang baik di sekolah maupun di masyarakat;
8. Belajar menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda;
9. Untuk mengembangkan identitas etnis, nasional dan global;
10. Mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan dan analisis secara kritis sehingga siswa dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari

Maksum & Ruhendi (2004:306) dalam Nurasmawi & Ristiliana (2021:26) mengemukakan prinsip-prinsip pendidikan multikultural yaitu:

1. Pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi-interpretasi yang berbeda.
2. Isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok.

3. Materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat
4. Pengajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang di bawa siswa ke kelas
5. Pendidikan hendaknya memuat model belajar mengajar yang interaktif agar mudah dipahami.

#### **D. Pendekatan Pendidikan IPS Berbasis Multikultural**

Mahfud (2011) menjelaskan ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural yaitu:

1. Tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan (*education*) dengan persekolahan (*schooling*), atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan membebaskan pendidik dari asumsi keliru bahwa tanggung jawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka; tapi justru semakin banyak pihak yang bertanggung jawab, karena program-program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah.
2. Menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini.
3. Pengembangan kompetensi dalam suatu “kebudayaan baru” biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, maka dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik merupakan antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural.
4. Pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi, itu ditentukan oleh situasi dan kondisi secara proporsional.
5. Kemungkinan bahwa pendidikan (baik formal maupun non formal) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa

kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan dari konsep dwi budaya atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi.

Beberapa pendekatan yang bisa dilakukan di dalam pendidikan multikultural menurut Yaqin (2005:36):

1. Pendekatan Histori, pendekatan ini mengandaikan bahwa materi yang diajarkan kepada siswa dengan menengok kembali ke belakang. Maksudnya agar siswa mempunyai kerangka berpikir yang komplit sampai ke belakang untuk kemudian merefleksikan untuk masa sekarang atau yang akan datang.
2. Pendekatan Sosiologis, pendekatan ini mengandaikan terjadinya proses kontekstualisasi atas apa yang pernah terjadi. Dengan ini materi yang diajarkan bisa menjadi aktual, bukan karena dibuat-tetapi sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi.
3. Pendekatan Kultural, pendekatan ini menitikberatkan kepada otentisitas dan tradisi yang berkembang. Dengan ini siswa dapat melihat mana tradisi yang otentik dan mana yang tidak.
4. Pendekatan Psikologis, pendekatan ini berusaha memperhatikan situasi psikologis siswa secara tersendiri dan mandiri. Pendekatan ini menuntut seseorang guru harus cerdas dan pandai melihat kecenderungan siswa sehingga guru bisa mengetahui metode mana yang cocok untuk pembelajaran.
5. Pendekatan Estetik, pendekatan estetik pada dasarnya mengajarkan siswa untuk berlaku sopan dan santun, damai, ramah, dan mencintai keindahan. Sebab segala materi kalau hanya didekati secara doktrinal maka siswa akan cenderung bersikap kasar. Sehingga dengan pendekatan ini siswa dapat mengapresiasi segala gejala yang terjadi di masyarakat dengan melihatnya sebagai bagian dari dinamika kehidupan yang bernilai seni dan estetia.
6. Pendekatan Berprespektif Gender, pendekatan ini mencoba memberi penyadaran kepada siswa untuk tidak membedakan jenis kelamin. Dengan pendekatan ini segala bentuk konstruksi sosial yang ada di sekolah yang menyatakan bahwa perempuan berada di bawah laki-laki bisa dihilangkan

James Banks (2022:182) dalam Nurasmawi & Ristiliana (2021:30-31) mengemukakan empat pendekatan dalam mengintegrasikan pendidikan multikultural ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah dan dianggap relevan untuk diimplementasikan pada sekolah di Indonesia yaitu:

1. Pendekatan kontribusi (*The Coontributions Approach*), pada pendekatan ini dicirikan dengan peristiwa sejarah seperti pahlawan dari berbagai suku bangsa yang berbeda serta berbagai benda sejarah yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan di Indonesia.
2. Pendekatan aditif (*Additive Approach*), pendekatan yang lebih menekankan pada materi tambahan, yang berkaitan dengan tema utama dan konsep suatu kurikulum hubungannya dengan struktur, tujuan dan aspek karakteristik dasar pembelajaran. Pendekatan Aditif sering dilengkapi dengan buku, modul, atau lainnya yang tidak merubah substansif materi kurikulum.
3. Pendekatan transformasi (*The Transformation Approach*), pada pendekatan transformasi mengubah asumsi dari kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis
4. Pendekatan aksi sosial (*The Sosial Action Approach*), pendekatan ini memiliki cakupan berbagai elemen yang luas dari pendekatan transformasi, dimana siswa diwajibkan dapat menumbuhkan aksi yang berhubungan dengan konsep, isu atau permasalahan yang sedang dikaji. Tujuannya adalah peserta didik dapat mengkritisi permasalahan sosial dari pembelajaran serat belajar untuk memutuskan suatu kebijakan berkaitan, peserta didik diharapkan mendapatkan nilai, ilmu pengetahuan maupun keterampilan yang dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial. sehingga harapannya bentuk-bentuk golongan atau kelompok dari ras, etnis, budaya yang sebelumnya tidak diperhatikan dapat ikut berpartisipasi bersama dalam masyarakat.

## **E. Aspek Nilai dalam Pendidikan Multikultural**

Pendidikan multikultural berupaya mengajak masyarakat untuk menerima perbedaan yang ada pada sesama manusia sebagai hai-hal

yang alamiah (*natural sunatullah*). Pendidikan multikultural menanamkan kesadaran kepada peserta didik akan nilai kesetaraan (*equality*), keadilan (*justice*), kemajemukan (*plurality*), kebangsaan (*nasionalitas*), kemanusiaan (*humanity*), dan nilai-nilai demokrasi (*democratic values*) yang diperlukan dalam beragam aktivitas sosial.

1. Kesetaraan (*Egaliter*)

Egalitarianisme adalah sebuah ide atau gagasan umum mengenai kesetaraan. Gagasan Egaliter merupakan pandangan kesetaraan terhadap manusia apapun ras, gender, agama dan lain-lain. Tidak ada individu yang terlahir ke dunia dengan membawa dosa bawaan. John Locke berpendapat bahwa setiap orang di setiap waktu dan tempat memiliki hak moral alami yang sama yang harus kita semua hormati.

2. Keadilan (*Justice*)

Keadilan menyangkut banyak hal antara lain: 1) pemenuhan hak-hak seseorang, yaitu hak-hak individu; 2) keadilan menyangkut prosedur; 3) menyangkut *reward and punishment*; 4) menyangkut sikap, yaitu sikap sosial dan tidak sosial; 5) menyangkut pemberdayaan kaum yang lemah, tertindas, dan tertinggal; 6) pembagian pendapatan atas kesejahteraan yang merata.

3. Kemajemukan (*Pluralitas*)

Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Pluralisme merupakan suatu sistem nilai atau pandangan yang mengakui keragaman di dalam suatu bangsa.

4. Kebangsaan (*Nasionalitas*)

Nasionalisme adalah suatu paham kesadaran untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa karena adanya kebersamaan kepentingan, rasa senasib sepenanggungan dalam menghadapi masa lalu dan masa kini serta kesamaan pandangan, harapan dan tujuan dalam merumuskan cita-cita masa depan bangsa.

5. Hak-hak Asasi Manusia (*Humanity*)

HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

#### 6. Demokrasi (*Democraton Values*)

Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan dalam pemerintahan.

### **F. Pentingnya Mempelajari Pendidikan Multikultural**

Gofur et al. (2022:148) menjelaskan pentingnya mempelajari pendidikan multikultural yaitu :

1. Sebagai sarana alternatif pemecahan konflik;
2. Membina siswa agar tidak tercabut dari akar budaya;
3. Sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional;
4. Menuju masyarakat Indonesia yang Multikultural.

Multikulturalisme mengandung dua makna yang sangat kompleks, yaitu “multi” berarti plural, dan “kulturalisme” mencakup makna budaya. Istilah plural mengandung berbagai macam arti karena pluralisme bukan berarti sekadar pengakuan akan adanya hal-hal yang bermacam-macam, tetapi juga pengakuan yang mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pluralisme berkaitan dengan prinsip demokrasi dalam tatanan dunia. Banyak negara yang mengaku sebagai negara demokrasi, tetapi tidak mengakui keberagaman dalam hidup mereka sehingga terjadi berbagai jenis segregasi

Multikulturalisme merupakan suatu bentuk pemahaman yang berpihak pada wujud dari kehidupan yaitu plural (beragam) tanpa mengesampingkan atau memberikan pengecualian terhadap budaya tertentu. Pendidikan multikultural adalah wujud kesadaran mengenai pluralisme serta merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana saling menghargai di dalam perbedaan. Dalam menghadapi pluralisme budaya perlu dilakukan pembentukan paradigma baru yang menjunjung tinggi nilai perbedaan. Pendidikan di Indonesia akan menjadi fleksibel ketika dalam prosesnya mengutamakan prinsip-prinsip dasar multikultural.

Pendidikan multikultural merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah yang mempelajari tentang status sosial, ras, suku dan agama, agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya. Bebe-

rapa pendekatan yang bisa dilakukan di dalam pendidikan multikultural: Pendekatan Histori, Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Kultural, Pendekatan Psikologis, Pendekatan Estetik, dan Pendekatan Berspektif Gender. Pendidikan multikultural menanamkan kesadaran kepada peserta didik akan nilai kesetaraan (*equality*), keadilan (*justice*), kemajemukan (*plurality*), kebangsaan (*nasionality*), kemanusiaan (*humanity*), dan nilai-nilai demokrasi (*democraton values*) yang diperlukan dalam beragam aktivitas sosial.

### **BAB III**

## **ISU/PERMASALAHAN DALAM PEMBELAJARAN IPS**

Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan terjemahan *social studies*. Istilah ini digunakan di sekolah-sekolah Amerika. IPS dapat diartikan dengan “Penelaahan atau kajian tentang masyarakat”. Dalam mengkaji masyarakat, guru dapat melakukan kajian dari berbagai perspektif sosial, seperti kajian melalui pengajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik-pemerintahan, dan aspek psikologi sosial yang disederhanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Dengan demikian, IPS bukan ilmu sosial dan pembelajaran IPS yang dilaksanakan baik pada pendidikan dasar maupun pada pendidikan tinggi. Pembelajaran IPS tidak menekankan pada aspek teoritis keilmuannya, tetapi aspek praktis dalam mempelajari, menelaah, mengkaji gejala, dan masalah sosial masyarakat yang bobot dan keluasannya disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing sehingga tertanam sikap mental yang baik dalam bermasyarakat.

Penanaman sikap atau sikap mental yang baik melalui pembelajaran IPS, tidak dapat dilepaskan dari mengajarkan nilai dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Dengan kata lain, strategi pengajaran nilai dan sistem nilai pada IPS bertujuan untuk membina dan mengembangkan sikap mental yang baik. Materi dan pokok bahasan pada pembelajaran IPS dengan menggunakan berbagai metode (*multi method*), digunakan untuk membina penghayatan, kesadaran, dan pemilikan nilai-nilai yang baik pada diri siswa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hamalik bahwa

tujuan pembelajaran IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu: 1) pengetahuan dan pemahaman, 2) sikap hidup belajar, 3) nilai-nilai sosial dan sikap, 4) keterampilan.

Dengan terbinanya nilai-nilai secara baik dan terarah pada mereka, sikap mentalnya juga akan menjadi positif terhadap rangsangan dari lingkungannya, sehingga tingkah laku dan tindakannya tidak menyimpang dari nilai-nilai yang luhur. Penanaman nilai dan sikap pada pembelajaran IPS hendaknya dipersiapkan. Yang mana siswa akan lebih tertarik dalam pembelajaran IPS haruslah menggunakan strategi yang menarik dan metode yang bervariasi.

Pembelajaran IPS dilaksanakan dalam waktu yang terbatas, sehingga tidak mungkin dapat memperkenalkan seluruh nilai-nilai kehidupan manusia kepada siswa. Oleh karena itu, strategi yang jitu sangat diharapkan dalam pembelajaran IPS ini. Proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan di sekolah/madrasah selama ini lebih ditekankan kepada penguasaan bahan/materi pelajaran sebanyak mungkin, sehingga suasana belajar bersifat kaku dan terpusat pada satu arah serta tidak memberikan kesempatan bagi siswa-siswa untuk belajar lebih aktif. Budaya belajar lebih ditandai oleh budaya hafalan dari pada budaya berpikir, akibatnya siswa-siswa menganggap bahwa pelajaran IPS adalah pelajaran hafalan saja. Untuk itu, dibutuhkan strategi yang jitu untuk memecahkan masalah-masalah di atas.

Era globalisasi telah mengantarkan kita pada perubahan yang sangat cepat seiring dengan perkembangan zaman yang dibarengi bertambahnya tingkat pemahaman dan juga pengetahuan manusia di bidang Sains dan Teknologi yang akhirnya membawa banyak dampak bagi kehidupan manusia secara umum baik positif maupun negatif.

Untuk mengiringi kemajuan yang berjalan sangat cepat sampai saat ini kita masih menggantungkan harapan pada pendidikan untuk tetap mengawal dan menjaga kehidupan sosial masyarakat yang terus berubah. Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seiring dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan permasalahan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Selanjutnya fungsi dan tujuan pendidikan yang tertuang dalam undang-

undang nomor 20 tahun 2003 adalah “Berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Bab II Pasal 3). Namun, fungsi dan tujuan yang sangat mulia ini belum secara maksimal dapat dipenuhi melihat saat ini dunia pendidikan kita yang masih belum bisa mengejar cepatnya arus perubahan itu perlu disesuaikan dan juga dijaga sehingga tetap mampu menjawab tantangan dari perubahan dan kemajuan yang terus terjadi.

Melihat kondisi yang dihadapi, pembelajaran IPS sepantasnya mulai membenahi diri, baik dari bergeser dari tatanan epistemologi ke arah pengembangan inovasi dan juga solusi bagi perkembangan pendidikan IPS ke depannya. Di mana hal ini sangatlah sesuai dengan tujuan utama pendidikan IPS yaitu mempersiapkan warga negara yang dapat membuat keputusan reflektif dan berpartisipasi dengan sukses dalam kehidupan kewarganegaraan di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Begitu pun dengan fungsi dari IPS yang hakikatnya adalah membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna, keterampilan sosial dan intelektual dalam membina perhatian serta kepedulian sosialnya sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggung jawab dalam merealisasikan tujuan nasional.

Pembelajaran IPS di sekolah juga belum maksimal dalam melaksanakan dan membiasakan pengalaman nilai-nilai kehidupan demokratis, sosial kemasyarakatan dengan melibatkan siswa dan komunitas sekolah dalam berbagai aktivitas kelas dan sekolah. Selain itu, dalam pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek pengetahuan, fakta dan konsep-konsep yang bersifat hafalan belaka. Inilah yang dituding sebagai kelemahan yang menyebabkan “kegagalan” pembelajaran IPS di sekolah/madrasah di Indonesia.

Pembelajaran IPS seperti yang dijelaskan di atas jika tetap diteruskan, terutama hanya menekankan pada informasi, fakta, dan hafalan, lebih mementingkan isi dari proses, kurang diarahkan pada proses berpikir dan kurang diarahkan pada pembelajaran bermakna dan berfungsi bagi

kehidupannya, maka pembelajaran IPS tidak akan mampu membantu peserta didiknya untuk dapat hidup secara efektif dan produktif dalam kehidupan masa yang akan datang. Oleh karena itu, sudah semestinya pembelajaran IPS masa kini dan ke depan mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi di dunia secara global.

Masalah lain yang terjadi pada pembelajaran IPS saat ini: akibat dari pengaruh budaya pada masa lalu terhadap mata pelajaran IPS, yang menganggap IPS cenderung kurang menarik, pendekatan indoktrinatif, *second class*, dianggap sepele, membosankan, dan bermacam-macam kesan negatif lainnya telah menyebabkan mata pelajaran tersebut menghadapi dilema, belum lagi dengan fakta di lapangan yang menunjukkan IPS masih dalam posisi pembelajaran konvensional dan lain-lain.

Permasalahan yang terjadi pada pembelajaran IPS antara lain:

### **1. Pendekatan Teacher Centered**

Pada pendekatan ini guru lebih banyak melakukan kegiatan belajar-mengajar dengan bentuk ceramah (*lecturing*). Pada saat mengikuti pembelajaran atau mendengarkan ceramah, siswa sebatas memahami sambil membuat catatan, bagi yang merasa memerlukannya. Guru menjadi pusat peran dalam pencapaian hasil pembelajaran dan seakan-akan menjadi satu-satunya sumber ilmu. Guru hanya memberikan informasi satu arah karena yang ingin dicapai adalah bagaimana guru bisa mengajar dengan baik sehingga yang ada hanyalah transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*). Pendekatan *teacher center* dimana proses pembelajaran lebih berpusat pada guru hanya akan membuat guru semakin cerdas, tetapi siswa hanya memiliki pengalaman mendengar paparan saja. *Output* yang dihasilkan oleh pendekatan belajar seperti ini tidak lebih hanya menghasilkan siswa yang kurang mampu mengapresiasi ilmu pengetahuan, takut berpendapat, tidak berani mencoba yang akhirnya cenderung menjadi pelajaran yang pasif dan miskin kreativitas.

### **2. Dominasi Metode Ekspositori**

Pembelajaran IPS yang didominasi ekspositori maksudnya, siswa mengikuti pola yang ditetapkan oleh guru secara cermat. Penggunaan metode ekspositori merupakan metode pembelajaran mengarah kepada tersampainya isi pelajaran kepada siswa secara langsung.

Penggunaan metode ini siswa tidak perlu mencari dan menemukan sendiri fakta- fakta, konsep dan prinsip karena telah disajikan secara jelas oleh guru dan cenderung berpusat kepada guru. Guru aktif memberikan penjelasan atau informasi pembelajaran secara terperinci tentang materi pembelajaran. Metode ekspositori sering dianalogikan dengan metode ceramah, karena sifatnya sama- sama memberikan informasi. Popham & Baker menjelaskan bahwa setiap penyajian informasi secara lisan dapat disebut ceramah.

Menurut Herman Hudoyo, metode ekspositori dapat meliputi gabungan metode ceramah, metode drill, metode tanya jawab, metode penemuan dan metode peragaan. Akhirnya pembelajaran IPS yang didominasi ekspositori juga akan mengukung keaktifan serta kreativitas siswa.

Singkatnya, metode ekspositori bukan hanya penyampaian dengan cara ceramah saja, tetapi bisa dengan cara yang lain seperti yang disebut di atas, memang metode ekspositori lebih cenderung pada pembelajaran dengan cara ceramah.

Tumbuhnya Budaya Belajar Verbalistik. Pembelajaran verbalistik selalu menggunakan penyampaian lisan dalam belajar atau sering kita sebut dengan ceramah. Guru yang selalu berceramah dalam kelas akan cepat membuat siswa menjadi bosan sehingga pembelajaran tidak efektif lagi.

Menurut Wina Sanjaya, metode ceramah/verbalistik merupakan cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. Sedangkan menurut Djamarah dan Aswan adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa, begitu pula yang diungkapkan oleh Ani Widayati bahwa metode ceramah adalah cara penyampaian bahan ajar dengan komunikasi lisan.

Pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa metode ceramah (verbalistik) merupakan cara penyampaian bahan ajar atau materi secara lisan kepada siswa. Metode ini termasuk dalam strategi pembelajaran ekspositori yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru (*Teacher Centered*). Metode ceramah merupakan metode mengajar yang paling banyak digunakan, hal ini terjadi dikarenakan guru menganggap metode ini merupakan metode yang paling mudah untuk dilaksanakan asalkan bahan/materi serta urutan pembelajaran sudah dikuasai.

### 3. Mengajar Berpusat pada Buku Teks (*Textbook Centered*)

Dalam pembelajaran IPS pendidikan dasar yaitu di Sekolah Dasar maupun di Sekolah Mengengah Pertama, berdasarkan pengalaman guru selalu menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah dan terpaku pada buku. Tentu hal ini membuat siswa bosan dan malas karena terus menerus mendengarkan guru yang berbicara di depan. Akhirnya siswa hanya mementingkan hafalan. Ketika siswa bosan, maka mereka akan lebih memilih untuk mengobrol dengan temannya atau asik dengan imajinasinya sendiri. Pada akhirnya, materi yang disampaikan oleh guru sama sekali tidak bisa diterima oleh siswa dengan baik. Hal ini kemudian menjadi “momok” tersendiri ketika siswa memasuki tingkat sekolah yang lebih tinggi. Siswa merasa bahwa pelajaran IPS itu sangat membosankan dan tidak menarik.

Hal yang sering terjadi dalam pembelajaran IPS yaitu siswa diminta untuk membaca sebuah topik pembelajaran dari buku teks selanjutnya menuliskan isi pikirannya kembali atas apa yang telah dibaca siswa. Pada dasarnya kegiatan ini bertujuan agar siswa lebih memahami apa yang ia baca, tapi dampak negatifnya adalah siswa akan cepat bosan ditambah lagi siswa akan kekurangan referensi dalam menuliskan isi pikirannya karena hanya berpatokan kepada buku teks tersebut. Sebaiknya guru memberikan alternatif lain kepada siswa dalam mencari sumber bisa melalui media televisi, koran, internet, dst.

#### Evaluasi yang Berorientasi pada Kognitif Tingkat Rendah

Dalam menyampaikan serta mengevaluasi hasil belajar siswa, guru menggunakan standar rendah yaitu hanya pada kognitif saja bahkan hanya pada tingkat kognitif satu (C1) dan kognitif dua (C2) atau pada tingkat pengetahuan dan pemahaman tidak sampai pada tingkat C3-C6 (aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi). Belum juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik siswa.

Bahkan, jika terdapat siswa yang bergerak kesana-kemari yang banyak bertanya akan dikategorikan sebagai siswa yang nakal atau tidak baik. Pada anak berusia 6-8 tahun di mana koordinasi psikomotorik semakin berkembang, permainan sifatnya berkelompok, tidak terlalu tergantung pada orang tua, kontak dengan lingkungan luar semakin matang, menyadari kehadiran alam di sekelilingnya, bentuk lebih berpengaruh

daripada warna, rasa tanggung jawab mulai tumbuh, puncak kesenangan bermain adalah pada umur 8 tahun 11

Hal senada dikatakan Margaretha S.Y. bahwa kecenderungan siswa sekolah dasar yang senang bermain dan bergerak menyebabkan anak-anak lebih menyukai belajar lewat eksplorasi dan penyelidikan di luar ruang kelas.

Izzaty, dkk. mengungkapkan tentang cirri-ciri anak usia sekolah dasar (6-12 tahun) Ada hubungan yang kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah, suka memuji diri sendiri, kalau tidak dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan, tugas atau pekerjaan itu dianggap tidak penting, suka membandingkan dirinya dengan anak lain, jika hal itu menguntungkan dirinya, suka meremehkan orang lain, perhatiannya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari, ingin tahu, ingin belajar dan realistis, timbul minat kepada pelajaran-pelajaran khusus, Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah, anak-anak suka membentuk kelompok sebaya atau pergrup untuk bermain bersama, mereka membuat peraturan sendiri dalam kelompoknya. Oleh karena itu, pembelajaran yang berlangsung hendaknya dapat membuat anak menjadi senang untuk belajar bukan sebaliknya membuat anak takut dan malas untuk belajar, selain itu bukan semata-mata hanya bermain, tetapi pembelajaran yang berlangsung harus dapat membawa dan membantu siswa dalam mengem- bangkan potensinya.

Pembelajaran akan selalu mengambil alih bahkan cenderung menguasai semua proses dalam pembelajaran. Padahal tugas guru adalah memfasilitasi siswanya untuk belajar, sehingga guru harus memotivasi memberikan arahan agar siswanya mau belajar bersamanya bukan malah menceramahnya atau menyampaikan materi saja tanpa memperdulikan pendapat, pertanyaan dari siswa.

Selain pengetahuan yang disampaikan oleh guru melalui ceramah kepada siswa, siswanya juga ingin merasa dihargai dengan menampilkan dirinya dalam menjelaskan materi di kelas, sehingga siswa akan menjadi aktif dan memiliki mental yang kuat untuk tampil di depan umum. Guru harus mampu membuat siswa mau dan semangat belajar bersamanya, itulah guru yang menjadi idola di dalam kelas.

Ada hal lain yang harus disampaikan oleh guru, bukan menyampaikan pengetahuan semata tapi guru juga bertanggung jawab dalam menyampaikan dan menginternalisasikan nilai-nilai etika, moral dan agama kepada siswa sehingga terciptalah peserta didik yang pintar, cerdas, dan berakhlakul karimah.

#### **4. Strategi Jitu dalam Pembelajaran IPS**

Banyaknya permasalahan dalam pembelajaran IPS sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, maka pembelajaran IPS di era globalisasi perlu melakukan pembenahan diri. Di mana harus mampu mengubah paradigma siswa tentang pembelajaran IPS yang monoton, membosankan. Maka strategi jitu yang perlu dilakukan:

#### **5. Memberikan Perhatian**

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses penciptaan kondisi atau upaya mengorganisasikan lingkungan seseorang sehingga memungkinkan terciptanya perbuatan atau kondisi dari peserta didik. Untuk itu, guru harus berusaha menarik perhatian siswa untuk belajar.

Perhatian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan pembelajaran. Wiliem Stern dalam bukunya: *Al gemeine Psychologie*, ahli ilmu jiwa ini memberikan definisi mengenai perhatian yang intinya dapat dirumuskan sebagai berikut: Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis atau aktivitas jiwa yang tertuju kepada suatu obyek dan mengesampingkan obyek yang lain. Oleh karena itu, guru harus tanggap terhadap tingkah laku anak. Maka yang perlu diperhatikan guru adalah pengajaran itu harus menarik perhatian anak.

Perhatian terhadap pembelajaran IPS akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, akan membangkitkan perhatian dan juga motivasi untuk mempelajarinya.

Untuk itu, harus diusahakan agar pembelajaran itu: 1) Didasarkan pada hal-hal yang sudah dikenal anak dan berisi sesuatu yang baru baginya. 2) Bervariasi dalam menyampaikan (penjelasan) materi pelajaran, misalnya:

##### **a. Dengan variasi suara**

Suara bisa dikeraskan, dilemahkan bahkan dapat diam sebentar (ke- senyapan) guna menarik perhatian.

b. Dengan variasi tulisan

Hal-hal yang penting dapat ditulis yang lebih mencolok, lain daripada yang lain.

c. Dengan menggunakan gambar (peta)

Gambar (peta) diperlukan untuk menunjukkan letak atau tempat suatu daerah.

d. Pemilihan dan Penggunaan Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk bahan pembelajaran dan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dengan adanya berbagai macam media pembelajaran yang kesemuanya dapat dipakai dalam proses pembelajaran maka saat guru akan menggunakannya harus memilih media mana yang paling tepat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih media, antara lain:

- Tiap jenis media tentu mempunyai karakteristik.
- Pemilihan media harus dilakukan secara obyektif.
- Pemilihan media hendaknya mempertimbangkan juga: a) Kesesuaian tujuan pembelajaran, b) Kesesuaian materi, c) Kesesuaian kemampuan anak, d) Kesesuaian kemampuan guru (untuk menggunakan), e) Ketersediaan bahan, dana,

e. Mutu media

Dengan memperhatikan kriteria pemilihan media tersebut maka guru akan terhindar dari kecerobohan dalam pemilihan media. Pemilihan media yang cermat dan tepat akan menunjang keefektifan proses pembelajaran.

Dari uraian tentang kriteria dan penggunaan media tersebut yang perlu kita perhatikan bahwa penggunaan media tidak akan menggantikan guru. Peran guru dalam proses pembelajaran tetap memegang peran yang penting, yaitu mengelola kegiatan pembelajaran.

f. Pemberian Motivasi

Motivasi berasal dari kata “motif” yang diartikan sebagai “daya penggerak yang telah menjadi aktif”. Pendapat lain juga

mengatakan bahwa motivasi adalah “keadaan dalam diri seseorang yang men dorongnya untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan.”

Sartain mengatakan bahwa motivasi adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan (*goal*) atau perangsang (*incentive*). Tujuan adalah yang membatasi/menentukan tingkah laku organisme itu.

Dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu kondisi atau status internal yang mengarahkan perilaku seseorang untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi”. Jelaslah bahwa fungsi motivasi itu memberikan suatu nilai atau intensitas tersendiri dari seorang siswa dalam meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajarnya. Munculnya motivasi dalam diri siswa (internal) dalam belajar, karena siswa ingin menguasai kemampuan yang terkandung di dalam tujuan pembelajaran yang bermanfaat untuk dirinya. Dengan menginformasikan garis besar materi, akan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dipelajari dalam suatu pembelajaran. Jadi kegiatan memotivasi (teknik memotivasi) dapat berupa:

1. Menginformasikan tujuan pembelajaran;
2. Menginformasikan manfaat pembelajaran;
3. Menginformasikan garis besar materi pembelajaran;
4. Menyimpulkan materi pelajaran.

Menyimpulkan materi pelajaran merupakan salah satu kegiatan guru di akhir pembelajaran. Langkah ini dalam prosesnya sebagai teknik untuk penguatan terhadap hasil belajar secara menyeluruh. Menyimpulkan materi pelajaran dapat dirumuskan oleh siswa dibawah bimbingan guru. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan materi pelajaran di antaranya adalah: Berorientasi pada indikator pembelajaran, singkat, jelas serta dengan bahasa (tulisan/lisan) yang mudah dipahami siswa, Kesimpulan materi tidak keluar dari topik yang telah dibahas, dapat menggunakan waktu sesingkat mungkin.

Motivasi diperlukan dalam menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa. Menurut Djamarah ada tiga fungsi motivasi, yakni: a) Motivasi

sebagai pendorong perbuatan. Motivasi berfungsi sebagai pendorong untuk mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar. b) Motivasi sebagai penggerak perbuatan. Dorongan psikologis melahirkan sikap terhadap anak didik itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbandung, yang kemudian terjelma dalam bentuk gerakan psikofisik. c) Motivasi sebagai pengarah perbuatan. Anak didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan perbuatan yang perlu diabaikan.

Menurut Sardiman siswa yang memiliki motivasi tinggi memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain sebagai berikut: a) Tekun menghadapi tugas b) Ulet menghadapi kesulitan/tidak cepat putus asa. c) Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin. d) Lebih senang kerja mandiri. e) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. f) Dapat memperthanankan pendapatnya. g) Tidak mudah melepaskan hal yang sudah diyakininya. Untuk itu, siswa yang secara terus-menerus mendapatkan motivasi akan semakin tinggi pula minat dan prestasinya.

## **6. Strategi Pembelajaran *Critical Incident***

Uraian mengenai memberikan perhatian dan motivasi di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam memberikan perhatian dan memotivasi siswa dalam pembelajaran bisa didapatkan di dalam menerapkan strategi pembelajaran. Dikarenakan dalam menerapkan suatu strategi pembelajaran maka kegiatan memberikan perhatian dan motivasi sudah tercakup di dalamnya. Oleh karena itu, guru haruslah tepat dalam memilih suatu strategi pembelajaran.

Dalam tulisan ini penulis memaparkan satu strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran yang mana di dalamnya dapat mencakup pemberian perhatian dan motivasi; yaitu dengan strategi *Critical Incident*.

Strategi *Critical Incident* yaitu suatu strategi yang digunakan oleh guru dengan maksud mengajak siswa untuk mengingat pengalaman yang pernah dijumpai atau dialmi sendiri kemudian dikaitkan dengan materi bahasan.

Strategi *Critical Incident* diilhami dari masalah-masalah yang dijumpai dalam proses pembelajaran, kemudian para praktisi pendidikan mulai menggagas guna mengatasi masalah yang ada, maka dirumuskanlah strategi pembelajaran aktif, "pembelajaran aktif itu sendiri berasal dari

kata *active* dan *learning* yang artinya pembelajaran”. Belajar aktif sangat diperlukan oleh peserta didik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ketika peserta didik pasif, ada kecenderungan untuk cepat melupakan apa yang telah diberikan. Belajar aktif adalah salah satu cara untuk mengikat informasi yang baru kemudian menyimpannya dalam otak, agar otak dapat memproses informasi yang baik, maka akan membantu kalau terjadi proses refleksi secara internal. “ini ditegaskan kembali” jika peserta didik diajak untuk berdiskusi, menjawab pertanyaan, atau membuat pertanyaan, maka otak mereka akan bekerja lebih baik sehingga proses belajar mengajar dapat terjadi dengan lebih baik pula.

Belajar aktif tidak dapat terjadi tanpa adanya partisipasi siswa, terdapat berbagai cara untuk membuat proses pembelajaran yang mengakibatkan keaktifan siswa dan mengasah ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Proses pembelajaran dalam memperoleh informasi, keterampilan, dan sikap akan terjadi melalui proses pencarian dari diri siswa, dengan cara bermain dan belajar kelompok.

Para siswa sebaiknya dikondisikan berada dalam suatu bentuk pencarian dari pada suatu bentuk reaktif, yakni mereka mencari jawaban terhadap pertanyaan baik yang dibuat oleh guru maupun yang ditentukan oleh siswa sendiri, semua ini dapat terjadi ketika siswa diatur sedemikian rupa sehingga berbagai tugas dan kegiatan yang dilaksanakan sangat mendorong mereka untuk berpikir, bekerja, dan merasa.

Strategi *Critical Incident* diharapkan mampu menjadikan proses belajar lebih bermakna dengan usaha mengkonstruksi kembali pengalaman-pengalaman yang ada pada benak siswa dikaitkan dengan konteks materi yang diterima pada saat proses pembelajaran, dengan ini memori ingatan siswa dituntut aktif mendeskripsikan sejumlah pengalaman-pengalaman penting guna memecahkan masalah yang dihadapi.

Adapun langkah-langkah pembelajarannya, antara lain:

1. Guru menyampaikan topik apa yang akan dipelajari saat ini.
2. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mengingat-ingat kembali pengalaman mereka yang tidak terlupakan berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari.

3. Siswa diminta untuk menceritakan pengamalan yang tidak dapat terlupakan/paling berkesan yang pernah dialaminya. Sedangkan siswa yang lain dengan seksama mendengarkan.
4. Selesai siswa menceritakan pengalamannya, guru memberikan apresiasi terhadap siswa tersebut. Selanjutnya meminta kepada siswa yang lain untuk memberikan kesimpulan nilai positif apa yang terkandung pada cerita temannya.
5. Sesudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakan pengalamannya masing-masing, maka guru harus dapat menyimpulkan nilai-nilai positif yang terkandung di dalam pengamalan siswa,
6. Selanjutnya guru menghubungkan pengalaman mereka tersebut terhadap materi yang sedang dipelajari.

Dengan meminta siswa untuk menceritakan pengalaman yang sangat berkesan bagi mereka merupakan suatu penghargaan ataupun perhatian kepada siswa dikarenakan diberikan kesempatan menceritakan hal yang terjadi pada diri mereka. Siswa pun juga termotivasi untuk belajar dikarenakan mereka diikuti- sertakan dalam pembelajaran.

Kelebihan strategi *Critical Incident* (Pengalaman Penting) sesuai apa yang diungkapkan oleh Suwardi, bahwa untuk mengaktifkan siswa sejak dimulainya pembelajaran. Selain itu, strategi ini baik digunakan untuk tujuan Pembelajaran yang mengajarkan peserta didik untuk lebih berempati, strategi ini juga lebih baik digunakan untuk kelas dengan jumlah sedikit dan tidak terlalu banyak agar siswa tidak malu untuk mengungkapkan pengalamannya. Dengan adanya strategi ini, siswa akan merasa lebih diperhatikan dan meningkat motivasi belajarnya sehingga pada akhirnya akan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pembelajaran IPS yang selama ini menjadi “momok” bagi guru dan siswa.

## **BAB IV**

# **PENGAJARAN IPS DALAM KELUARGA**

### **A. Pengertian Pendidikan Keluarga**

Keluarga senantiasa disebut sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Cakupan makna “pertama dan utama” tidak hanya dalam dimensi waktu atau kronologis proses terjadinya pendidikan namun juga dalam dimensi tanggung jawab. Betapapun proses pendidikan telah diselenggarakan oleh berbagai lembaga pendidikan formal maupun nonformal, secara sosio-historis kehadiran lembaga-lembaga pendidikan profesional itu merupakan pengganti peran atas peran lembaga keluarga sebagai lembaga pendidikan yang utama tadi. Dengan demikian jelas dapat dikatakan lembaga pendidikan profesional itu menerima mandat dari lembaga keluarga untuk menyelenggarakan pendidikan bagi para anggota keluarga.

Dalam era revolusi komunikasi dan informasi sekarang ini sering dipertanyakan, masihkah lembaga keluarga memiliki peran yang demikian besar dalam proses pendidikan atau apakah lembaga keluarga masih mampu memerankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan sebagaimana diharapkan. Atau pertanyaan-pertanyaan sejenis, sekitar persoalan peran pendidikan yang bagaimanakah yang mesti ditunaikan oleh lembaga keluarga dalam era revolusi informasi dan globalisasi sekarang ini. Sementara kelembagaan keluarga sendiri juga mengalami metamorfosis, perubahan bentuk dan peran, di mana tidak lagi bentuk keluarga inti di mana ayah, ibu, dan anak-anaknya hidup dalam sebuah rumah (*house*) dan dalam sebuah rumah tangga (*home*). Bentuk keluarga

zaman sekarang sudah bervariasi, misalnya keluarga di mana diantara anggota keluarganya tinggal di lain kota, keluarga di mana bapak dan ibu bekerja penuh hari sementara anak juga sekolah penuh hari (*fullday school*), keluarga di mana ayah dan ibu sangat jarang bertemu karena kesibukan kerja, dan keluarga yang hidup terpisah jarak karena tuntutan pekerjaan.

Keluarga secara yuridis formal terbentuk melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Melalui perkawinan terbentuklah keluarga. Dalam batasan ini keluarga hanya terbentuk karena adanya perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak akan ada keluarga bila tidak didahului adanya perkawinan.

Tentang keluarga (*family*), biro Sensus Amerika Serikat [dalam Rogers et.al. (1988:176)] mendefinisikan sebagai *one or more persons living in the same household who are related by birth, marriage, or adaption*. Juga dijelaskan bahwa keluarga merupakan satu unit sosial. Sebagai unit sosial keluarga adalah yang memiliki tanggung jawab sosial untuk mensosialisasikan dan mengasuh anak. Keluarga merupakan lembaga sosial pertama dimana para anggotanya berinteraksi secara langsung, anggota-anggotanya terikat bersama oleh perkawinan, hubungan darah atau karena adopsi. Keluarga itu, menurut Rogers, dapat terdiri dari seorangan saja atau lebih, dapat juga berupa seorang manusia yang hidup sendiri di suatu lingkungan sosial yang kompleks sampai dengan suatu keluarga yang terdiri dari tiga generasi (kakek-nenek, ayah-ibu, anak-anaknya, dan beberapa famili lain baik yang karena hubungan darah, perkawinan, atau karena adopsi). Memang tidak bisa demikian saja disejajarkan tata laku hidup antara orang Timur (termasuk masyarakat Indonesia) dan masyarakat Barat (termasuk masyarakat Amerika yang merupakan populasi sasaran studi Rogers dan kawan-kawan).

Menurut Supriyono dkk (2015:55) Pendidikan ialah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani, dan

akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Agar memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukannya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Dengan pendidikan seorang manusia terbina menuju kedewasaan, tanggung jawab, kematangan, dan berperan dalam masyarakat.

Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Secara yuridis, Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-undang Nomo 20 Tahun 2003) mendefinisikan pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat.

Dari beberapa pengertian tersebut tentang definisi pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan diorientasikan pada dua pihak yang membawa konsekuensi pada pamaknaannya. Pertama pendidikan yang ditujukan terbatas kepada bayi, anak-anak, remaja, dan pemuda yang belum dewasa sebagai proses pematangan, peradaban, dan pembudayaan sebagai proses sosialisasi. Kedua pendidikan yang ditujukan kepada setiap orang dalam rangka konsep pendidikan seumur hidup, yang diartikan sebagai proses pengembangan diri secara berkelanjutan dalam menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta dalam upaya pengembangan masyarakat.

Bagi bayi pendidikan adalah upaya menumbuhkembangkan individu agar bertumbuh dan berkembang untuk memenuhi tugas-tugas perkembangannya sesuai bertambahnya umur. Bagi anak-anak, remaja, dan pemuda pendidikan ialah bimbingan yang diberikan kepada mereka dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya untuk mencapai tingkat kedewasaan dan bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan, membentuk karakter diri, dan mengarahkan anak untuk menjadi pribadi

yang lebih baik. Pendidikan juga bisa diartikan sebagai usaha sadar yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik dalam belajar melalui suatu kegiatan pengajaran, bimbingan, dan latihan demi peranannya di masyarakat yang terus berkembang. Secara kronologis keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Juga dikatakan lingkungan yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. Tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak adalah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan, nilai-nilai moral, dan budaya. Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain.

Bagi seorang anak keluarga merupakan persekutuan hidup pada lingkungan keluarga tempat di mana dia menjadi diri pribadi atau diri sendiri. Keluarga juga merupakan wadah bagi anak dalam konteks proses belajarnya untuk mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi sosialnya. Disamping itu keluarga merupakan tempat belajar bagi anak dalam segala sikap untuk berbakti kepada Tuhan sebagai perwujudan nilai hidup yang tertinggi. Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang pertama dan utama bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan anak adalah orang tua. Sejatinya, pendidikan dimulai dari dalam keluarga karena tidak ada orang yang tidak dilahirkan dalam keluarga, kecuali dalam situasi luar biasa. Jauh sebelum ada lembaga pendidikan yang disebut sekolah, keluarga telah ada sebagai lembaga yang memainkan peran penting dalam pendidikan yakni sebagai peletak dasar pembentukan watak dan kepribadian. Dalam dan dari

keluarga orang mempelajari banyak hal, dimulai dari bagaimana berinteraksi dengan orang lain, menyatakan keinginan dan perasaan, menyampaikan pendapat, bertutur kata, bersikap, berperilaku, hingga bagaimana menganut nilai-nilai tertentu sebagai prinsip dalam hidup. Intinya, keluarga merupakan basis pendidikan bagi setiap orang.

Menurut Supriyono, dkk (2015:58-59) penanaman moral bagi anak tercermin dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat di contoh oleh anak dan segala nilai yang dikenal anak akan melekat pada orang-orang yang disenangi dan dikaguminya, dan melalui

inilah salah satu proses yang ditempuh anak dalam mengenal nilai-nilai etis dalam kehidupan. Perilaku etis mencerminkan keluhuran dan kemuliaan kemanusiaan yang bersumber dari filsafat, kearifan lokal, nilai-nilai agama, dan kebudayaan. Cara yang bisa dilakukan antara lain melalui keteladanan, petuah-petuah, penyediaan buku-buku bacaan, penyediaan film-film, dan lingkungan hidup yang merangsang tumbuhnya moralitas yang baik. Isi pendidikan moral itu bermacam-macam, tentang ketuhanan, kasih sayang, kesetiaan, nasionalisme, patriotisme, *charity* (kebaik dan kelembutan hati), kejujuran, keadilan, kebenaran, kebijakan, keindahan, dan sebagainya. Dengan kepemilikan moral yang baik manusia akan memiliki perilaku yang sinkron dengan sifat-sifat kemanusiaan yang luhur dan beradab mulia. Keluarga adalah tempat paling baik penyemaian sifat dan karakter moral yang baik.

Kepemilikan moral yang baik dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, yaitu proses menjadikan seseorang dalam hal ini anak, tumbuh kembang sebagai warga masyarakat yang memahami, menghayati dengan tingkah laku yang sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat pada masyarakat setempat, yang meliputi nilai-nilai dan norma-norma. Nilai-nilai yang diinginkan antara lain: (a) nilai tatakrama, (b) nilai sopan-santun, (c) nilai kebersamaan dan gotong royong, (d) nilai toleransi, (e) nilai ketelitian, kerapian, kedisiplinan dan kesempurnaan, dan (f) nilai kesabaran dan keuletan.

Keluarga bagi kepentingan pendidikan merupakan lembaga sosial yang minimal terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga merupakan lembaga internalisasi nilai-nilai sosial, yaitu nilai-nilai yang mewarnai harmonis tidaknya kehidupan bersama antara manusia. Dalam keluarga anak belajar berbagi peran, berbagi kepentingan, berbagi hak dan kewajiban, membentuk kesepakatan sosial, dan belajar menyusun struktur sosial sebagaimana kehidupan di masyarakat. Perkembangan kesadaran sosial pada anak dapat dipupuk sedini mungkin, terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh dengan rasa tolong-menolong, gotong-royong, toleransi, saling asah-asih-asuh, dan saling melengkapi. Dalam keluarga anak-anak dibiasakan untuk mengambil peran dan tanggung jawab sosial dalam keluarga, yang pada akhirnya akan mengambil peran di masyarakat.

## **B. Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam**

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi setiap orang muslim, terutama dalam keluarga. Oleh karena itu, banyak sekali dijumpai ayat ayat dalam al-Qur'an yang menerangkan tentang hakikat pendidikan keluarga, diantaranya: a. (Q.S. At-Tahrim: 6)

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa hakikat pendidikan keluarga menurut surat At-Tahrim merupakan tanggung jawab setiap manusia adalah menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam arti bahwa manusia itu dituntut untuk mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Swt bukan hanya pada dirinya saja, tetapi harus memberikan pengajaran dan pendidikan kepada manusia sesama, terutama kita sebagai orang tua perlu menanamkan nilai-nilai pendidikan agama terhadap anak-anak kita.

Dalam lingkungan keluarga, keterlibatan orang tua sangat penting mengingat kedudukannya secara kodrati adalah sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya, dan sekaligus orang tua merupakan contoh identifikasi sehingga apapun yang dilakukan oleh orang tua tentu dapat menjadi tolak ukur atau bahan perbandingan bagi anak. Sejak hari pertama kelahiran anak, dianjurkan kepada setiap muslim untuk segera memberikan ucapan selamat kepada seorang muslim yang melahirkan seorang anak, hal ini dilakukan untuk mempererat ikatan persaudaraan dan kecintaan antar keluarga muslim.

Dalam rangka menanamkan aqidah kepada anak, pertama kali yang dilakukan oleh orang tua mengajarkan kalimat syahadat kepada anak, dengan memperdengarkan kalimat tersebut kepada anak. Pendidikan akhlak yang diberikan oleh orang tua yang merupakan lanjutan dari pendidikan aqidah yang diberikan sebelumnya. Dilihat dari segi bahasa

perkataan akhlak berasal dari bahasa arab bentuk jamak dari *khulq*, *khulq* dalam kamus almunjid berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Dan ada yang mengatakan bahwa akhlak adalah sifat manusia yang terdidik.

Mendidik anak pun tidak terbatas dalam satu perkara saja tanpa perkara lainnya, seperti (misalnya) mencuci pakaiannya atau membersihkan badannya saja. Bahkan mendidik anak itu mencakup perkara yang luas, mengingat anak merupakan generasi penerus yang akan menggantikan kita yang diharapkan menjadi generasi tangguh yang akan memenuhi bumi ini dengan kekuatan, hikmah, ilmu, kemuliaan dan kejayaan. Berikut beberapa perkara yang wajib diperhatikan oleh ibu dalam mendidik anak-anaknya: Menanamkan aqidah yang bersih, yang bersumber dari al-Qur'an dan al Hadis, serta Ijma para ulama.

### **C. Pengajaran IPS dalam Keluarga**

IPS merupakan bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang antara lain mencakup ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya yang dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat (penjelasan pasal 37). Sementara itu kalau mengacu pada kajian Social Studies, National Council for Social Studies (NCSS) dijelaskan bahwa:

*"Social studies are the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and the natural sciences. The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world"* (1994: 3).

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka secara umum dapat dirumuskan tujuan pembelajaran IPS, antara lain mengantarkan, membimbing, dan mengembangkan potensi peserta didik agar: (1) menjadi warga negara (dan juga warga dunia) yang baik; (2) mengembangkan

pemahaman mengenai pengetahuan dasar keekonomian, kesejarahan, kegeografian, kesosiologian, kewarganegaraan, dan kemasyarakatan, secara terpadu (3) mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan penuh kearifan dan keterampilan inkuiri untuk dapat memahami, menyikapi, dan mengambil langkah-langkah untuk ikut memecahkan masalah sosial kebangsaan, (4) membangun komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai serta ikut mengembangkan nilai-nilai luhur dan budaya Indonesia, dan (5) mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, baik lokal, regional maupun internasional.

Pembelajaran IPS juga diharapkan dapat melatih peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan seperti berkomunikasi, beradaptasi, bersinergi, bekerja sama, bahkan berkompetisi sesuai dengan adat dan norma-norma yang ada. Selanjutnya para peserta didik diharapkan menghargai dan merasa bangga terhadap warisan budaya dan peninggalan sejarah bangsa, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti luhur, mencontoh nilai-nilai keteladanan dan kejujuran para pahlawan, para pemuka masyarakat dan pemimpin bangsa, memiliki kebanggaan nasional dan ikut mempertahankan jati diri bangsa.

#### **D. Pengaruh Pendidikan Keluarga dalam Membentuk Karakter**

Pendidikan IPS sebenarnya sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Hal ini terlihat pada rumusan tujuannya, bahwa pendidikan karakter atau pendidikan nilai juga bertujuan agar peserta didik menjadi warga negara yang baik. Bahkan, secara tegas Gross menyatakan, “*Values Education as social studies “to prepare students to be wellfunctioning citizens in democratic society”*” (Darmadi, 2007:8). Secara konseptual, istilah pendidikan nilai ini sering disamakan dengan pendidikan religius, pendidikan budi pekerti, pendidikan akhlak mulia, pendidikan moral atau pendidikan karakter itu sendiri (Samsuri, 2009:1; dan Zuchdi, 2008:5). Pendidikan karakter, pendidikan moral, atau pendidikan budi pekerti itu dapat dikatakan sebagai upaya untuk mempromosikan dan menginternalisasikan nilai-nilai utama, atau nilai-nilai positif kepada warga masyarakat agar menjadi warga bangsa yang percaya diri, tahan uji dan bermoral tinggi, demokratis, dan bertanggung jawab serta *survive* dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pendidikan karakter merupakan proses pembudayaan dan pemanusiaan.

Pendidikan karakter akan mengantarkan warga belajar dengan potensi yang dimilikinya dapat menjadi insan-insan yang beradab, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kehambaan, dan kekhalifahan. Dalam pengembangan pendidikan karakter di sekolah, institusi pendidikan atau sekolah harus menjadi lingkungan yang kondusif. Sekolah

harus menjadi sebuah komunitas dan wahana persaudaraan tempat berkembangnya nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai utama. Pendidikan karakter akan senantiasa mengembangkan akhlak mulia dan kebiasaan yang baik bagi para peserta didik (Lewis, 1996:8). Dalam pengembangan pendidikan karakter, guru harus juga bekerja sama dengan keluarga atau orang tua/wali peserta didik. Bahkan, menurut Cletus R. Bulach (2002: 80), guru dan orang tua perlu membuat kesepakatan tentang nilai-nilai utama apa yang perlu dibelajarkan misalnya: *respect for self, others, and property; honesty; selfcontrol/discipline*. Dalam kaitan ini, Lickona (2000:48) menyebutkan beberapa nilai kebaikan yang perlu dihayati dan dibiasakan dalam kehidupan peserta didik agar tercipta kehidupan yang harmonis di dalam keluarga dan masyarakat. Beberapa nilai itu antara lain kejujuran, kasih sayang, pengendalian diri, saling menghargai atau menghormati, kerjasama, tanggung jawab, dan ketekunan.

Pendidikan karakter sebenarnya sebagai upaya kembali ke hakikat pendidikan yang sesungguhnya. Dijelaskan di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Peran Pembelajaran IPS dalam Pembentukan Karakter Pembelajaran IPS memiliki peran strategis dalam membentuk karakter. Pendidikan karakter yang dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan moral atau pendidikan budi pekerti (Darmiyati Zuchdi, 2008: 5). Pendidikan karakter memiliki arah dan tujuan yang sama dengan tujuan pembelajaran IPS, yakni sama-sama bertujuan agar peserta didik menjadi warga negara yang baik. Bahkan secara tegas Gross menyatakan

bahwa, *values education as social studies to prepare students to be well-functioning citizens in democratic society* (Hamid Darmadi, 2007: 8). Pendidikan karakter menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik yang berpedoman terhadap agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang sesuai dengan budaya Indonesia. Untuk itu perlu dikembangkan nilai yang menjadi bagian hidup peserta didik, yakni nilai keimanan dan ketaqwaan, nasionalisme, patriotisme, tanggung jawab, kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, dan kemandirian. Pendidikan karakter juga menginternalisaikan nilai-nilai, seperti percaya diri, bertanggung jawab, dan bermoral. Pendidikan karakter sangat penting dikembangkan di lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Pendidikan karakter di sekolah diperlukan lingkungan yang mendukung untuk mengembangkan nilai-nilai kebaikan.

Pendidikan karakter akan senantiasa mengembangkan akhlak mulia dan kebiasaan yang baik bagi peserta didik (Kirsten Lewis, 1996: 8). Thomas Lickona (2000: 48) menyebutkan beberapa nilai kebaikan yang perlu dihayati dan dibiasakan dalam kehidupan peserta didik agar tercipta kehidupan yang harmonis di dalam keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai yang perlu dibiasakan dalam kehidupan yakni kejujuran, kasih sayang, pengendalian diri, saling menghargai atau menghormati, kerja sama, tanggung jawab, dan ketekunan. Untuk itu dalam mengembangkan pendidikan karakter, pihak sekolah juga harus bekerja sama dengan keluarga atau orang tua peserta didik. Thomas Lickona (1992: 53) mendefinisikan tiga komponen dalam membentuk karakter yang baik, yaitu dapat dijelaskan bahwa masing-masing komponen mempunyai aspek yang saling berhubungan satu sama lain yakni *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral actions*. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang untuk berbuat maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter yaitu kompetensi, keinginan, dan kebiasaan. Dapat disimpulkan bahwa untuk mengembangkan karakter melalui tahap pengetahuan, kemudian berbuat, menuju kebiasaan dimaksudkan bahwa karakter tidak sebatas pada pengetahuan saja, akan tetapi perlu ada perlakuan dan kebiasaan untuk berbuat sehingga membentuk karakter yang baik.

Karena pendidikan karakter merupakan proses untuk membentuk, menumbuhkan, mengembangkan, dan mendewasakan kepribadian anak menjadipribadiyangbijaksanadanbertanggungjawabmelaluipembiasaan-

pembiasaan pikiran, hati, dan tindakan secara berkesinambungan yang hasilnya dapat terlihat dalam tindakan nyata sehari-hari baik di sekolah maupun di masyarakat. Pendidikan nilai atau pendidikan karakter dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki kesamaan yang masing-masing bertujuan untuk menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik. Untuk itu IPS memiliki peran penting dalam pembentukan karakter bangsa, peserta didik diharapkan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungannya, serta memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. IPS menjadi fondasi penting bagi pengembangan intelektual, emosional, kultural, dan sosial peserta didik, yaitu mampu menumbuhkan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku yang bertanggung jawab selaku individual, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Selain itu, IPS pun bertugas mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif untuk perbaikan segala ketimpangan, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun di masyarakat. Proses pembelajaran karakter lebih diarahkan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan perilaku. James Barth (1990: 254) mengungkapkan bahwa terdapat tiga aspek dalam pembelajaran yang harus dicapai yaitu: *“a) knowledge, which is a body of fact and principles; b) skill, which is acquiring an ability through experience or training; c) attitude, which is one’s opinion, feeling or mental set as demonstrated by one’s action”*. Hal ini sama dengan arah dari pembelajaran IPS, bahwa pembelajaran IPS lebih menekankan aspek pendidikan daripada transfer konsep agar peserta didik memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilan berdasarkan konsep yang telah dimiliki (Mrtorell dalam Solihatin, 2008: 14). Pembelajaran IPS dibangun sebagai proses transaksi kultural yang harus mengembangkan karakter.

## **BAB V**

# **PENGAJARAN IPS DALAM PENDIDIKAN FORMAL/SEKOLAH**

Hakikat dan Tujuan, Landasan, dan Perkembangan Kurikulum IPS bukanlah hal yang benar-benar baru. Namun, sebagai guru profesional hakikatnya adalah menjadi agen pembaharuan yang berperan sebagai pemimpin dan pendukung nilai-nilai dalam masyarakat dan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Menjadi guru IPS yang baik seorang guru diharapkan memiliki dasar-dasar pembelajaran IPS karena membelajarkan IPS di SD bukan berarti mengajarkan ilmu-ilmu sosial, melainkan membelajarkan konsep-konsep esensi ilmu sosial untuk membentuk peserta didik menjadi Warga Negara yang baik.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran penting dalam pendidikan formal, khususnya di sekolah. IPS merupakan ilmu yang mempelajari berbagai aspek kehidupan sosial, seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. IPS memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan intelektual, emosional, kultural, dan sosial siswa.

Melalui pembelajaran IPS, siswa dapat mengembangkan cara berpikir bersikap dan berperilaku yang bertanggung jawab selaku individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. IPS juga dapat membantu siswa untuk memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan di dunia internasional.

Pada era globalisasi ini, pembelajaran IPS semakin penting karena siswa perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan

yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat yang majemuk dan dinamis. Pembelajaran IPS yang efektif dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Siswa juga dapat belajar untuk menghargai perbedaan budaya dan agama, serta untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang lain.

Pendidikan IPS di Sekolah Dasar diajarkan sebagai salah satu mata pelajaran tersendiri pada kurikulum 2013, namun saat ini dengan diberlakukannya kurikulum merdeka dimana materi pembelajaran mengambil esensi atau hal penting saja maka pembelajaran IPS disandingkan bersama IPA/SAINS yang kemudian melebur menjadi mata pelajaran IPS. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) itu bukan disiplin ilmu melainkan suatu program pengajaran atau mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan bidang ilmu-ilmu sosial (ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu ekonomi, dan ilmu sosiologi) dan humaniora (aspek norma, nilai, bahasa, seni, dan budaya).

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah mata pelajaran yang penting dalam kurikulum pendidikan di Sekolah Dasar (SD) di banyak negara. IPS bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Namun, efektivitas pembelajaran IPS di SD dapat bervariasi dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Oleh karena itu, analisis pembelajaran IPS di SD menjadi penting untuk memahami tantangan, potensi, dan perbaikan yang diperlukan dalam pengajaran mata pelajaran ini.

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) yang kita kenal selama ini merupakan suatu mata pelajaran yang ada pada tingkatan sekolah atau nama suatu program studi yang ada di suatu perguruan tinggi. IPS yang ada di Amerika Serikat sering disebut dengan istilah *social studies* yang pertama kali dipakai sebagai salah satu nama komite yaitu *committee of social studies* yang berdiri di tahun 1913.

Sudah tak asing lagi bagi kita ketika kita mendengar istilah IPS, mata pelajaran ini sudah ada sejak Sekolah Dasar. Sebenarnya apa itu IPS? IPS menggunakan pendekatan interdisipliner yaitu pendekatan yang menggabungkan beberapa ilmu-ilmu sosial. Pada mata pelajaran IPS ilmu-ilmu sosial yang digabungkan seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sejarah, geografi, sosiologi serta antropologi. Ilmu sosial tersebut digabungkan karena mempunyai karakteristik yang sama.

*Social studies* didirikan dengan tujuan sebagai tempat berkumpulnya para ahli yang mempunyai keahlian yang sama yaitu dalam bidang *social studies*. Sehingga nama komite tersebut yaitu *social studies* digunakan sebagai nama kurikulum yang mereka hasilkan dalam komite (Hidayati dkk, 2008: 1.6). *Social studies* merupakan komite yang menghimpun orang-orang yang berminat pada ilmu-ilmu sosial.

Mortorella dalam Solihatin, E. dan Raharjo. (2009: 14) berpendapat mengenai pendidikan IPS yang harus mengedepankan pendidikan daripada hanya sekedar menyalurkan konsep-konsep. Dari pendapat tersebut terkandung makna bahwa pendidikan IPS harus ditujukan pada aspek-aspek kependidikannya namun sebelum siswa menerapkan aspek-aspek tersebut, siswa harus terlebih dahulu paham terhadap konsep yang dipelajari.

Sardjiyo dkk (2008:1.26) berpendapat bahwa IPS merupakan suatu pelajaran banyak memahami, menganalisis, dan menelaah suatu gejala sosial maupun masalah sosial yang sering terjadi di sekitar kehidupan dengan memandang atau meninjau dari berbagai sudut pandang kehidupan manusia sebagai suatu keterpaduan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa IPS bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, namun merupakan suatu keterpaduan yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita dalam bermasyarakat.

Pendidikan IPS antara jenjang pendidikan yang satu dan yang lainnya berbeda sesuai dengan kebutuhan dari tiap-tiap jenjang tersebut. Bila pendidikan IPS tidak dibedakan maka pada jenjang pendidikan yang rendah akan mengalami kesulitan dalam pembelajarannya kepada siswa. Mulyono Tj. dalam Hidayati dkk (2008: 1.7) menegaskan bahwa IPS menggunakan pendekatan interdisipliner dari berbagai ilmu sosial. IPS di Sekolah Dasar terdiri dari berbagai ilmu sosial yang harus dipelajari karena IPS terintegrasi dengan ilmu-ilmu sosial misalnya sejarah, geografi, ilmu politik, ekonomi, psikologi sosial, antropologi budaya, dan lain sebagainya.

Saidiharjo dalam Hidayati dkk (2008: 1.7) menegaskan IPS merupakan integrasi atau kombinasi dari keterpaduan mata pelajaran ilmu sosial. Pendapat ini masih sama dengan pendapat Mulyono Tj bahwa IPS terdiri dari perpaduan sejumlah mata pelajaran dari ilmu sosial seperti yang kita

lihat pada pendidikan IPS di Sekolah Dasar namun jika di SMP maupun SMA pendidikan IPS sudah mulai dipisah-pisah.

Menurut Faqih Samlawi dan Bunyamin Maftuh (2001:5) IPS merupakan mata pelajaran yang terdiri dari berbagai mata cabang dari ilmu sosial yang disusun menggunakan pendekatan pendidikan dan pendekatan psikologis agar berguna bagi siswa. Dari pendapat ini yang dipadukan dalam IPS adalah konsep-konsep dasar dari ilmu sosial dan penyusunan keterpaduan tersebut melalui beberapa kriteria. Namun, istilah konsep-konsep dasar ilmu sosial masih sangat luas maknanya.

Berdasar pada pendapat para ahli di atas kesimpulannya adalah IPS merupakan bidang studi perpaduan disiplin ilmu-ilmu sosial yang berfokus, menelaah dan menganalisis gejala sosial dan masalah sosial dari berbagai sudut pandang kehidupan manusia. Dengan meninjau gejala dan masalah sosial yang ada di masyarakat, siswa dapat secara langsung mengamati dan mempelajari aturan atau norma yang ada pada masyarakat sehingga siswa dapat menjalin hubungan yang baik dengan sesama.

Pengetahuan sosial adalah rangkaian dari suatu peristiwa, dan realita kehidupan manusia membangun dirinya dan sekitarnya berdasarkan pada pengalaman yang mereka dapat sebelumnya dan dilakukan untuk masa sekarang dan digunakan untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

Sumantri dalam (Sapriya, 2012: 11) mendefinisikan pendidikan IPS dalam dua jenis, yaitu pendidikan IPS untuk persekolahan dan pendidikan IPS untuk perguruan tinggi sebagai berikut:

“Pendidikan IPS dua jenis, yakni Pendidikan IPS untuk persekolahan dan Pendidikan IPS untuk perguruan tinggi sebagai berikut. Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis untuk pendidikan. Pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan Pendidikan”.

Pengertian pendidikan IPS yang pertama berlaku untuk pendidikan dasar dan menengah, sedangkan yang kedua berlaku untuk perguruan

tinggi atau PLTK. Perbedaan dari dua definisi ini terletak pada istilah “penyederhanaan” untuk pendidikan dasar dan menengah sedangkan untuk perguruan tinggi ada istilah “seleksi” Pengertian IPS di sekolah tersebut ada yang berarti program pengajaran, ada yang berarti mata pelajaran yang berdiri sendiri, ada yang berarti gabungan (paduan) dari sejumlah mata pelajaran atau disiplin ilmu. Perbedaan ini dapat pula diidentifikasi dari pendekatan yang diterapkan pada masing-masing jenjang persekolahan.

Berdasar perspektif tentang pengertian IPS di atas, dapat disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan kajian ilmu-ilmu sosial secara terpadu yang disederhanakan untuk pembelajaran di sekolah dan mempunyai tujuan agar peserta didik dapat nilai-nilai yang baik sebagai warga negara yang bermasyarakat sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang baik berdasarkan pengalaman masa lalu yang dapat di masa kini, dan diantisipasi untuk masa yang akan datang karena aktivitas manusia dapat dilihat dari dimensi waktu yang meliputi masa lalu, sekarang dan masa depan.

Aktivitas manusia yang berkaitan dalam hubungan dan interaksinya dengan aspek keruangan atau geografis. Aktivitas manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya dalam dimensi arus produksi, distribusi dan konsumsi. Selain itu, dikaji pula bagaimana manusia membentuk seperangkat peraturan sosial dalam menjaga pola interaksi sosial antarmanusia dan bagaimana cara manusia memperoleh dan mempertahankan suatu kekuasaan. Pada intinya, fokus kajian IPS adalah berbagai aktivitas manusia dalam berbagai dimensi kehidupan sosial sesuai dengan karakteristik manusia sebagai makhluk sosial.

Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi materi, budaya, dan kejiwaannya; memanfaatkan sumber daya yang ada dipermukaan bumi; mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya maupun kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. Singkatnya, IPS mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakat.

Dengan pertimbangan bahwa manusia dalam konteks sosial demikian luas, pengajaran IPS pada jenjang pendidikan harus dibatasi sesuai dengan kemampuan peserta didik tiap jenjang, sehingga ruang lingkup pengajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah. Terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar peserta didik MI/SD.

Pada jenjang pendidikan menengah, ruang lingkup kajian diperluas. Begitu juga pada jenjang pendidikan tinggi: bobot dan keluasan materi dan kajian semakin dipertajam dengan berbagai pendekatan. Pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan pendekatan sistem menjadi pilihan yang tepat untuk diterapkan karena IPS pada jenjang pendidikan tinggi menjadi sarana melatih daya pikir dan daya nalar mahasiswa secara berkesinambungan.

Sebagaimana telah dikemukakan di depan, bahwa yang dipelajari IPS adalah manusia sebagai anggota masyarakat dalam konteks sosialnya, ruang lingkup kajian IPS meliputi (a) substansi materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat dan (b) gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat. Kedua lingkup pengajaran IPS ini harus diajarkan secara terpadu karena pengajaran IPS tidak hanya menyajikan materi-materi yang akan memenuhi ingatan peserta didik tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS harus menggali materi-materi yang bersumber pada masyarakat. Dengan kata lain, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat atau yang tidak berpijak pada kenyataan di dalam masyarakat tidak akan mencapai tujuannya

Pada ruang lingkup mata pelajaran IPS SD meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

1. Manusia, tempat, dan lingkungan.
2. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan.
3. Sistem Sosial dan Budaya.
4. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan.

Pada pembelajaran IPS ini ditegaskan bahwa pembelajaran IPS bukan bertujuan untuk memenuhi ingatan pengetahuan para peserta didik dengan berbagai fakta dan materi yang harus dihafalnya, melainkan untuk membina mental yang sadar akan tanggung jawab terhadap hak dirinya sendiri dan kewajiban kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam IPS tersebut yaitu, nilai edukatif, nilai praktis, nilai teoritis, dan nilai ketuhanan.

Tujuan pendidikan IPS secara konseptual harus dilihat dari beberapa istilah yang digunakan di negara asalnya, yaitu *social studies* dan *citizenship aducation* atau *civic education*. Jika pendidikan IPS dipandang sebagai **social studies**, maka pendidikan IPS bertujuan untuk mengkaji masalah-masalah sosial pada umumnya dan kehidupan manusia pada khususnya, dengan begitu siswa memiliki pengetahuan yang logis, lengkap, dan objektif yang didukung dengan informasi dan fakta yang terjadi sehingga siswa mampu mengambil keputusan secara tepat. Pendidikan IPS dipandang sebagai **citizenship aducation** atau **civic education**, maka pendidikan IPS bertujuan membentuk siswa menjadi warga negara yang baik sehingga siswa mampu berperan aktif dan efektif dalam kehidupan masyarakat yang demokratis (Pramono, 2013: 17).

Menurut Sapriya (2008: 161) tujuan pembelajaran IPS ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya,
2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, *enquiry*. Memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial,
3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan,
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.

Selain tujuan pembelajaran IPS di atas Chapin dan Messick (1992: 5) bahwa tujuan pembelajaran IPS dapat dikelompokkan ke dalam enam komponen, yaitu:

1. Memberikan pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang.
2. Mengembangkan keterampilan untuk mencari dan mengolah informasi.
3. Mengembangkan nilai sikap demokrasi dalam bermasyarakat.
4. Menyediakan kesempatan siswa untuk berperan serta dalam kehidupan sosial.
5. Ditujukan pada pembekalan pengetahuan, pengembangan berpikir, dan kemampuan berpikir kritis, melatih kebebasan keterampilan dan kebiasaan.
6. Ditujukan kepada peserta didik untuk mampu memahami hal yang bersifat konkret, realistis dalam kehidupan sosial.

Sementara Mutakin, A. (2003: 12-13) mengungkapkan bahwa tujuan pembelajaran IPS secara keseluruhan membantu setiap individu untuk meningkatkan aspek ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai keterampilan. Pembelajaran IPS juga memenuhi kebutuhan *human relationship*, *civic responsibility*, *economic competence*, dan *thinking ability*.

Tujuan pendidikan IPS di atas pada intinya diarahkan pada proses pengembangan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Potensi yang dimiliki siswa tersebut menumbuhkan siswa menjadi warga negara yang baik.

## **BAB VI**

# **PENGAJARAN IPS DALAM KESEHATAN REPRODUKSI**

### **A. Pengertian Pendidikan Kesehatan Reproduksi**

Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sangat diperlukan oleh masyarakat, khususnya remaja. Berdasarkan laporan dari World Health Organization (WHO) 2012, kelompok usia remaja (10–19 tahun) pada tahun 2010 menempati seperlima jumlah penduduk dunia, dan 83% diantaranya hidup di negara-negara berkembang. Usia remaja merupakan usia yang paling rawan mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti kehamilan dan melahirkan usia dini, aborsi yang tidak aman, infeksi menular seksual (IMS) termasuk Human Immunodeficiency Virus (HIV), pelecehan seksual, dan perkosaan. Selain itu, usia remaja merupakan usia peralihan dari anak menuju dewasa, sehingga perlu bimbingan agar mudah dalam menjalani perubahan.

Remaja sangat mudah terpengaruh informasi global melalui media audio-visual yang semakin mudah diakses. Namun karena minim informasi kesehatan reproduksi membuat mereka dihadapkan pada kebiasaan yang tidak sehat, seperti seks bebas, merokok, minum-minuman beralkohol, penyalahgunaan obat, dan suntikan terlarang. Menurut hasil konferensi International Conference On Population Development (ICPD) dan Millenium Development Goals (MDG's) diharapkan di akhir tahun 2015 nanti, minimal 90% dari seluruh jumlah remaja sudah harus mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual (Respati, 2012). Dampak dari kurangnya informasi kesehatan reproduksi salah satunya

adalah banyak remaja yang melakukan hubungan seksual pranikah tanpa mengetahui resiko yang ditimbulkan.

Besarnya rasa keingintahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi mendorong remaja untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Media memegang peran penting dalam menyebarkan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Menurut (Maryatun, 2013) informasi tersebut dapat berasal dari berbagai sumber misalnya dari teman, melihat dari film atau video porno, tayangan televisi, membaca buku, majalah, dan surat kabar. Media informasi tersebut tidak menjamin pendidikan seksual yang benar serta sesuai dengan kebutuhan remaja.

Kesehatan reproduksi adalah salah satu aspek penting dari kesejahteraan manusia yang melibatkan faktor-faktor biologis, sosial, dan psikologis. Dalam era modern ini, akses terhadap pengetahuan yang akurat dan pemahaman yang mendalam tentang kesehatan reproduksi merupakan hak dasar setiap individu. Di sinilah peran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam pendidikan menjadi sangat penting. IPS bukan hanya memberikan pemahaman biologis tentang tubuh manusia, tetapi juga mencakup konteks sosial, gender, hak-hak reproduksi, dan kebijakan publik yang mempengaruhi keputusan-keputusan terkait dengan kesehatan reproduksi.

Siswa di sekolah dasar berada pada tahap perkembangan yang kritis. Mereka mulai membentuk persepsi dan sikap terhadap tubuh, seksualitas, dan hubungan antargender. Oleh karena itu, pengajaran IPS yang mencakup kesehatan reproduksi di tingkat ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan nilai-nilai yang benar terkait dengan isu-isu ini. Namun, pada kenyataannya banyak sekolah dasar yang masih kurang memperhatikan pengajaran IPS dalam konteks kesehatan reproduksi.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kesehatan adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Sedangkan reproduksi berasal dari kata “re” yang artinya kembali dan kata produksi yang mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya.

Secara bahasa, reproduksi didefinisikan sebagai pengembangbiakan atau keturunan. Maka ia sangat berkaitan erat dengan masa depan manusia dimuka bumi yang menentukan jumlah manusia baru, yang akan menggantikan manusia lama, andai manusia tidak lagi bereproduksi, maka lenyaplah masa depan manusia. Jadi istilah reproduksi dapat diartikan sebagai suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya (Yessi Harnani: 2).

Achmad Nurcholish (Agama dan Seksualitas: 32) menyebutkan bahwa kesehatan reproduksi dapat diartikan sebagai keadaan sempurna fisik, mental, dan kesejahteraan sosial dalam hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Menurut Depkes RI, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental, dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi serta proses reproduksi. Sebenarnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi yang mencakup tentang organ dan proses reproduksi sebenarnya bukanlah hal yang baru, konsep tentang kesehatan reproduksi pun semakin meluas dengan menggabungkan segala ilmu tentang proses pertumbuhan organ reproduksi sejak awal sampai usia yang sudah lanjut, dan tentang berbagai hal yang mempengaruhi kesehatan reproduksi.

Menurut World Health Organization (WHO) dan International Conference on Population and Development (ICPD) pada tahun 1994 yang diselenggarakan di Kairo, kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara utuh, baik fisik, mental, maupun sosial bukan hanya bebas dari penyakit/gangguan dengan sistem reproduksi, fungsinya maupun proses reproduksi itu sendiri (Kemkes RI, 2017).

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat yang mencakup seluruh keadaan baik fisik, mental, dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi serta proses reproduksi.

Pendidikan kesehatan merupakan suatu proses pembelajaran yang diatur secara terencana dan bersifat dinamis dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku individu maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan/perilaku, serta perubahan sikap menuju perubahan pola hidup ke arah yang lebih sehat (Nurmala, 2018). Menurut Notoatmodjo pendidikan kesehatan merupakan suatu

upaya mempengaruhi/mengajak orang lain (individu, kelompok, dan masyarakat) untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik dalam memelihara dan meningkatkan perilaku hidup sehat (Widodo, 2014).

Jadi pendidikan kesehatan reproduksi adalah proses pembelajaran yang dilakukan dengan cara persuasi, imbauan, ajakan, bujukan, memberikan informasi agar masyarakat berperilaku atau mengadopsi perilaku sehat dalam sistem reproduksi. Tujuan pendidikan kesehatan reproduksi adalah untuk memenuhi keadaan sehat secara menyeluruh dalam diri individu baik fisik, mental, dan sosial tidak hanya bebas dari penyakit atau gangguan dalam sistem reproduksi,, tetapi juga mengenai fungsi dan proses reproduksi itu sendiri.

Pendidikan reproduksi jika dilakukan dengan tidak tepat dan berlebihan bisa berdampak negatif. Karena itu keterlibatan orang tua, sekolah, guru, dan lingkungan yang dekat menjadi sangat penting (An-Na'miy, 2007-2008, p. 145). Beberapa ayat Al-Quran dan Hadis membahas baik secara langsung ataupun tak langsung tentang pendidikan reproduksi, diantaranya;

**1. Al-Qur'an surah al-Isrâ'/17:32**

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

**2. Al-Qur'an surah al-A'râf / 7: 81**

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas."

3. Hadis yang diriwayatkan Abu Said al-Khudry (As-Sijistaniy, 2003), (At-Tirmidzi, 2003), (Asy-Syaibaniy, 2004)

Rasulullah saw. bersabda, *"Rasulullah SAW bersabda: seorang lelaki jangan melihat aurat lelaki (lainnya), seorang perempuan jangan melihat aurat (perempuan) lainnya, dan janganlah seorang laki-laki tidur bersama laki-laki lainnya dalam satu pakaian (kain), dan janganlah seorang perempuan tidur bersama perempuan dalam satu pakaian (kain)"*.

Hadis ini merupakan tindakan antisipatif dan preventif untuk mencegah terjadinya penyelewengan orientasi seksual yaitu menyukai sesama jenis (*homoseksual*).

Sekolah sebagai perpanjangan tangan keluarga dalam meletakkan dasar perilaku untuk kehidupan anak selanjutnya, termasuk untuk perilaku kesehatan reproduksi. Pendidikan Kesehatan reproduksi bagi murid utamanya menanamkan kebiasaan hidup sehat, agar dapat bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi diri dan lingkungan serta aktif di dalam usaha-usaha kesehatan. Menurut Notoatmodjo (2012), tujuan pendidikan kesehatan adalah mengusahakan agar perilaku individu, kelompok, atau masyarakat mengalami perubahan yang positif terhadap pemeliharaan dan peningkatan kesehatan.

Tujuan utama kesehatan reproduksi adalah memberikan pelayanan kesehatan reproduksi kepada setiap individu dan pasangannya secara menyeluruh dan lengkap, terkhususnya kepada remaja agar setiap remaja mampu menjalani proses perkembangannya maupun reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab serta terbebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan. (Ningsih, Susila & Safitri, 2021).

Tujuan pendidikan kesehatan reproduksi remaja adalah untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi sehingga dapat membantu remaja bersikap positif dan bertanggung jawab dalam perkembangan seksualitas dan reproduksi yang terjadi didalam dirinya (Ahmad, 2020).

Tujuan khusus dari pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja adalah untuk melindungi atau menghindarkan remaja dari resiko kehamilan yang tidak diinginkan yang menyebabkan aborsi dan pernikahan di usia dini, mencegah remaja mengalami penyakit menular seksual, HIV/AIDS serta kekerasan seksual. Dengan adanya pelayanan dan akses

pendidikan kesehatan reproduksi remaja diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab remaja dalam mengatur seksualitas dan reproduksinya, sehingga remaja dapat memenuhi hak-hak kesehatan reproduksinya dan dapat meningkatkan kualitas hidup serta kualitas keturunannya baik fisik, mental, dan sosialnya serta terbebas dari rasa takut, tindakan kekerasan dan diskriminasi (Ningsih, Susila & Safitri, 2021).

Manfaat memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja adalah untuk mempersiapkan remaja dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam diri remaja memasuki masa pubertas, baik itu perubahan fisik, sosial maupun psikis. Selain itu, membantu remaja dalam menjaga kesehatan reproduksi serta mencegah permasalahan yang terjadi akibat kelalaian menjaga kesehatan reproduksi (Wirenviona & Riris, 2020).

## **B. Pentingnya Pengajaran IPS dalam Kesehatan Reproduksi**

Kesehatan reproduksi bukan hanya sekadar masalah biologis, tetapi juga melibatkan aspek sosial, psikologis, dan budaya. Oleh karena itu, pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam kesehatan reproduksi memegang peranan penting dalam membekali siswa dengan pemahaman yang mendalam tentang topik ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengajaran IPS dalam kesehatan reproduksi sangat penting:

Pemahaman yang komprehensif: Pengajaran IPS memungkinkan siswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang aspek-aspek kesehatan reproduksi, termasuk hak-hak reproduksi, aspek sosial dari seksualitas, dan dampak kesehatan reproduksi pada masyarakat secara keseluruhan.

Pencegahan Penyakit Menular Seksual (PMS): IPS membekali siswa dengan pengetahuan tentang cara-cara penularan penyakit menular seksual (PMS) dan strategi pencegahannya. Ini penting dalam mengurangi risiko penyebaran penyakit di masyarakat.

Pemahaman Gender dan Seksualitas: Pengajaran IPS mencakup pemahaman mendalam tentang isu-isu gender, identitas seksual, dan orientasi seksual. Ini membantu siswa memahami kompleksitas spektrum gender dan menghormati keragaman seksualitas manusia.

Pencegahan Kehamilan Remaja yang Tidak Diinginkan: Dengan memahami konsep kontrasepsi, perencanaan keluarga, dan risiko

kehamilan remaja, siswa dapat membuat keputusan yang bijak terkait dengan kehidupan seksual mereka, mengurangi angka kehamilan remaja yang tidak diinginkan.

**Pemahaman Terhadap Kekerasan Seksual:** Pengajaran IPS dapat membantu siswa memahami tanda-tanda kekerasan seksual dan cara melindungi diri dari situasi tersebut. Pengetahuan ini dapat menyelamatkan nyawa dan melindungi hak-hak individu.

**Pemberdayaan Individu:** Melalui pengajaran IPS, individu diberdayakan untuk membuat keputusan yang sehat dan bermakna terkait dengan kesehatan reproduksi mereka sendiri. Mereka dapat belajar untuk berbicara terbuka, mencari bantuan jika diperlukan, dan mendukung orang lain dalam isu-isu kesehatan reproduksi.

**Penyadaran Sosial:** Pengajaran IPS dapat membantu menghilangkan stigma dan prasangka terkait dengan kesehatan reproduksi. Hal ini penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan mendukung bagi semua individu, terlepas dari orientasi seksual, gender, atau status kesehatan reproduksi.

Selain itu pengajaran IPS dalam kesehatan reproduksi bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi juga tentang membentuk sikap dan perilaku yang sehat, hormat, dan peduli terhadap diri sendiri dan orang lain dalam konteks kesehatan reproduksi. Ini adalah langkah menuju masyarakat yang lebih sehat, berkeadilan, dan inklusif. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengajaran IPS yang mencakup isu-isu sosial, gender, hak-hak reproduksi, dan kebijakan publik sangat penting di tingkat sekolah dasar:

**Pemahaman Holistik:** Anak-anak di sekolah dasar dapat memahami kesehatan reproduksi sebagai bagian dari pemahaman holistik tentang tubuh manusia dan kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih luas, mereka dapat melihat hubungan antara kesehatan reproduksi dan kesehatan umum, serta faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhinya.

**Pencegahan Awal:** Mendidik anak-anak sejak dini tentang kesehatan reproduksi dapat membantu dalam pencegahan awal terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul di masa depan. Anak-anak yang memahami pentingnya kesehatan reproduksi cenderung membuat pilihan yang lebih sehat ketika mereka tumbuh dewasa.

Pemahaman Tentang Hak-hak Reproduksi: Anak-anak perlu tahu tentang hak-hak reproduksi manusia. Pendidikan IPS yang inklusif dapat memberi mereka pemahaman tentang hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi, dan hak untuk membuat keputusan bijak terkait dengan tubuh dan kesehatan mereka.

Pemahaman Tentang Kesetaraan Gender: Pengajaran IPS yang mencakup isu-isu gender membantu mengatasi stereotip gender yang mungkin ada di masyarakat. Anak-anak belajar bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama, dan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kesehatan mereka.

Pemberdayaan Anak-anak: Dengan memberikan pengetahuan tentang isu-isu kesehatan reproduksi, anak-anak menjadi lebih berdaya. Mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memungkinkan mereka untuk berbicara dengan bijak tentang kesehatan reproduksi, memahami pentingnya menghormati hak-hak orang lain, dan berperan aktif dalam mendukung masyarakat yang sehat dan inklusif.

Mendukung Lingkungan Belajar yang Aman: Pembelajaran yang inklusif tentang kesehatan reproduksi membantu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung untuk semua siswa, tanpa memandang jenis kelamin atau latar belakang sosial mereka.

Dengan pengajaran IPS yang mencakup aspek-aspek ini, sekolah dasar dapat memberdayakan siswa untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kesehatan reproduksi dan, pada akhirnya, mendukung terbentuknya masyarakat yang menghormati hak-hak reproduksi, gender, dan keberagaman.

### **C. Faktor-faktor yang Memengaruhi dalam Pemberian Pendidikan Reproduksi**

#### **a. Orang yang memberikan**

Orang tua memiliki peranan penting dan strategis dalam memberikan pendidikan moral dan pemahaman kesehatan reproduksi sehat. Pendidikan reproduksi idealnya diberikan pertama kali oleh orang tua di rumah, mengingat yang paling tahu keadaan anak adalah orang tuanya sendiri. Orang tua (Ibu) adalah pendidik utama dan pertama dalam pendidikan kesehatan reproduksi anak-anaknya (Endjun, 2007).

Tidak semua orang mau terbuka terhadap anak dalam membicarakan permasalahan seksual. Selain itu tingkat sosial ekonomi maupun tingkat pendidikan yang heterogen di Indonesia menyebabkan ada orang tua yang mau dan mampu memberikan penerangan tentang seks, tetapi lebih banyak yang tidak mampu dan tidak memahami permasalahan tersebut. Dalam hal ini maka sebenarnya peran dunia pendidikan sangatlah besar (Mu'tadin, 2008).

Pendidik (Guru) mempunyai andil dalam memberikan pendidikan moral dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi sehat.

#### **b. Materi yang Diberikan**

Pemberian pendidikan kesehatan reproduksi dapat mulai diberikan pada anak saat di sekolah dasar (SD). Anak SD pada rentang usia 7-12 tahun. Pada rentang usia ini anak akan mengalami trnsnsisi atau peralihan dari masa anak-anak menuju masa remaja.

Pubertas adalah awal masa remaja. Pada masa pubertas terjadi perubahan badaniah yang menandai adanya kemampuan untuk melanjutkan keturunan (reproduksi). Ada yang menyebut pubertas sebagai saat kematangan seksual. Perubahan ini disertai perubahan mental dan perilaku (Depkes, 1991).

Perempuan biasanya mengalami pubertas lebih awal pada usia 11-12 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 13-14 tahun. Perubahan badaniah yang terjadi pada perempuan, yaitu: tubuh menjadi tinggi, rambut tumbuh disekitar ketiak dan kemaluan, buah dada membesar, pinggul melebar dan mengalami menstruasi pertama. Sedangkan perubahan badaniah yang terjadi pada laki-laki, yaitu: bertambah berat dan tinggi, suara membesar, rambut tumbuh di ketiak, kemaluan, tangan, kaki, dada dan di wajah (kumis dan jenggot). Serta mengalamimimpi basah.

#### **c. Cara Penyampaian**

Membicarakan masalah seksual sifatnya sangat pribadi dan membutuhkan suasana yang akrab, terbuka dari hati ke hati antara orang tua dan anak. Hal ini akan lebih mudah diciptakan antara ibu dengan anak perempuannya atau bapak dengan anak laki-lakinya, sekalipun tidak ditutup kemungkinan dapat terwujud bila dilakukan antara ibu dengan anak laki-lakinya atau bapak dengan anak perempuannya. Namun, sebagian besar anak-anak lebih terbuka dengan ibunya dalam membicarakan reproduksi (Mu'tadin, 2008).

Pendidik (Guru) juga memiliki peranan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak dan remaja. Selain berperan sebagai guru mereka juga sebagai orang tua dan sahabat bagi muridnya. Untuk itu, seorang guru tidak hanya perlu memiliki pengetahuan yang baik mengenai biologi, psikologi ataupun sosiologi dalam pemberian materi kesehatan reproduksi, tetapi yang lebih penting adalah sikap untuk terbuka, mengerti, dan keinginan untuk jujur pada muridnya (Ismail, 2006).

Memberikan pendidikan reproduksi pada anak jangan ditunggu sampai anak bertanya mengenai seks. Sebaliknya pendidikan seks diberikan dengan terencana, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak. Sebaiknya pada saat anak menjelang remaja dimana proses kematangan baik fisik, maupun mentalnya mulai timbul dan berkembang kearah kedewasaan (Mu'tadin, 2008).

Menurut Singgih (1995), beberapa hal penting dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi, yaitu:

- 1) Cara menyampaikan harus wajar dan sederhana, jangan terlihat ragu-ragu atau malu.
- 2) Isi uraian yang disampaikan harus obyektif. Seolah-olah bertujuan agar anak tidak akan bertanya lagi, bisa mempergunakan contoh atau simbol.
- 3) Dangkal atau mendalamnya isi uraian harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak. Terhadap anak umur 9 tahun atau 10 tahun belum perlu menerangkan secara lengkap mengenai perilaku atau tindakan dalam hubungan kelamin.
- 4) Pendidikan seksual harus diberikan secara pribadi, karena luas sempitnya pengetahuan dengan cepat lambatnya tahap-tahap perkembangan tidak sama pada setiap anak.
- 5) Pada akhirnya perlu diperhatikan bahwa usahakan melaksanakan pendidikan seksual perlu diulang-ulang. Selain itu, juga perlu untuk mengetahui seberapa jauh suatu pengertian baru dapat diserap oleh anak. Perlu juga untuk mengingatkan memperkuat apa yang telah diketahui agar benar-benar menjadi bagian dari pengetahuannya.

## **D. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pemahaman Orang Tua Murid tentang Pendidikan Kesehatan Reproduksi**

### **a. Pengetahuan**

Pengetahuan menurut Notoatmojo (2003), merupakan hasil tahu, dan terjadi setelah orang melakukan pengondraan terhadap suatu objek tertentu. Irmayanti (2009), mengatakan bahwa pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera/akal budinya untuk mengenali benda/kejadian tertentu yang belum pernah dilihat dan dirasakan sebelumnya.

Pengetahuan diperoleh melalui kenyataan/fakta dengan melihat, mendengar sendiri melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, televisi, radio, film, dan lain-lain. Pengetahuan yang diperoleh sebagai pengaruh/pengalaman dari hubungan orang tua, kakak, adik, guru, tetangga, teman, dan lain-lain (Depkes, 1991).

Pengetahuan orang tua murid tentang kesehatan reproduksi yang baik dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam memahami, menggambarkan dan menilai informasi kesehatan reproduksi dengan baik dan benar. Hal ini nantinya akan memengaruhi pemahaman mereka akan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi.

Keengganan orang untuk berbicara masalah reproduksi pada akhirnya akan menyebabkan mitos-mitos tertentu di kalangan masyarakat itu sendiri. Mitos-mitos tersebut sebenarnya dapat dikontrol jika saja, masyarakat menyadari bahwa pendidikan seks sejak dini sangat perlu. Di lingkungan rumah anak enggan bertanya pada orang tua karena orang tua mengondisikan hal-hal seperti itu tidak boleh atau hal tabu untuk dibicarakan. Anggapan tabu untuk berbicara soal reproduksi dan seks masih mendekam dibenak sebagian masyarakat. Akibatnya anak-anak yang beranjak remaja tidak mendapat bekal tentang reproduksi dan seks dari orang tuanya.

Pengetahuan orang tua tentang kesehatan reproduksi tidak di dapat begitu saja, namun diperlukan adanya faktor lain yang akan mempengaruhi pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi. Faktor-faktor ini harus diperhatikan khususnya faktor kultur (budaya dan agama), dimana kultur ini memiliki peranan yang lebih untuk memunculkan pemahaman, penilaian, dan sikap mereka dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi.

## **b. Sikap**

Sikap dapat dirumuskan sebagai kecenderungan untuk merespon baik secara positif atau negatif terhadap obyek atau situasi tertentu. Sikap mengandung suatu penilaian emosional (Sarwono, 2004). Menurut Rakhmat (2004), sikap merupakan: (1) Kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi obyek, ide, situasi, dan nilai, (2) sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi, (3) sikap relatif lebih menetap, (4) sikap mengandung aspek evaluatif yaitu mengandung nilai menyenangkan/tidak menyenangkan, (5) sikap timbul dari pengalaman yaitu tidak dibawa sejak lahir, akan tetapi merupakan hasil belajar sehingga sikap dapat diperteguh/diubah.

Sikap orang tua yang masih belum terbuka mengenai reproduksi karena masih kuatnya berlaku hal tabu sering kali menghambat mereka menjadi narasumber pendidikan reproduksi bagi anaknya. Pembentukan sikap orang tua terdiri dari berbagai tingkatan. Diharapkan dengan melewati tingkatan-tingkatan tersebut orang tua memiliki sikap mendukung dalam pendidikan kesehatan reproduksi anak usia dini untuk mempersiapkan anak menghadapi masa pubertas.

## **c. Sociodemografi**

Demografi adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan perubahan-perubahan penduduk yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan tersebut seperti kelahiran, kematian migrasi sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin tertentu (Lembaga Demografi FE UT, 2000). Dalam pengertian yang lebih luas, demografi juga memperhatikan berbagai karakteristik individu maupun kelompok yang meliputi karakteristik sosial, karakteristik pendidikan, dan karakteristik ekonomi. Karakteristik sosial dan demografi meliputi: jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan agama. Karakteristik pendidikan meliputi: tingkat pendidikan. Karakteristik ekonomi meliputi pekerjaan, status ekonomi, dan pendapatan (Mantra, 2003). Faktor sosiodemografi meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua dan umur orang tua.

## **d. Status Ekonomi**

Status ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan prestasinya dan hak-

hak serta kewajiban dalam hubungannya dengan sumber daya (Soerjono, 2001).

Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk akan berbeda antara yang satu dengan yang lain, hal ini karena dipengaruhi oleh keadaan penduduk sendiri dalam melakukan berbagai kegiatan sehari-hari.

#### **e. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan sehingga terjadi perubahan perilaku positif yang meningkat. Jika seseorang mempunyai tingkat pendidikan baik maka akan mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang (Notoatmodjo, 2003)

Tingkat pendidikan dapat berkaitan dengan kemampuan menyerap dan menerima informasi kesehatan serta kemampuan dalam berperan serta dalam membangun kesehatan. Masyarakat yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan lebih berorientasi pada tindakan preventif, mempunyai pengetahuan dan wawasan lebih luas sehingga mudah menyerap dan menerima informasi, mengetahui lebih banyak tentang masalah kesehatan dan memiliki status kesehatan yang lebih baik. Serta ikut berperan aktif dalam mengatasi masalah kesehatan diri dan keluarganya (Widyastuti, 2005).

#### **f. Keterpaparan Media Massa**

Media massa adalah alat untuk transfer informasi, konsep, dan ide-ide baik khalayak umum dan khusus. Mereka adalah alat yang penting dalam memajukan tujuan kesehatan masyarakat. Berkomunikasi tentang kesehatan melalui media massa sangat kompleks, namun, dan profesional tantangan dalam beragam disiplin.

Menggunakan media massa dapat menjadi kontraproduktif jika saluran yang digunakan adalah tidak penonton yang sesuai, atau jika pesan yang disampaikan terlalu emosional, membangkitkan rasa takut atau kontroversial.

## **BAB VII**

### **ISU ALKULTURASI**

#### **A. Pengertian Alkulturas**

Proses akulturasi budaya adalah sebuah proses yang terlibat dengan menambahkan kebudayaan baru lain ke dalam budaya asli. Akulturasi yaitu sering disebut sebagai percampuran dan pengambilan sebuah kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan sekitarnya. Akulturasi budaya yaitu lebih berfokus pada interaksi budaya yang muncul ketika mengalami sebuah pertemuan dengan budaya tertentu mengalami perpaduan budaya yang tidak dikenal. (Shaddono, 2018). Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara yang memiliki budaya yang luar biasa dan berbeda. Dimana terdapat sebuah perbedaan pada budaya yang ada di setiap sukunya, hal tersebut digunakan untuk dijadikan sebagai identitas dan pembeda dengan suku bangsa lainnya. Kebudayaan yaitu sebuah kebiasaan yang dibangun dari adanya sebuah budi dan pekerti, serta adanya akal yang ada pada diri manusia. Kebudayaan sendiri memiliki arti yaitu keseluruhan yang terbentuk dari sebuah gagasan dan hasil karya dari manusia, dimana dengan hal tersebut seseorang harus dapat terbiasa dengan hasil yang ada, serta mempelajari karakternya.

Hal ini merupakan sebuah sifat kebudayaan yaitu budaya harus tetap hidup dan berkelanjutan dari zaman yang sedang berlangsung hingga zaman yang akan datang. Dengan adanya hal tersebut maka akan membuat manusia bertahan hidup dan seterusnya ia akan menggunakan akalnya untuk berpikir, karena kebudayaan akan selalu mengalir pada diri manusia dalam kehidupannya, dan kebudayaan akan selalu berkembang

mengikuti perkembangan zaman. Seorang manusia adalah pemegang hak atas hidup dan matinya kebudayaan dan ia juga memiliki tugas, yaitu untuk menciptakan, melestarikan, hingga mengembangkan sebuah budaya dan karya seni dengan menyesuaikan kondisi yang ada pada lingkungan sekitar.

Manusia akan selalu mengalami sebuah kematian dan kelahiran, yang akan membuat manusia selalu silih berganti. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari adanya kebudayaan. Sebuah kesenian merupakan salah satu dari banyaknya bagian-bagian kebudayaan, dimana kesenian jugamemiliki sebuah peran yang penting dalam kehidupan manusia, dan tidak kalah penting dengan bidang yang lainnya. Dalam kehidupan manusia pada umumnya terdapat suatu karya seni yang di sebabkan karena kedua hal tersebut saling melengkapi dan saling membutuhkan.

Artinya seorang manusia membutuhkan sebuah kesenian dalam kehidupan yang dijalannya, sedangkan sebuah kesenian juga membutuhkan manusia yang digunakan untuk menjadi pendukungnya. Menjadi sebuah pendukung pada kesenian, maka besar harapan kepada manusia untuk dapat mengembangkan dan dapat melestarikan sebuah kesenian yang ada yaitu dengan cara melahirkan sebuah karya seni baru yang sesuai dengan kondisilingkungan dan menyesuaikan dengan sebuah perkembangan zaman. Tanpadisadari pada saat mengembangkan sebuah kesenian, hal tersebut selalu berdampingan dengan kehidupan yang ada di masyarakat, seperti adanya sebuah sistem kepercayaan yang berbeda-beda, adanya adat istiadat, dan sebagainya. Disetiap daerah selalu memiliki sebuah kesenian dan berbagai macam kebudayaan yang memiliki perbedaan yang akan menjadi ciri khasnya (Nurwanti, 2019).

Akulturası dapat dideskripsikan sebagai suatu tingkat dimana seorang individu mengadopsi nilai, kepercayaan, budaya dan praktik-praktik tertentu dalam budaya baru (Diaz & Greiner, dalam Nugroho danSuryaningtyas, 2010). Menurut Redfield, Linton dan Herskovits (dalam S.J, 1984) akulturası memahami fenomena yang terjadi ketika kelompok individu yang memiliki budaya yang berbeda datang ke budaya lain kemudian terjadi kontak berkelanjutan dari sentuhan yang pertama dengan perubahan berikutnya dalam pola kultur asli atau salah satu dari kedua kelompok.

Berry (2005) mengatakan bahwa akulturasi adalah sebuah proses yang merangkap dari perubahan budaya dan psikologis yang berlangsung sebagai hasil kontak antara dua atau lebih kelompok budaya dan anggotanya. Pada level kelompok akulturasi melibatkan perubahan dalam struktur sosial dan institusi. Sedangkan pada level individu akulturasi melibatkan perubahan perilaku.

Berry mencatat dua pemahaman penting terkait dengan konsep akulturasi. Pertama adalah konsep akulturasi yang mencoba memahami berbagai fenomena yang dihasilkan oleh kelompok individu yang memiliki budaya berbeda manakala kelompok individu tersebut memasuki budaya baru, sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan pada pola budayanya yang asli. Dengan dasar konsep tersebut, akulturasi dibedakan dari perubahan budaya dan juga juga dibedakan dari asimilasi. Akulturasi dilihat sebagai bagian dari konsep yang lebih luas mengenai masalah perubahan budaya.

Kedua adalah konsep akulturasi yang diawali dengan hubungan antara dua atau lebih sistem budaya. Dalam konteks ini, perubahan akulturatif dipahami sebagai konsekuensi dari perubahan budaya. Hal tersebut mungkin diakibatkan oleh sebab-sebab yang tidak kultural, seperti halnya perubahan ekologis atau demografis. Dengan dasar konsep tersebut, akulturasi mencakup perubahan yang mungkin tidak berhubungan secara langsung dengan masalah budaya, seperti halnya masalah ekologis.

Pada level individu seseorang harus mempertimbangkan perubahan psikologis yang terjadi dan pengaruh adaptasinya pada situasi yang baru. Dalam mengidentifikasi perubahan tersebut dibutuhkan contoh dari suatu populasi dan juga perlu mempelajari individu-individu yang terlibat dalam proses akulturasi. Perubahan-perubahan tersebut dapat menjadi suatu rangkaian perubahan yang dengan mudah dapat diselesaikan (seperti: cara berbicara, cara berpakaian, ataupun cara makan), tetapi dapat juga menjadisuatu pola rangkaian yang problematic sifatnya yang menghasilkan *stress- akulturatif* sebagaimana tampak dalam bentuk ketidakpastian, kecemasan, dan depresi. Proses adaptasi yang terjadi dapat berbentuk adaptasi internal atau psikologis, tetapi dapat juga berbentuk adaptasi sosiokultural

Akulturası budaya menunjuk pada perilaku individu atau kelompok individu yang berinteraksi dengan budaya tertentu, sementara akulturası psikologis menunjuk pada dinamika intrapersonal dalam diri tiap individu yang menghasilkan berbagai reaksi berbeda antara yang satu dengan yang lain, meskipun mereka berada dalam wilayah akulturası yang sama.

## **B. Strategi Akulturası**

Ada empat strategi akulturası yang dipaparkan oleh Berry (2005), yaitu strategi asimilasi, strategi separasi, strategi integrasi, dan strategi marginalisasi. Strategi asimilasi terjadi ketika individu tidak berkeinginan memelihara identitas kulturalnya dan lebih memilih interaksi harian dengan budaya lain. Kebalikannya adalah strategi separasi. Strategi separasi terjadi ketika individu menghidupi nilai-nilai yang ada pada budaya aslinya dan pada waktu yang bersamaan menghindari berinteraksi dengan yang lain. Strategi integrasi terwujud ketika seseorang memiliki ketertarikan untuk memelihara budaya aslinya selama membangun interaksi harian dengan kelompok lain. Menurut Berry, strategi marginalisasi terjadi ketika kemungkinan untuk memelihara budaya aslinya dan kemungkinan untuk berinteraksi dengan kelompok lain sangat kecil.

Semua strategi yang dijabarkan tersebut memiliki beberapa asumsi. Asumsi pertama adalah kelompok yang tidak dominan dan anggota-anggotanya memiliki kebebasan untuk memilih cara berakulturası. Integrasi terjadi jika ada pilihan bebas atau bisa juga terjadi jika kelompok yang dominan memiliki keterbukaan dan orientasi inklusif pada keragaman budaya sedemikian rupa sehingga kelompok yang tidak dominan dapat berperan. Asumsi yang kedua adalah kelompok yang tidak dominan melakukan adopsi nilai-nilai dasar yang ada pada kelompok sosial yang lebih besar, dan pada waktu yang bersamaan kelompok yang dominan melakukan adaptasi atas institusi internalnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua anggota kelompoknya yang sekarang hidup dalam situasi masyarakat yang plural. Dengan kata lain, semua strategi tersebut terjadi jika suatu masyarakat bersifat multikultur dan memiliki prakondisi psikologis yang dipersyaratkan, seperti halnya: tingkat penerimaan yang besar, taraf prasangka yang rendah, berpikiran positif terhadap kelompok etnokultural lain, dan memiliki kedekatan pada kelompok sosial yang lebih besar.

Berry menyatakan bahwa strategi integrasi (dan juga strategi separasi) dapat diwujudkan manakala anggota lain dari kelompok etnokultural yang dimiliki oleh seseorang berkeinginan untuk memelihara warisan budaya kelompoknya. Dalam konteks ini strategi integrasi dan separasi hanya terjadi jika ada kolektivitas, sementara untuk strategi asimilasi lebih bersifat individual.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1974, muncul dimensi ketiga (Dimensi pertama adalah "pemeliharaan warisan dan identitas budaya" dan dimensi kedua adalah "hubungan antarkelompok") yang ditambahkan, yakni *pengharapan akulturasi dan peran penguasa yang diperankan oleh kelompok dominan dalam mempengaruhi cara bagaimana proses saling berakulturasi dapat diwujudkan*. Penambahan dimensi ketiga ini menghasilkan satu sudut pandang yang berhubungan dengan kelompok yang lebih besar.

Dari sudut pandang tersebut, ketika proses asimilasi dilihat dari kelompok non dominan yang berakulturasi, maka proses itu disebut *melting-pot*. Akan tetapi, jika proses akulturasi itu diminta oleh kelompok yang dominan, maka proses itu disebut *pressure-cooker*. Ketika separasi dipaksakan oleh kelompok dominan, proses itu dinamakan *segregasi*, dan ketika marginalisasi dipaksakan oleh kelompok dominan, proses itu disebut *ethnocide*. Akhirnya, manakala keragaman diterima sebagai gambaran dari masyarakat yang lebih besar sebagai sebuah keseluruhan, proses integrasi itu dinamakan *multikulturalisme*.

### **C. Proses Akulturasi**

Menurut Koentjaraningrat, akulturasi budaya merupakan proses interaksi sosial yang di mana budaya asli dengan budaya pendatang melebur menjadi budaya yang baru tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan lamanya. Kesimpulannya, masih ada ciri-ciri kebudayaan asing dan pendatang meskipun kedua kebudayaan tersebut sudah bercampur menjadi kebudayaan yang baru. Peleburan budaya terjadi karena adanya unsur budaya luar atau pendatang yang membawa manfaat bagi kehidupan warganya, sekecil apapun itu. Proses akulturasi ini bisa mencakup berbagai bidang, seperti bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Proses akulturasi terjadi melalui kontak budaya antar individu dari dua kelompok yang berbeda. Namun, kebanyakan prosesnya

biasanya terlihat pada seluruh atau sebagian lapisan masyarakatnya. Jangka waktu terjadinya proses peleburan budaya pun bervariasi, tapi biasanya memakan waktu yang lama karena prosesnya bersifat perlahan. Meskipun begitu, masyarakat bisa langsung menerima kebudayaan pendatang dan melakukan proses akulturasi demi masa depan yang lebih baik.

Setiap manusia memperoleh suatu proses budaya. Proses sosialisasi dan pendidikan budaya yang ditanamkan menjadi perilaku dan kepribadian yang sudah melakat pada sistem saraf di setiap individu. Dengan proses belajar ini manusia harus berinteraksi dan berkomunikasi antar sesama, proses ini didapatkan pada setiap individu yang dinamakan enkulturasi.

Budaya dan individu memiliki hubungan dalam proses enkulturasi sehingga manusia mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Jika ada individu imigran atau pendatang yang masuk pada wilayah pribumi, maka imigran ini belajar menyesuaikan dan menciptakan situasi-situasi yang relevan pada masyarakat pribumi. Pola menyesuaikan individu imigran ke wilayah masyarakat pribumi dengan adanya perubahan menyesuaikan yang baru inilah yang disebut akulturasi. Ciri khas dari budaya setempat tetap dipertahankan dan saling melengkapi dengan unsur kebudayaan asing. Tapi dalam prosesnya, akulturasi bisa terjadi karena pemaksaan dan tentunya juga secara damai. Ini penjelasannya:

### **1. Akulturasi dengan Pemaksaan**

Akulturasi yang dilakukan dengan cara pemaksaan, contohnya seperti yang dilakukan penjajah di Indonesia, proses penyesuaian tidak bertahan lama karena akulturasi itu hilang jika penjajah pun di usir di Indonesia.

### **2. Akulturasi dengan Cara Damai**

Akulturasi yang dilakukan dengan cara damai mampu bertahan lama jika dibandingkan dengan cara pemaksaan. Proses penyesuaiannya sangat lama dan melekat erat dalam masyarakat. Akulturasi sendiri dapat muncul karena adanya kontak kebudayaan dari kebudayaan asing yang lambat laun diterima oleh kebudayaan setempat tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan aslinya.

## **D. Faktor Pendorong dan Penghambat Akulturasi**

### **Faktor pendorong Akulturasi**

a. Pendidikan yang maju

Pendidikan yang maju akan membuka pikiran masyarakat tentang budaya-budaya asing. Dengan mengenal budaya asing, maka bisa memajukan peradaban bangsa agar bisa lebih kuat lagi dalam menghadapi perkembangan zaman.

b. Toleransi terhadap budaya lain

Di dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak bisa dilepaskan dari berbagai macam latar belakang budaya. Oleh sebab itu, untuk menjaga hubungan baik dengan budaya lainnya dibutuhkan toleransi terhadap budaya lain.

c. Sikap dan perilaku saling menghargai budaya.

Sikap dan perilaku menghargai harus dimiliki oleh setiap individu karena dengan hal ini kita dapat berhubungan baik dengan budaya lain. Tanpa adanya sikap dan perilaku ini bisa menyebabkan terjadinya saling mencemooh budaya satu dengan budaya lainnya, sehingga bisa menggagalkan terjadinya akulturasi budaya.

d. Berorientasi ke masa depan

Rasanya berpikir ke masa depan sudah menjadi hal yang memang perlu dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Dengan berpikir ke masa depan, kita akan memiliki sebuah rencana, sehingga masa depan bisa dihadapi dengan penuh kesiapan.

e. Adanya masyarakat heterogen

Masyarakat heterogen bisa dikatakan sebagai faktor pendorong terjadinya akulturasi budaya karena di dalam lingkungan masyarakat terdapat latar belakang budaya yang berbeda-beda. Banyak budaya pada masyarakat heterogen akan memudahkan individu satu dan individu lainnya untuk belajar berbagai macam budaya.

f. Adanya masyarakat yang terbuka terhadap perubahan.

Masyarakat yang terbuka terhadap perubahan dan memiliki kemauan untuk belajar dan beradaptasi dengan budaya baru dapat mendukung terjadinya akulturasi.

g. Perubahan dan fenomena alam

Perang, bencana alam, dan perubahan lingkungan dapat menjadi faktor pendorong adanya akulturasi budaya jika masyarakat mempunyai perasaan yang sama sebagai korban perang atau bencana alam.

### **Faktor penghambat Akulturasi**

a. Sikap masyarakat yang tradisional

Masyarakat yang memegang teguh kebudayaan tradisional akan selalu beranggapan bahwa masuknya budaya asing bisa menghasilkan keistimewaan dari budaya asli itu sendiri, sehingga budaya asing akan sulit diterima. Oleh karena itu, masyarakat yang masih memegang teguh kebudayaan tradisional bisa menjadi faktor penghambat terjadinya akulturasi.

b. Ilmu pengetahuan yang bergerak lambat

Pendidikan yang tidak bergerak atau bahkan bergerak mundur akan membuat ilmu pengetahuan bergerak lambat. Ilmu pengetahuan yang bergerak lambat bisa menjadi penyebab terhambatnya proses akulturasi pada suatu wilayah.

c. Adat atau kebiasaan

Ada sebagian masyarakat yang berasumsi adat atau kebiasaan yang terbentuk sejak kecil dalam waktu lama sulit berubah. Masyarakat yang memiliki pola pikir demikian sulit menerima hal-hal baru yang berhubungan dengan akulturasi.

### **E. Bentuk Akulturasi**

1. Sinkretisme

Sinkretisme merupakan suatu proses terbentuknya suatu sistem yang dikarenakan adanya perpaduan unsur budaya lama dan baru.

2. Substitusi

Substitusi merupakan suatu proses pergantian unsur budaya yang lama digantikan unsur budaya baru dengan memberikan nilai tambah untuk penggunaannya.

### 3. Organisasi

Organisasi adalah proses masuknya suatu budaya baru yang memberikan perubahan secara signifikan dalam ruang lingkup masyarakat di wilayah tertentu.

### 4. *Deculturation*

*Deculturation* atau penggantian merupakan suatu proses penggantian unsur budaya lama yang tergantikan dengan unsur budaya baru.

### 5. *Rejection*

*Rejection* merupakan suatu proses penolakan terhadap budaya yang baru. Penolakan dilakukan karena budaya baru tersebut dianggap memberi dampak negatif pada masyarakat. Hal ini bisa karena kurangnya kesiapan atau tidak setuju dengan adanya budaya tersebut.

### 6. *Addition*

*Addition* atau penambahan merupakan suatu proses yang mengkombinasikan antara dua atau lebih unsur budaya sehingga memberikan nilai tambah terhadap unsur itu sendiri.

## **F. Contoh Alkulturas**

### **Tradisi Ngejot**

Pada dasarnya tradisi ngejot hadir dalam kehidupan masyarakat Bali. adalah pertunjukan Yajna Sesa, khususnya persembahan makanan keikhlasan dan keikhlasan berupa nasi, lauk pauk, sayur mayur, garam dan air, dilakukan setelah pemasakan selesai Tersedia di beberapa lokasi. Selain dikenal sebagai yajna sesa, ngejot disebut juga banten saiban. (Arif, M, 2018:85)

Ngejot merupakan tradisi khas masyarakat Bali diterima sedemikian rupa oleh masyarakat Muslim Pegayaman jadi ini berubah menjadi operasi distribusi makanan, kue, dan buah untuk tetangga, teman, dan kepribadian masyarakat, telah diterima sedemikian rupa oleh masyarakat Islam di Desa Pegayaman sehingga menimbulkan suatu bentuk akulturasi budaya budaya yang istimewa dan menarik

## Menara kudus

Akulturasinya antara Islam (fungsinya sebagai masjid) dengan Hindu (ciri fisik menyerupai bangunan pura pada agama Hindu), Wayang, akulturasinya kebudayaan Jawa (tokoh wayang: Semar, Gareng, Petruk, Bagong) dengan India (ceritanya diambil dari kitab Ramayana dan Mahabharata) Candi Borobudur, akulturasinya antara agama Budha (candi digunakan untuk ibadah umat Budha) dengan masyarakat sekitar daerah Magelang (relief pada dinding candi menggambarkan kehidupan yang terjadi di daerah Magelang dan sekitarnya), Seni kaligrafi, akulturasinya kebudayaan Islam (tulisan Arab) dengan kebudayaan Indonesia (bentuk-bentuknya bervariasi) (Pratiwi, P. H. (2019).

Pengaruh akulturasinya budaya pada masjid :

### a. Bentuk atap masjid

- 1) Bentuk atap masjid ini bukan kubah seperti gaya Ottoman, gaya India, atau gaya Suriah-Mesir. Namun bentuk atapnya bertingkat, semakin mengecil semakin tinggi, dan bagian atasnya biasanya berupa semacam mahkota. Jumlah atap selalu ganjil, biasanya tiga atau lima undak.
- 2) Tidak adanya Menara. Absennya menara pada arsitektur masjid di Jawa terkait dengan penggunaan kendang sebagai penanda waktu salat. Di antara masjid-masjid kuno di Jawa, hanya masjid Kudus dan Banten yang mempunyai menara, dan menara kedua masjid tersebut memiliki bentuk yang berbeda. Menara Masjid Kudus berbentuk candi Jawa Timur (Majapahit) yang telah dimodifikasi, disesuaikan penggunaannya, dan atapnya tumpang tindih. Menara Masjid Banten merupakan tambahan dari masa selanjutnya, menara ini dibangun oleh Cordell, seorang pengungsi Belanda yang masuk Islam. Bentuk menara Masjid Banten menyerupai mercusuar.
- 3) Lokasi masjid. Masjid selalu terletak di dekat istana raja (atau adipati/bupati). Di belakang masjid sering terdapat makam. Sedangkan di depan keraton masih terdapat alun-alun besar

(alun-alun) dengan dua pohon beringin ganda. Lokasi masjid tetap berada di Tepi Barat Istana. Rangkaian makam dan masjid ini pada hakikatnya merupakan kelanjutan fungsional dari candi-candi pada masa kerajaan Hindu-Nusantara. (Sunanto. M, 2010 : 95-96)

### G. Alkulturasasi Budaya Dalam Berbagai Bidang

| Bidang Kehidupan | Masa Pra Aksara                                              | Masa Hindu-Budha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Masa Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Politik          | Dalam kehidupan berkelompok seringkali ada seorang pemimpin. | Sistem pemerintahan kerajaan dianut oleh masyarakat nusantara. Dalam sistem ini, wilayah yang luas dimiliki oleh sekelompok kecil orang yang bersatu. Kendali kekuasaan kerajaan berada di tangan pemimpin suku terbaik dan terkuat di antara para pemimpin suku lainnya. Selanjutnya kepemimpinan ditentukan secara turun temurun berdasarkan warisan menurut ketentuan hukum kasta. | Dalam sistem pemerintahan Islam, raja bergelar sultan dan biasanya didampingi oleh seorang ulama/ wali yang bertugas sebagai penasihat agama atau disebut dengan mufti kerajaan. Raja bukanlah perwujudan Tuhan melainkan hanya manusia biasa yang mempunyai tugas lebih besar untuk mengabdikan kepada rakyat. Jika raja meninggal, ia tidak diperbolehkan makan daging di candi seperti umat Hindu-Budha namun dimakamkan menurut hukum Islam. |

| Bidang Kehidupan | Masa Pra Aksara                                                                        | Masa Hindu-Budha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Masa Islam                                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sosial           | Hidup berkelompok dimana sosialisasi hanya berlangsung di dalam kelompok masing-masing | Diantara aturan yang dikenal masyarakat Indonesia adalah aturan kelas, misalnya: Kasta Brahmana (biarawan dan cendekiawan), Kasta Kshatriya (prajurit, pejabat, dan bangsawan), Kasta Waisya (petani, saudagar, dan tuan tanah). Kasta Sudra (pekerja terampil dan rakyat jelata). Di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, unsur budaya Indonesia kuno tampaknya masih mendominasi. | Aturan kasta mulai memudar di masyarakat, dan kalender berdasarkan tahun Islam digunakan di beberapa kerajaan. |

| <b>Bidang Kehidupan</b> | <b>Masa Pra Aksara</b>                                                                                                  | <b>Masa Hindu-Budha</b>                                                                                                                                                                                | <b>Masa Islam</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendidikan              | Belum terbiasa dengan sistem pendidikan dan semua ilmu yang didapat masih bersumber dari pengalaman hidup di alam bebas | Bukti pengaruh agama Hindu dan Budha di Indonesia adalah dengan adanya fasilitas pendidikan seperti asrama. Hanya satu bidang yang dipelajari di lembaga pendidikan tersebut, yaitu agama.             | Pendidikan Islam semakin berkembang di pesantren. Padahal, sistem pesantren sudah berkembang sebelum Islam masuk ke Indonesia. Bagi umat Hindu, pesantren pada masa itu merupakan tempat pendidikan dan pengajaran agama. Setelah Islam masuk ke Indonesia, mata pelajaran dan tata cara pengajaran di pesantren berubah                    |
| Sastra dan Bahasa       | Belum ada karya sastra yang dihasilkan                                                                                  | Penggunaan huruf Sansekerta dan Pallawa menunjukkan pengaruh Hindu-Buddha terhadap bahasa Indonesia. Beberapa karya sastra yang dihasilkan adalah buku karya Mpu Tantular, Mpu Prapanca dan lain-lain. | Penggunaan huruf dan bahasa Arab di Indonesia juga sangat berpengaruh. Hal ini terbukti dengan munculnya karya-karya seperti Hikayat, (Hikayat Amir Hamzah), Babad, (Babad Cirebon, Tanah Jawi/Babad Jawa Kuno), Suluk, (Suluk Wijil, Suluk Malang Sumirang, Suluk Sukarsa), Puisi dan Gurindam, (Syair Abdul Muluk dan Gurindam Dua Belas) |

| Bidang Kehidupan        | Masa Pra Aksara                                                                                                         | Masa Hindu-Budha                                                                                                                                                                                                                            | Masa Islam                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arsitektur dan Kesenian | Komunitas pra-melek huruf membangun bangunan dari batu antara lain: Tangga menhir, dolmen, peti mati, punden dan waruga | Teras Punden merupakan salah satu bangunan pada masa megalitikum. Keterkaitannya dengan kebudayaan India menjadikan arsitektur ini sebagai landasan inspiratif dalam penciptaan bangunan candi yang disertai dengan arca utama berupa arca. | Perpaduan Islam dan budaya lokal diekspresikan dalam bentuk arsitektur masjid yang juga dipengaruhi oleh arsitek budaya lokal. |

## **BAB VIII**

# **PENGARUSUTAMAAN PENDIDIKAN ANAK**

### **A. Pengertian Pengarusutamaan Pendidikan Anak**

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar setiap anak yang diakui secara universal. Pendidikan yang berkualitas adalah fondasi bagi perkembangan anak-anak, memungkinkan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka, serta memberikan dasar bagi kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat dan negara. Pengarusutamaan Pendidikan Anak adalah pendekatan yang memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak adil.

Pengarusutamaan Pendidikan Anak adalah sebuah konsep yang berakar dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak sebagaimana diakui oleh Konvensi Hak Anak PBB (CRC). Konsep ini menekankan bahwa pendidikan harus mencakup semua anak, termasuk mereka yang mungkin menghadapi tantangan ekonomi, fisik, psikologis, atau sosial. Pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas adalah jaminan untuk memenuhi hak-hak anak dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks global, Pengarusutamaan Pendidikan Anak memiliki landasan hukum yang kuat melalui Konvensi Hak Anak PBB (CRC), yang menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai dan berkualitas. Negara-negara, termasuk Indonesia, yang telah menjadi pihak dalam CRC, memiliki tanggung jawab untuk melindungi,

menghormati, dan memenuhi hak ini. Pengarusutamaan Pendidikan Anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat, sekolah, dan seluruh aktor yang terlibat dalam pendidikan anak-anak.

Pengarusutamaan Pendidikan Anak menjadi semakin penting di tengah tantangan dan perubahan yang dihadapi dunia saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan berbagai perubahan sosial, pendidikan anak-anak menjadi kunci untuk mempersiapkan mereka menghadapi masa depan yang semakin kompleks. Namun, terdapat berbagai faktor yang menghambat pengaksesan dan pemanfaatan pendidikan berkualitas oleh semua anak di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi anak-anak yang besar, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pengarusutamaan pendidikan anak. Kendala seperti ketidaksetaraan akses, kualitas pendidikan yang bervariasi, ketidaksetaraan gender, serta tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian anak-anak, menjadi fokus utama dalam upaya pengarusutamaan pendidikan.

Sejumlah kebijakan dan program telah diterapkan di Indonesia untuk mendukung Pengarusutamaan Pendidikan Anak. Namun, perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi serta evaluasi terus-menerus terhadap implementasi kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa hak pendidikan setiap anak di Indonesia dapat terwujud sepenuhnya.

Perlindungan terhadap anak menjadi salah satu fokus pemerintah. Keseriusan pemerintah dalam hal ini terlihat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perlindungan terhadap anak menjadi salah satu prioritas nasional. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) ke dalam Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Selain itu, terdapat undang-undang perlindungan anak yaitu UU No. 23 tahun 2002 yang telah direvisi menjadi UU No. 35 tahun 2014. Konvensi hak anak menyebutkan bahwasannya anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat. Kehadiran negara dalam hal-hal terkait tumbuh kembang anak sangat penting, tidak terkecuali masalah yang berhubungan dengan hak anak.

Peran negara untuk mewujudkan hak-hak anak ini sangat dibutuhkan terlebih anak merupakan seseorang yang harus dilindungi dan diarahkan. Tidak banyak orang yang memahami pola pikir dan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak. Apabila anak hidup di lingkungan yang dirasa kurang tepat maka kemungkinan besar anak tersebut tidak dapat mengembangkan potensi dirinya dengan baik dan cenderung beralih pada hal negatif (Rohmana FS, 2019).

Pengarusutaman Pendidikan Anak adalah suatu pendekatan dan upaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak-anak diakui, dihormati, dan dilindungi dalam semua kebijakan, program, dan tindakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Ruang lingkup pengarusutamaan anak mencakup berbagai aspek kehidupan anak, termasuk hak-hak dasar mereka, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari diskriminasi, dan partisipasi dalam keputusan yang memengaruhi mereka.

Pengarusutamaan anak adalah konsep dan prinsip yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan anak-anak diutamakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kebijakan, program, dan praktik-praktik yang berpengaruh pada mereka. Pengarusutamaan anak melibatkan upaya untuk melindungi, mempromosikan, dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Convention on the Rights of the Child* - CRC) dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang relevan.

## **B. Faktor- faktor Pengarusutaman Pendidikan Anak**

Pengarusutamaan Anak di Indonesia didasarkan pada sejumlah faktor dan latar belakang yang meliputi konvensi internasional, peraturan nasional, kebijakan pemerintah, dan tantangan spesifik yang dihadapi anak-anak di Indonesia. Di bawah ini adalah beberapa latar belakang utama Pengarusutamaan Anak di Indonesia.

### **1.. Undang-Undang Perlindungan Anak:**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia adalah landasan hukum yang penting untuk melindungi dan mengarusutamaan hak-hak anak. Undang-undang ini mencantumkan prinsip-prinsip Pengarusutamaan Anak dan mengamanatkan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak

## 2. Konvensi Hak Anak PBB (CRC)

Indonesia adalah negara yang telah meratifikasi CRC, yang memberikan kerangka kerja internasional untuk melindungi dan mengurusutamaan hak-hak anak. CRC mempengaruhi kebijakan dan praktik anak di Indonesia.

CRC adalah perjanjian internasional yang secara khusus menetapkan hak-hak anak-anak dan mendorong negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak.

## 3. Isu Perlindungan Anak:

Isu-isu seperti perkawinan anak, pekerjaan anak, kekerasan terhadap anak, dan diskriminasi terhadap anak-anak dengan disabilitas menjadi perhatian yang penting dalam upaya Pengarusutamaan Anak di Indonesia. Organisasi seperti UNICEF dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melakukan penelitian dan kampanye terkait isu-isu ini.

## 4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak telah menjadi fokus penting dalam upaya Pengarusutamaan Anak. Sekolah-sekolah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pemerintah telah berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak anak di kalangan masyarakat.

Kesadaran masyarakat Indonesia tentang hak-hak anak dan perlindungan anak telah meningkat, sebagian besar karena kampanye edukasi dan advokasi oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga pemerintah.

## 5. Komitmen Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan Pengarusutamaan Anak dengan mengadopsi berbagai kebijakan, program, dan rencana aksi yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

## 6. Rencana Aksi Nasional untuk Pengarusutamaan Anak (RAN-PPA):

RAN-PPA adalah rencana aksi nasional yang bertujuan untuk melaksanakan Pengarusutamaan Anak di Indonesia.

7. Pemberitaan Kasus Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak  
Laporan-laporan tentang kasus kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak anak yang terus muncul telah mendorong kesadaran dan upaya lebih lanjut dalam melindungi anak-anak di Indonesia.
8. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi  
Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi merupakan masalah serius di Indonesia, yang juga merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi upaya Pengarusutamaan Anak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengarusutamaan pendidikan anak dapat sangat beragam dan melibatkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi pengarusutamaan pendidikan anak, antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Tingkat ekonomi keluarga dapat memengaruhi akses anak-anak terhadap pendidikan berkualitas. Keluarga yang kurang mampu mungkin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, yang jelas berbeda dengan keluarga yang mampu.

Biaya Pendidikan dan peluang mendapatkan kesempatan belajar yang kurang dikarenakan ada sebagian yang harus membantu orang tuanya bekerja.

2. Kualitas Sekolah

Kualitas serta mutu sekolah, termasuk fasilitas, tenaga pengajar, dan kurikulum, lingkungan belajar dapat memengaruhi pengalaman pendidikan anak-anak.

Meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan sekolah, terutama di sekolah-sekolah di daerah yang kurang berkembang, dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan dan memberikan setiap anak peluang yang sama untuk sukses dalam pendidikan mereka

3. Akses ke Pendidikan

Jarak fisik antara tempat tinggal dan sekolah, serta aksesibilitas infrastruktur pendidikan, dapat memengaruhi apakah anak-

anak dapat menghadiri sekolah dengan teratur, atau mengalami permasalahan dan kendala dalam transportasi menuju ke sekolah. Akses fisik mengacu pada kemampuan anak-anak untuk secara fisik menghadiri sekolah. Faktor-faktor seperti jarak sekolah dari rumah, kondisi infrastruktur transportasi, dan keamanan perjalanan dapat mempengaruhi apakah anak-anak dapat mengakses sekolah dengan mudah. Anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau terkena konflik bersenjata mungkin menghadapi hambatan fisik dalam mengakses pendidikan.

#### 4. Budaya dan Tradisi

Nilai-nilai budaya dan tradisi dalam masyarakat dapat mempengaruhi pandangan terhadap pendidikan anak-anak, termasuk isu-isu seperti pernikahan usia muda atau peran gender dalam pendidikan.

Kebiasaan, norma-norma, dan nilai-nilai budaya sering kali membentuk pandangan orang tua dan komunitas tentang pendidikan anak-anak.

#### 5. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah juga berperan penting dalam pengarusutamaan pendidikan anak.

Kebijakan pendidikan mencakup peraturan, undang-undang, norma-norma, dan pedoman yang mengatur sistem pendidikan suatu negara atau wilayah. seperti biaya Pendidikan, inklusi, kurikulum, alokasi anggaran, dll.

Kebijakan yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan, serta memberikan setiap anak peluang yang sama untuk sukses dalam pendidikan mereka

#### 6. Dukungan Keluarga

Dukungan orang tua dan keluarga sangat berpengaruh dalam perkembangan anak-anak, termasuk dukungan mereka terhadap pendidikan anak-anak.

Dukungan ini mencakup keterlibatan orang tua dan keluarga dalam pendidikan anak, dukungan emosional, dan sumber daya

yang mereka sediakan untuk mendukung perkembangan dan pembelajaran anak-anak

#### 7. Kesehatan dan Gizi

Kesehatan fisik dan status gizi anak dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dengan baik.

Kesehatan fisik dan gizi yang memadai memiliki dampak langsung pada kemampuan anak-anak untuk hadir di sekolah dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Hal ini melibatkan upaya untuk menyediakan akses yang lebih baik ke perawatan kesehatan, program gizi, dan edukasi tentang kesehatan dan gizi bagi keluarga dan komunitas. Dengan demikian, anak-anak dapat memiliki kondisi fisik dan mental yang optimal untuk sukses

#### 8. Diskriminasi dan Ketidaksetaraan

Faktor-faktor seperti diskriminasi gender atau etnis dapat menghambat akses pendidikan yang setara bagi semua anak-anak.

Ketika anak-anak menghadapi diskriminasi atau perlakuan tidak adil berdasarkan berbagai karakteristik seperti jenis kelamin, ras, etnisitas, agama, atau latar belakang sosioekonomi, pengalaman pendidikan mereka dapat terganggu.

Semua anak harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, tanpa memandang latar belakang atau karakteristik mereka.

#### 9. Konflik dan Krisis

Situasi konflik, krisis kemanusiaan, atau bencana alam dapat mengganggu akses pendidikan anak-anak.

Konflik bersenjata, bencana alam, dan situasi krisis lainnya dapat mengganggu proses pendidikan dan menciptakan hambatan serius bagi anak-anak dalam mencapai akses pendidikan yang setara dan berkualitas. Maka diperlukan upaya bersama dari pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat lokal. Ini termasuk penyediaan akses pendidikan yang aman, dukungan psikososial bagi anak-anak yang terpengaruh, dan perencanaan darurat untuk melanjutkan pendidikan dalam situasi krisis.

## 10. Teknologi dan Akses Internet

Ketersediaan teknologi dan akses internet juga dapat memengaruhi cara anak-anak mengakses informasi dan pendidikan.

Memiliki pengaruh ganda, bisa berdampak positif dan negatif, tergantung pada sejauh mana teknologi ini tersedia dan digunakan dengan bijaksana. Maka diperlukan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan akses, menyediakan pelatihan yang diperlukan, memastikan konten berkualitas, dan mengintegrasikan teknologi dengan bijak dalam proses pembelajaran.

### C. Program Pengarusutamaan Pendidikan Anak

Di Indonesia, terdapat berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk melaksanakan Pengarusutamaan Anak. Berikut adalah beberapa contoh program Pengarusutamaan Anak antara lain:

#### 1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin. Program ini juga memberikan perhatian khusus pada anak-anak untuk memastikan mereka mendapatkan akses pendidikan dan perawatan kesehatan yang baik.

#### 2. Pemberdayaan Anak dan Perlindungan Anak (P2A)

Program P2A bertujuan untuk melibatkan anak-anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dan memberikan perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi anak.

Referensi: Direktorat Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### 3. Gerakan Nasional Literasi Sekolah (GNLS)

GNLS adalah upaya untuk meningkatkan literasi anak-anak di Indonesia. Program ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses anak-anak terhadap buku dan literasi di sekolah dan masyarakat.

#### 4. Program Imunisasi

Pemerintah Indonesia memiliki program imunisasi nasional yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari penyakit-penyakit berbahaya. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan kesehatan anak-anak..

#### 5. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan pendidikan inklusif yang memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dengan disabilitas.

#### 6. Kampanye Anti-Kekerasan Terhadap Anak

Berbagai kampanye dan program sosialisasi telah diluncurkan di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi. Salah satu contoh adalah kampanye “Ayo Indonesia Tanpa Kekerasan” dari Kementerian

#### 7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Program-program tersebut adalah contoh upaya konkret yang dilakukan di Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Anak dan memastikan hak-hak anak-anak dihormati dan dijamin.

### **D. Upaya Sekolah dalam Pengarusutamaan Anak**

Sekolah memiliki peran penting dalam melaksanakan Pengarusutamaan Anak dengan memastikan bahwa hak-hak anak diakui, dihormati, dan dilindungi dan dipenuhi dalam konteks pendidikan.

Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan.

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Anak:

##### 1. Mengintegrasikan Pendidikan Tentang Hak Anak

Sekolah dapat mengintegrasikan pendidikan tentang hak anak ke dalam kurikulum mereka. Hal ini melibatkan pembelajaran tentang Konvensi Hak Anak PBB (CRC) dan hak-hak anak dalam mata pelajaran yang relevan.

##### 2. Promosi Non-Diskriminasi

Sekolah harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pendidikan berdasarkan jenis kelamin, etnisitas, agama, atau

disabilitas. Mereka harus menciptakan lingkungan yang inklusif untuk semua siswa.

3. Kegiatan Ekstrakurikuler

Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, seperti seni, olahraga, dan klub-klub yang membantu anak-anak mengembangkan bakat mereka dan memiliki pengalaman positif di luar kelas

4. Pendidikan Inklusif

Sekolah harus memberikan pendidikan inklusif yang mengakomodasi berbagai kebutuhan anak, termasuk anak-anak dengan disabilitas. Ini memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar.

5. Pendidikan Seksual dan Hak Reproduksi

Sekolah dapat menyelenggarakan program pendidikan seksual yang menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang tubuh, hubungan, serta hak reproduksi. Ini membantu anak-anak memahami dan menjaga kesehatan mereka.

6. Partisipasi Anak

Sekolah dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka di sekolah. Ini dapat melibatkan pembentukan komite siswa atau forum diskusi. Setiap anak diberikan kesempatan yang sama untuk mengeluarkan pendapat, menyampaikan ide/gagasan tanpa deskriminasi. seperti dalam pembentukan aturan sekolah atau proyek-proyek tertentu

7. Penghapusan Kekerasan di Sekolah (Anti-Pelecehan dan Anti-Penganiayaan)

Sekolah harus secara tegas melarang kekerasan fisik, verbal, atau psikologis terhadap siswa, baik yang dilakukan oleh guru ataupun antar siswa. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana anak-anak dilindungi dari pelecehan, intimidasi, dan penganiayaan. Ada aturan dan SOP yang mengatur apabila terjadi adanya kekerasan dalam bentuk *bullying* ataupun sejenisnya. Mereka juga harus memiliki prosedur untuk melaporkan dan menangani kasus kekerasan.

8. Sarana dan Prasarana yang Aman

Sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi siswa, termasuk gedung yang aman, sanitasi yang baik, dan aksesibilitas untuk siswa dengan disabilitas.

9. Peningkatan Kesadaran Guru dan Staf

Sekolah dapat menyelenggarakan pelatihan untuk guru dan staf mengenai hak anak dan prinsip-prinsip Pengarusutamaan Anak. Guru harus menerima pelatihan yang sesuai untuk memahami dan menerapkan prinsip Pengarusutamaan Anak dalam praktik pengajaran mereka.

Warga sekolah memiliki pemahaman dan pola pikir yang sama dalam memberikan pelayanan Pendidikan kepada anak di sekolah.

10. Kurikulum yang Dikembangkan dengan Prinsip Pengarusutamaan Anak

Sekolah dapat mengembangkan kurikulum yang mencerminkan prinsip-prinsip Pengarusutamaan Anak, dengan menekankan pada hak-hak anak dan nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminasi. UNICEF, “Child-Friendly Schools Manual.”

11. Pendidikan tentang Hak Asasi Manusia

Sekolah dapat mengintegrasikan pendidikan tentang hak asasi manusia ke dalam kurikulum mereka, sehingga anak-anak memahami hak-hak mereka dan menjadi advokat yang lebih baik untuk diri mereka sendiri.

Referensi: UNESCO, “*Human Rights Education*.”

12. Konseling dan Dukungan Emosional

Sekolah dapat menyediakan layanan konseling dan dukungan emosional untuk anak-anak yang mengalami kesulitan emosional atau masalah lainnya, sehingga mereka dapat berkembang secara holistik

13. Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat

Sekolah dapat melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan, mendengarkan pandangan mereka, dan bekerja sama dalam mendukung perkembangan anak.

Keluarga dan sekolah memiliki peran penting dalam proses tumbuh kembang anak-anak. Terutama tentang masalah pendidikan yang begitu menentukan masa depan anak. Tanpa disadari kadang-kadang orang tua atau orang yang lebih tua seringkali mengatur secara berlebihan hal-hal yang berkaitan dengan anak sampai anak tersebut tidak memiliki ruang untuk menentukan pilihannya sendiri termasuk masalah pendidikan. Ketika anak seolah memberontak karena ingin menentukan pilihannya sendiri kekerasan kerap kali muncul baik dari orang tua sendiri atau lingkungan anak yang seolah tidak menerimanya

## **BAB IX**

# **PENGARUSUTAMAAN PENDIDIKAN GENDER**

### **A. Pengertian Pengarusutamaan Gender**

Pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan masyarakat dan kemajuan suatu negara. Melalui pendidikan, individu memiliki akses ke pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai potensi mereka. Namun, dalam sebagian besar masyarakat di seluruh dunia, perempuan dan laki-laki sering menghadapi kesenjangan gender yang signifikan dalam akses dan hasil pendidikan. Kesetaraan gender dalam pendidikan telah menjadi isu yang semakin mendapatkan perhatian global.

Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari akses terhadap pendidikan hingga perwakilan dan pengalaman di dalam kelas. Perempuan dan laki-laki sering kali menghadapi tantangan yang berbeda dalam pendidikan, yang dapat menghambat potensi mereka untuk meraih kesuksesan. Stereotip gender yang masih melekat kuat dalam masyarakat, bias gender dalam kurikulum, dan perbedaan perlakuan antara siswa perempuan dan laki-laki di sekolah adalah beberapa contoh masalah yang perlu diatasi.

Pengarusutamaan Gender diwajibkan oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, yang menegaskan bahwa semua lembaga pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, harus memprioritaskan dimensi gender dalam seluruh tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program mereka. Hal tersebut mencerminkan

komitmen pemerintah dalam mencapai kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif dalam seluruh kebijakan dan program pemerintah. Dengan demikian, Pengarusutamaan Gender menjadi landasan penting dalam upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender di berbagai sektor dan memastikan bahwa hak dan kebutuhan laki-laki dan perempuan diakui dan dihormati.

Warni Tune Sumar (2015: 166), istilah “gender” telah menjadi perbincangan umum di berbagai diskusi dan tulisan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan. Gender adalah konsep yang dibentuk oleh masyarakat dan sering kali dapat dipertukarkan karena sifat-sifatnya yang seharusnya berbeda dari konstruk gender tradisional. Ini berbeda dari “seks,” yang merujuk pada perbedaan biologis yang tidak dapat diubah antara jenis kelamin. Misalnya, konstruk sosial telah mengaitkan perempuan dengan sifat lemah dan lembut, sementara laki-laki dianggap kuat dan rasional. Penting untuk memahami perbedaan antara gender dan seks guna mengatasi stereotip dan ekspektasi yang tidak sesuai dengan realitas individu dan mencapai kesetaraan gender yang lebih besar.

Rustan Efendy (2014) menyoroti isu gender dalam konteks agama Islam, di mana terdapat penekanan pada kesetaraan laki-laki dan perempuan. Menurutnya, nilai-nilai seputar gender dalam Al-Qur’an dan hadis merupakan subjek menarik untuk dipelajari. Dalam Islam, tidak ada perbedaan diskriminatif antara laki-laki dan perempuan, dan hak serta kewajiban keduanya dianggap setara. Agama Islam juga menentang perbudakan dan mendorong kesetaraan hak tanpa adanya penindasan satu sama lain. Al-Qur’an dan hadis juga banyak mengandung konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan, dengan menekankan bahwa di hadapan Allah, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba-Nya tanpa dominasi yang satu terhadap yang lain. Selain itu, Al-Qur’an juga menghadirkan pandangan optimis terhadap kedudukan perempuan. Dalam konteks agama Islam, kesetaraan gender dan penghargaan terhadap perempuan memiliki landasan kuat.

Pendidikan diakui sebagai hak asasi setiap individu, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.” Hak ini berlaku untuk semua warga negara, dan pendidikan tidak boleh dibatasi. Dalam sistem

pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama. Tidak ada tempat bagi diskriminasi, termasuk dalam hal gender, di dalam dunia pendidikan. Ruang-ruang pendidikan seharusnya bersifat inklusif dan tidak boleh didominasi oleh jenis kelamin tertentu. Ini seharusnya menjadi dasar hukum yang memungkinkan perempuan untuk terlibat sepenuhnya dalam bidang pendidikan. Namun, kenyataannya, masih terdapat bias gender yang muncul dalam berbagai aspek pendidikan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk mencapai kesetaraan gender dalam sistem pendidikan.

Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender adalah langkah penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang tidak didominasi oleh salah satu pihak atau jenis kelamin tertentu; ini bukanlah sistem patriarki maupun matriarki. Pendidikan, sebagai sarana untuk meningkatkan sumber daya manusia, harus terus mendorong pendidikan yang menghargai martabat manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, upaya ini menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 84 tahun 2008, yang mengatur Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, diharapkan menjadi solusi utama untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Meskipun ada regulasi yang mengarah pada kesetaraan gender, kenyataannya diskriminasi gender masih sering terjadi di dalam sistem pendidikan. Contoh nyata adalah adanya pandangan bahwa perempuan dianggap kurang mampu dalam posisi manajerial di sekolah, yang mengakibatkan terbatasnya partisipasi perempuan dalam jabatan strategis. Inilah mengapa pentingnya implementasi pedoman ini untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil dan inklusif, di mana semua individu memiliki peluang yang setara untuk berkembang.

Praktik pendidikan yang ideal, dimana kesempatan dalam menduduki posisi pimpinan dinilai berdasarkan kemampuan individu, bukan jenis kelaminnya, membuktikan komitmen pada kesetaraan gender. Kebijakan di lingkungan sekolah juga harus mempertimbangkan perempuan dan laki-laki, sehingga keterlibatan dalam program-program pendidikan

mencerminkan aspirasi bersama, baik dari pria maupun wanita. Dalam proses pembelajaran, semua siswa, tanpa memandang jenis kelamin, harus memiliki akses yang sama, sehingga hak dan kewajiban yang diberikan kepada siswa laki-laki dan perempuan adalah setara.

Menurut McDonald dalam Amin Abdullah (2004: 39), suatu organisasi atau institusi tidaklah netral gender, karena mereka merupakan gambaran dari lingkungan sosial budayanya ketika mereka dibangun. Dalam kepengurusan sebuah organisasi atau institusi sesungguhnya dalam aturan formal tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam aplikasinya masih ada beberapa kebijakan yang belum ramah gender. Perempuan masih distereotipkan tidak memiliki kemampuan dalam memimpin seperti laki-laki. Perempuan ditempatkan di jabatan-jabatan yang tidak membutuhkan tenaga dan tanggung jawab yang besar.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi mendasar yang dirancang untuk menyatukan gender sebagai komponen integral dalam seluruh tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan, dengan tujuan utama mencapai kesetaraan dan keadilan gender (PP.RI, 2000). Dalam kerangka ini, PUG bertujuan untuk mengarahkan proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan nasional agar memiliki perspektif gender yang kuat. Ini dilakukan dengan harapan menciptakan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks keberkeluargaan, kehidupan sosial masyarakat, kebangsaan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara (dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000).

Definisi pengarusutamaan gender dapat beragam, dan seringkali terdapat perdebatan tentang perbedaannya. Namun, tujuan pengarusutamaan gender cenderung kurang menjadi sumber perselisihan. Pengarusutamaan gender bertujuan untuk memicu proses perubahan dan praktik yang mengedepankan persamaan antara perempuan dan laki-laki (Woodford-Berger, 2004:66).

Kajian ini mendefinisikan pengarusutamaan gender sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memajukan kesetaraan gender dengan cara merevisi semua ranah kebijakan utama sehingga masalah jenis kelamin dan gender dalam semua aspek pemerintahan atau organisasi

akan diperhatikan secara eksplisit. Ini berarti bahwa pengarusutamaan gender mengacu kepada perspektif gender yang harus digunakan secara konsisten dalam semua tahap pengembangan dan implementasi kebijakan, rencana, program, dan proyek. Dalam konteks pendidikan, hal ini tidak hanya melibatkan kegiatan pemerintah dan departemen pendidikan, tetapi juga melibatkan partisipasi orang-orang dari berbagai latar belakang, termasuk sekolah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, LSM, dan sektor swasta jika diperlukan (Leo-Rhynie, 1999: 9).

Oleh karena itu, PUG dimaksudkan sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan utama dengan mengidentifikasi dan mencerminkan karakteristik gender dalam asumsi, proses, dan hasil yang terlihat (Walby, 2005: 454). Dengan kata lain, PUG berupaya untuk menjadikan kesetaraan gender sebagai prinsip yang terefleksikan dalam semua aspek kebijakan dan praktik, memastikan bahwa peran dan kebutuhan laki-laki dan perempuan diperlakukan secara adil dan setara.

## **B. Konsep Gender**

Syarifuddin Jurdi (2013:271) berpendapat, istilah gender diterjemahkan dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai jenis kelamin. Ratna megawangi berargumen bahwa gender adalah sifat maskulin dan feminin yang dikonstruksi oleh sosial budaya melalui proses sosialisasi. Mansour Fakih (2016: 8) mengemukakan, gender diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, gender diartikan sebagai sebuah konstruksi sosial yang berakar pada perbedaan jenis kelamin. Konstruksi ini mencerminkan pandangan masyarakat atau budaya mengenai tugas, hak, fungsi, peran, tanggung jawab, sikap, dan perilaku yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bersama dan dalam aspek-aspek kehidupan pribadi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari perubahan nilai dan tingkah laku yang digambarkan secara sosial dalam masyarakat setempat. Gender sebagai suatu konsep dibentuk oleh manusia yang dapat berubah dan tidak berlaku secara umum serta dapat dipertukarkan. Sebagai contoh seorang anak laki-laki yang harus kuat, tangguh, rasional, dan perkasa. Sedangkan seorang perempuan harus lemah lembut, cantik, keibuan, dan emosional.

Kedua sifat yang dianggap baik pada laki-laki dan perempuan merupakan konstruksi sosial yang dapat berubah dan saling dipertukarkan. Ini berarti bahwa ada anak perempuan yang mungkin memiliki sifat kuat, tangguh, rasional, dan perkasa, sementara ada anak laki-laki yang mungkin memiliki sifat lemah lembut dan bersifat keibuan. Hal ini terjadi karena tingkah laku seperti ini pada dasarnya dapat berubah dan disesuaikan dengan budaya atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Perbedaan gender pada dasarnya tidak akan menjadi masalah jika tidak mengakibatkan ketidakadilan gender. Namun, pada kenyataannya, perbedaan gender seringkali menghasilkan ketidakadilan gender, terutama terhadap perempuan. Ketidakadilan gender berdampak negatif pada laki-laki dan perempuan yang menjadi korban sistem dan struktur yang berlaku dalam masyarakat. Ketidakadilan gender terwujud dalam kehidupan sehari-hari, seperti:

### **1. Violence (kekerasan)**

Kekerasan mencakup berbagai bentuk serangan, baik yang bersifat fisik, seksual, maupun non-seksual. Bentuk kekerasan sangat beragam dan dapat terjadi dalam situasi dan lokasi yang berbeda. Lebih sering daripada tidak, perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, tidak dapat diabaikan bahwa kekerasan juga dapat terjadi di lingkungan pendidikan, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan.

Hingga Agustus 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 2.355 pelanggaran terhadap perlindungan anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 kasus melibatkan anak sebagai korban *bullying* atau perundungan, 27 kasus terkait anak yang menjadi korban pemenuhan fasilitas pendidikan, 24 kasus terkait anak yang menjadi

korban kebijakan pendidikan, 236 kasus melibatkan anak sebagai korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan 487 kasus terkait anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, masih banyak kasus lain yang tidak dilaporkan kepada KPAI.

## **2. Stereotype (Pelabelan)**

Mansour Fakih (2016:17) menyatakan bahwa stereotip merupakan pandangan yang melekat dan diberikan oleh masyarakat terhadap peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Salah satu label yang sering melekat pada perempuan adalah persepsi negatif, yang menganggap perempuan sebagai individu yang emosional, tidak rasional, dan lemah di antara lain. Stereotip ini secara tidak langsung melemahkan posisi perempuan dan menjadikan sulit bagi mereka untuk mencapai tingkat kesetaraan dengan laki-laki.

Di lembaga pendidikan, tugas, peran, dan tanggung jawab seringkali diberikan kepada perempuan berdasarkan stereotip yang melekat pada mereka. Sebagai contoh, perempuan sering diberi peran sebagai administrator karena dianggap memiliki sifat emosional dan tidak rasional. Anggapan ini juga muncul saat terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin perempuan.

## **3. Marjinalisasi (Peminggiran)**

Dede William (2016: 19) menjelaskan bahwa peminggiran perempuan dalam masyarakat dapat berasal dari keyakinan, tradisi, dan kebijakan. Peminggiran ini tidak hanya mempengaruhi posisi dan status perempuan, tetapi juga membatasi akses dan kendali yang dimiliki oleh perempuan.

Dalam konteks kebijakan pendidikan, seringkali laki-laki dianggap memiliki kemampuan lebih, sehingga tugas dan tanggung jawab lebih sering diberikan kepada mereka dibandingkan perempuan. Marjinalisasi seperti ini jelas merugikan perempuan karena hal ini membatasi peluang mereka untuk mengembangkan karir kerja.

## **4. Subordinasi (Penomorduaan)**

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan menjelaskan bahwa subordinasi merujuk pada anggapan bahwa perempuan berada di bawah laki-laki. Perbedaan

yang sering terjadi terhadap perempuan berdampak pada kendali akses yang dimiliki oleh perempuan. Dalam konteks pendidikan, perempuan masih seringkali memiliki akses yang lebih terbatas dibandingkan laki-laki, sehingga yang lebih diuntungkan dalam hal ini adalah laki-laki. Pengambilan keputusan juga cenderung lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan, sehingga perempuan sulit untuk mengontrol manfaat dari kebijakan yang telah dibuat.

### **C. Gender dalam Pendidikan**

Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengandung ketentuan yang mendukung hak pendidikan bagi perempuan. Pasal 48 menyatakan bahwa perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk menerima pendidikan dan pengajaran sesuai dengan perkembangan pribadinya, minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Dalam Konstitusi Republik Indonesia 1945, Pasal 31 menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak ini berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia, tanpa adanya batasan atau diskriminasi. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang adil dan setara bagi semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, status ekonomi, agama, atau latar belakang sosial.

Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa memandang jenis kelamin, status ekonomi, agama, atau latar belakang sosial. Undang-Undang ini mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan dan menekankan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun bangsa dan negara. Ini mencakup pendidikan dasar yang mendukung pengembangan kepemimpinan, yang berarti bahwa baik perempuan maupun laki-laki harus memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin dan memimpin. Pendidikan juga harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### **D. Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan**

Implementasi pengarusutamaan gender dalam pendidikan adalah tindakan nyata untuk menjalankan program dan kebijakan yang bertujuan menghilangkan bias gender dalam lingkungan pendidikan. Dalam konteks ini, implementasi berarti melakukan tindakan yang akan membawa dampak atau akibat untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini melibatkan strategi tertentu yang diterapkan dalam lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi gender dan bahwa perempuan serta laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam hal akses, partisipasi, dan manfaat dari pendidikan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 memberikan pedoman pengarusutamaan gender di sekolah yang dapat menjadi panduan bagi pengelola sekolah, termasuk Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengembangan sekolah yang berwawasan gender di Indonesia.

Pengarusutamaan gender dalam pendidikan terfokus pada konsep sekolah yang responsif gender, yang mengacu pada manajemen berbasis sekolah (MBS). Ini melibatkan organisasi dan budaya sekolah, sarana dan prasarana sekolah, administrasi sekolah, serta kebijakan dan pengelolaan sekolah.

Dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, langkah-langkah yang perlu diambil termasuk:

1. Pengarusutamaan gender sejak dini, dimulai dari pendidikan dalam keluarga dan sekolah.
2. Strategi pengarusutamaan gender, yang melibatkan kebijakan dan program dengan memperhatikan kebutuhan laki-laki dan perempuan.
3. Pengintegrasian gender dalam pengelolaan sekolah, melibatkan organisasi dan budaya sekolah, sarana dan prasarana, administrasi, dan kebijakan.
4. Kesetaraan dalam jabatan dan pengendalian program di sekolah.
5. Kesamaan dan kesempatan dalam menerima manfaat dari berbagai kebijakan dan program pemerintah.

6. Fasilitas fisik yang ramah gender, seperti sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan.
7. Administrasi yang memilah data berdasarkan jenis kelamin dan menyediakan data dan informasi yang seimbang.
8. Pengintegrasian gender dalam proses pembelajaran, termasuk bahan ajar yang responsif gender dan tenaga pendidik yang sensitif terhadap gender.

Dalam peran masyarakat, seperti komite sekolah, pengintegrasian gender dapat dilihat melalui komposisi kepengurusan dan anggota komite sekolah. Keterlibatan perempuan dalam komite dan pelaksanaan program kegiatan adalah bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pembangunan pendidikan yang responsif gender.

Indikator keberhasilan implementasi pengarusutamaan gender meliputi:

1. Adanya peraturan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender.
2. Penyusunan Rencana Anggaran Sekolah (RKAS), Rencana Pembelajaran (RPP), dan silabus yang responsif gender.
3. Perencanaan program kegiatan yang mendukung pengintegrasian gender dalam sekolah.
4. Sumber daya manusia yang memadai, termasuk guru dan administrasi.
5. Dukungan pendanaan sarana dan prasarana pendidikan.
6. Data yang terpisah berdasarkan jenis kelamin dan sistem informasi gender.
7. Alat-alat instrumen untuk perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi dengan indikator gender.
8. Dukungan dari komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah.

Untuk mencapai indikator keberhasilan tersebut, beberapa prasyarat perlu dipenuhi, termasuk komitmen awal dari para pemimpin, kebijakan kepala, pengelola, dan komite sekolah, kelembagaan yang mendukung pengarusutamaan gender, tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai, pemilahan data berdasarkan jenis kelamin, pedoman praktis, serta keterlibatan masyarakat yang berbentuk keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam berbagai kegiatan sekolah yang melibatkan masyarakat.

## **BAB X**

# **PENDIDIKAN BUDI PEKERTI/AKHLAK MULIA**

### **A. Pendidikan Budi Pekerti**

Pendidikan budi pekerti atau akhlak mulia memiliki akar yang sangat dalam dalam berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Sejak zaman kuno, manusia telah menyadari pentingnya membentuk karakter yang baik dan moral yang kuat untuk menjalani kehidupan yang harmonis dan bermakna. Contohnya, dalam tradisi filosofi Yunani Kuno, Socrates mengajarkan pentingnya introspeksi dan pencerahan diri untuk mencapai kebaikan moral. Dalam banyak agama dan kepercayaan, ajaran moral dan etika memiliki peran sentral. Contohnya, dalam agama Islam, terdapat konsep akhlak yang tinggi yang ditekankan dalam pendidikan Islam.

Pendidikan budi pekerti atau akhlak mulia bertujuan untuk mengembangkan karakter individu sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, empati, dan berperilaku baik dalam interaksi dengan orang lain. Pendidikan budi pekerti juga muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan individu yang bertanggung jawab, peduli, dan beretika dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu membangun komunitas yang lebih baik. Tujuan utamanya adalah membentuk individu yang memiliki moralitas yang kuat, etika yang baik, dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui pendidikan ini, diharapkan individu mampu membuat keputusan yang bijaksana dan berkontribusi positif pada masyarakat.

Pentingnya pendidikan budi pekerti/akhlak mulia yaitu membantu individu mengembangkan nilai-nilai positif seperti integritas, kerendahan hati, dan kejujuran. Individu yang memiliki akhlak mulia cenderung membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Dengan karakter yang baik, individu dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan bermoral. Pendidikan akhlak membekali individu dengan keterampilan penyelesaian konflik yang damai dan efektif. Pendidikan budi pekerti atau akhlak mulia dapat diterapkan di berbagai lembaga pendidikan, termasuk sekolah, keluarga, agama, dan masyarakat. Melalui pendekatan yang holistik, pendidikan ini berusaha untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berperilaku baik dan bertanggung jawab secara moral. Dengan demikian, pendidikan ini menjadi landasan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan harmonis.

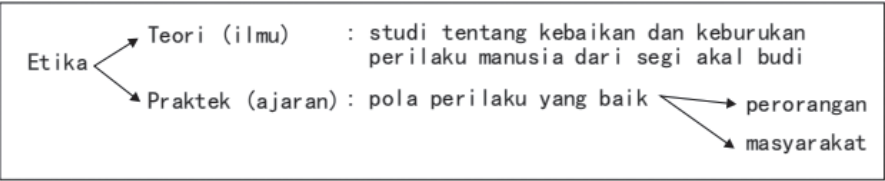
Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa menekankan betapa pentingnya pendidikan budi pekerti sejak usia dini di sekolah. Mata pelajaran ini memfasilitasi peserta didik guna mengkaji nilai-nilai humanitas, misalnya prinsip kejujuran, memperjuangkan keadilan, sikap *tepa slira* dan menghargai perbedaan yang ada. Menurut (Hadiwinarto, 2014:231) pendidikan budi pekerti juga disebut pendidikan nilai, merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Pendidikan nilai di dalam institusi formal, nonformal dan informal di semua kelompok masyarakat, negara dan bangsa, esensinya adalah sesuatu hal yang baik bagi kehidupan manusia, meskipun di antara mereka memiliki standar nilai yang berbeda. Sebagaimana dikemukakan oleh Suparlan (2007) bahwa mendidik yang menekankan pada pengembangan moral kejujuran, menjadi sasaran utama pencerdasan emosional peserta didik, yang harus dipertanggungjawabkan oleh guru bersama semua komponen sekolah.

Fakta menunjukkan bahwa setiap mata pelajaran mengandung potensi moral kejujuran, karena mata pelajaran adalah suatu bentuk ilmu, sedangkan ilmu itu sendiri, apapun jenisnya selalu berisi tentang kebenaran. Pendapat Suparlan ini mempertegas bahwa pendidikan budi pekerti bagi siswa di sekolah merupakan tanggung jawab semua guru bidang studi bersama-sama komponen sekolah lainnya.

Pengertian budi pekerti secara operasional adalah upaya untuk membekali peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan selama pertumbuhan dan perkembangan dirinya sebagai bekal masa depan agar memiliki hati nurani yang bersih, berperangai baik, yang tercermin pada perilaku berupa ucapan, perbuatan, sikap pikiran, perasaan, kerja, dan hasil karya berdasarkan nilai-nilai agama serta norma dan moral (Setyowati, 2009). Pendidikan budi pekerti merupakan pendidikan yang terintegrasi dengan setiap bahan ajar, dan menjadi tanggung jawab bersama antara lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah (Murtadlo, 2009). Oleh karena itu, ia bukanlah suatu bahan ajar yang berdiri sendiri dan dilaksanakan oleh sebagian pihak saja, misalnya hanya oleh sekolah.

Ada Beberapa Pendapat tentang Budi Pekerti yaitu:

Budi pekerti secara hakiki adalah perilaku (Zuriah2007: 17). Menurut draf kurikulum berbasis kompetensi budi pekerti berisi nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukur menurut kebaikan dan keburukan melalui norma agama, norma hukum, tata krama dan sopan santun, norma budaya adat istiadat masyarakat. Budi pekerti berinduk pada “etika” atau filsafat moral. Menurut Bertens (1993 :4) mengartikan etika sebagai ilmu yang mempelajari adat kebiasaan, termasuk di dalamnya moral yang mengandung nilai dan norma yang menjadi pegangan hidup seseorang maupun kelompok. Secara ringkas dapat dibuat skema sebagai berikut :



Gambar 1. Skema Etika (Setyowati, 2009 :150).

Budi pekerti bukan merupakan mata pelajaran, tetapi merupakan program pendidikan untuk menciptakan suasana kondusif dalam menerapkan nilai-nilai budi pekerti. Pendidikan budi pekerti dilaksanakan setiap saat selama kurun waktu berlangsungnya kegiatan pembelajaran dalam kelas di lingkungan sekolah dengan melibatkan seluruh masyarakat

sekolah. Kompetensi budi pekerti dapat mengacu pada rumusan yang disediakan oleh pusat kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.

Pengertian pendidikan budi pekerti dapat dibedakan menjadi dua yaitu secara konsepsional dan operasional. Nurul Zuriah (2007: 197) menjelaskan pengertian budi pekerti secara konsepsional mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur dalam segenap peranannya sekarang dan masa depan.
- 2) Upaya pembentukan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan perilaku peserta didik agar mau dan mampu melaksanakan tugas hidupnya selaras, serasi dan seimbang (lahir batin, material-spiritual dan individual).
- 3) Upaya pendidikan untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi seutuhnya yang berbudi pekerti luhur melalui kegiatan bimbingan, pembiasaan, pengajaran dan latihan serta keteladanan.

Pengertian budi pekerti secara operasional adalah upaya untuk membekali peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan selama pertumbuhan dan perkembangan dirinya sebagai bekal masa depan agar memiliki hati nurani yang bersih, berperangai baik, yang tercermin pada perilaku berupa ucapan, perbuatan, sikap pikiran, perasaan, kerja dan hasil karya berdasarkan nilai-nilai agama serta norma dan moral.

Jadi pendidikan budi pekerti yang dimaksud adalah upaya untuk membekali peserta didik melalui bimbingan dan pengajaran yang berisi nilai-nilai perilaku manusia yang dapat diukur melalui norma agama, norma hukum, tata krama dan sopan santun, serta norma budaya atau adat istiadat masyarakat. Budi pekerti diwujudkan dalam bentuk perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan, dan kepribadian anak didik.

## **B. Tujuan Pendidikan Budi Pekerti**

Tujuan pendidikan budi pekerti yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan dan kecakapan berpikir, menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat dan memiliki kemampuan yang terpuji. Dalam rangka

mewujudkan pendidikan nasional, pendidikan budi pekerti yang diintegrasikan sejumlah mata pelajaran yang relevan mempunyai tujuan agar peserta didik mampu menggunakan pengetahuan, mengkaji, dan menginternalisasi nilai dan keterampilan sosial untuk mengembangkan akhlak mulia yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Secara rinci tujuan pendidikan budi pekerti menurut Cahyoto (2002 : 9-13 ) dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) mendorong kebiasaan berperilaku terpuji sesuai nilai-nilai universal dan tradisi budaya yang religius; (2) menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab; (3) memupuk ketegaran mental peserta didik agar tidak terjerumus pada perilaku yang menyimpang, baik secara individu maupun sosial, dan (4) meningkatkan kemampuan untuk menghindari sifat tercela yang dapat merusak diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.

Menurut Zuchdi (2009), tujuan utama pendidikan moral adalah menghasilkan individu yang mandiri, yang memahami nilai-nilai moral dan memiliki komitmen untuk bertindak konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran di sekolah, maka titik awal pendidikan moral adalah membuat siswa-siswa memahami konsep moralitas. Hal ini karena pendidikan moral mengandung beberapa komponen, yaitu pengetahuan tentang moralitas, penalaran moral, perasaan kasihan, dan peduli terhadap kepentingan orang lain, dan tendensi moral (Zuchdi, Prasetya, & Masruri. 2013).

Ki Hadjar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya (Wardani, 2010). Para praktik pendidikan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, apakah berkenaan dengan penguasaan pengetahuan, pengembangan pribadi, kemampuan sosial atau kemampuan kerja. Untuk menyampaikan bahan pelajaran, ataupun mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut diperlukan metode penyampaian serta alat bantu tertentu.

### **C. Perlunya Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah**

Pendidikan budi pekerti merupakan program pengajaran di sekolah yang bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang berakhlak mulia melalui kejujuran, disiplin, dan kerja sama yang menekankan ranah afektif

(perasaan dan sikap) tanpa meninggalkan ranah kognitif (berpikir rasional) dan ranah skill (keterampilan). Pendidikan budi pekerti tidak hanya hafal kata-kata bijak atau mampu menjawab soal ujian, tetapi lebih berorientasi kepada perilaku dalam berinteraksi. Sebenarnya pendidikan budi pekerti di sekolah lebih mudah ditanamkan di tingkat dasar, namun anak masih membutuhkan pendidikan yang berkelanjutan di tingkat menengah dan atas. Hal utama pendidikan budi pekerti di sekolah adalah keberadaan guru sebagai teladan peserta didik, guru bukan sekadar mengajarkan mata pelajaran, *seyogyanya* guru harus kreatif dalam mendidik siswa. Di sela-sela penyampaian pelajaran guru juga menyampaikan nilai-nilai dan norma positif, sehingga peserta didik tidak hanya dibekali keilmuan saja, tapi juga budi pekerti. Jika orang tua di rumah sebagai figur budi pekerti luhur, guru di sekolah menjadi teladan. Berkaitan tugas dan peran guru dalam pendidikan budi pekerti, guru dituntut mampu memberikan nuansa yang tidak hanya sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan saja, tetapi dapat mengubah perilaku peserta didik untuk menjadi manusia berbudi luhur. Maka dibutuhkan suatu pendekatan yang tepat untuk mengintegrasikan pendidikan budi pekerti yaitu:

- 1) Pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*), pendekatan ini mengajak peserta didik mengenal dan menerima nilai keteladanan.
- 2) Pendekatan perkembangan moral kognitif (*cognitive moral development approach*), yaitu menekankan berbagai tingkatan moral, guru mengarahkan dan menerapkan pada peserta didik dalam proses mengambil keputusan tentang moral, seperti: takut hukuman, melayani kehendak sendiri, berbuat kebaikan untuk orang banyak, bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang universal.
- 3) Pendekatan analisis nilai (*values analysis approach*), yaitu menekankan peserta didik dapat menggunakan kemampuan berpikir logis, rasional dan ilmiah dalam menganalisis masalah sosial yang berhubungan dengan nilai tertentu, seperti penelitian, analisis kasus, dan lain-lain.
- 4) Pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*), pendekatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran dan mengem-

bangkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi nilai-nilai diri sendiri maupun orang lain.

Untuk meningkatkan keberhasilan peserta didik perlu dibentuk mental, moral, personal, dan sosial yang disampaikan dengan metode komprehensif, sedangkan penerapan pendidikan budi pekerti dapat memilih berbagai pendekatan yang terbaik (eklektif) dan relevan untuk mendapatkan hasil yang optimal/sinergis (Zuriah 2007 : 75).

Adapun strategi yang dapat dilakukan melalui: (1) dialog antara guru dengan siswa, antara orang tua dan guru, dialog dapat dilakukan secara pribadi, kelompok atau dengan seluruh peserta didik pada suatu kegiatan; (2) komunikatif, apabila ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting secara pribadi dengan guru BP, jika kelompok dengan guru wali kelas dan seluruh peserta didik oleh kepala sekolah, hal ini sesuai dengan birokrasi yang telah ditentukan; (3) keterbukaan, dialog ataupun komunikasi dapat dilakukan secara terbuka, peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan pendapatnya secara positif. Situasi yang kondusif ini dapat tercipta apabila situasi sekolah tertib, aman, dan teratur. Para peserta didik disiplin dalam melaksanakan tata tertib sekolah, para guru melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sementara kepala sekolah selalu memberi petunjuk dan pembinaan kepada guru maupun peserta didik untuk melaksanakan tugas masing-masing. Agar pelaksanaan pendidikan budi pekerti tepat pada sasaran yaitu anak didik maka strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan budi pekerti meliputi tiga hal yaitu: (a) Menggunakan prinsip keteladanan dari semua pihak baik orang tua, guru, masyarakat maupun pemerintah, (b) menggunakan prinsip rutinitas dalam semua aspek kehidupan dan (c) prinsip kesadaran untuk bertindak sesuai nilai-nilai budi pekerti yang diajarkan.

#### **D. Penilaian Pendidikan Budi Pekerti**

Penilaian budi pekerti dilakukan untuk mengukur seberapa jauh nilai budi pekerti yang telah dipahami, dihayati, dan diterapkan peserta didik yang tercermin dalam kualitas hidup sehari-hari. Untuk memperoleh hasil penilaian pendidikan budi pekerti peserta didik dalam lingkungan sekolah, guru perlu menyiapkan instrumen penilaian yang berupa lembar observasi, lembar skala sikap, lembar portofolio, lembar *check list* dan lembar pedoman wawancara.

Agar penilaian budi pekerti yang berupa sikap/perilaku yang sifatnya konkret tidak subyektif, sebaiknya penilai terdiri dari unsur guru dan kepala sekolah. Guru dapat dipilih menurut fungsinya seperti guru mata pelajaran, wali kelas, bimbingan konseling baik untuk tingkat taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, dan Sekolah Lanjutan Atas. Namun guru wali kelas memiliki peran pokok dalam menilai budi pekerti, sedang guru lain memberi masukan. Terlepas pro dan kontra pendidikan budi pekerti dimasukkan dalam mata pelajaran tersendiri di sekolah untuk memperbaiki kondisi mental, sikap, dan perilaku peserta didik yang dirasa saat ini sangat mengkhawatirkan diperlukan adanya inovasi maupun inovasi dalam pendidikan budi pekerti merupakan proses yang tidak pernah berhenti dan dinamis yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling terkait, dalam hal ini adalah kurikulum dan materi ajar, guru, sekolah, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

## **BAB XI**

# **PENDIDIKAN KARAKTER DAN NILAI BUDAYA**

Pendidikan sesungguhnya adalah transformasi budaya, sehingga persoalan budaya dan karakter bangsa yang kurang baik akan menjadi sorotan tajam masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa, karena akhir-akhir ini karakter budaya Indonesia sudah mulai luntur dari kalangan anak bangsa. Memang diakui bahwa hasil dari pendidikan akan terlihat dampaknya dalam waktu yang cukup lama, tetapi memiliki daya tahan dan dampak yang kuat di masyarakat dalam waktu yang relatif lama sehingga membangun pendidikan sesungguhnya investasi jangka panjang.

Istilah karakter merujuk pada ciri khas, perilaku khas seseorang atau kelompok, kekuatan moral, atau reputasi. Dengan demikian, karakter adalah evaluasi terhadap kualitas moral individu atau berbagai atribut, termasuk keberadaan kurangnya kebajikan seperti keberanian, ketabahan, kejujuran, dan kesetiaan, atau perilaku atau kebiasaan yang baik. Ketika seseorang memiliki karakter moral, hal inilah yang membedakan kualitas individu yang satu dibandingkan dari yang lain.

Karakter juga dipahami sebagai seperangkat ciri perilaku yang melekat pada diri seseorang yang menggambarkan tentang keberadaan dirinya kepada orang lain. Penggambaran itu tercermin dalam perilaku ketika melaksanakan berbagai aktivitas apakah secara efektif melaksanakan dengan jujur atau sebaliknya, apakah dapat mematuhi hukum yang berlaku atau tidak. Walaupun perilaku sering dihubungkan dengan kepribadian, tetapi kedua kata ini mengandung makna yang berbeda. Kepribadian pada dasarnya merupakan sifat bawaan, sedangkan karakter terdiri atas perilaku-perilaku yang diperoleh dari hasil belajar.

Ada beberapa faktor yang dianggap dapat menyebabkan lunturnya karakter berbudaya Indonesia, yang pertama yaitu karena pengaruh lingkungan pergaulan. Seseorang yang terbiasa bergaul di lingkungan yang modern cenderung akan melupakan budaya lokal, ia justru akan mengikuti mode yang sedang berlaku. Kedua yaitu faktor pendidikan yang kurang menekankan nilai kebudayaan. Banyak sekolah yang hanya mementingkan prestasi akademiknya. Ketiga adalah adanya sikap acuh tak acuh terhadap kebudayaan lokal. Banyak anak muda sekarang ini yang tidak mengetahui kebudayaan apa saja yang ada di daerahnya, seperti lagu daerah, rumah adat, tarian adat, pakaian adat, dan lain-lain. Faktor yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi yang kurang tepat. Seperti fenomena saat ini, banyak orang, terutama anak-anak muda yang justru mengunduh file-file yang berisi tentang kebudayaan luar, misal goyang “gangnamstyle”. Faktor kelima yaitu adanya perasaan malu saat menggunakan budaya lokal, misal dalam berbahasa, banyak orang Jawa yang malu menggunakan bahasa Jawa karena takut jika dianggap kampungan. Faktor yang terakhir yaitu faktor pengaruh budaya luar. Anak-anak lebih tertarik pada budaya luar daripada budaya lokal. Hal ini dapat terlihat berbagai aspek salah satunya dari aspek cara bergaul. Sekarang ini dalam bergaul seperti tidak ada batasan antara pria dan wanita, misal adanya budaya “cipika-cipiki” atau cium pipi kanan cium pipi kiri.

Dari masalah-masalah di atas, yaitu masalah mengenai mulai lunturnya karakter berbudaya dapat diatasi dengan berbagai cara. Cara yang pertama yaitu cara preventif. Cara preventif merupakan suatu usaha pencegahan terhadap tingkah laku yang menyimpang dari budaya Indonesia. Cara ini dilakukan sebelum suatu peristiwa terjadi

yang bertujuan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan perilaku menyimpang sedini mungkin. Cara preventif ini bisa dilakukan melalui pendidikan informal di lingkungan keluarga dan masyarakat, maupun melalui pendidikan formal, yaitu sekolah. Dalam lingkungan informal dan formal akan ditanamkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, seperti sopan santun dalam hal bertutur kata, berpakaian, dan lain sebagainya.

Cara yang kedua, yaitu cara represif. Cara represif merupakan cara yang dilakukan setelah sebuah peristiwa penyimpangan terjadi yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya perilaku yang menyimpang. Misal Ryan berlaku tidak sopan pada gurunya, ia memukul gurunya yang sedang menasihatinya, maka pihak sekolah akan memberikah hukuman kepadanya.

Selain cara preventif dan represif, untuk menangani masalah mulai lunturnya karakter berbudaya juga bisa dilakukan dengan cara sosialisasi. Semua masyarakat terutama badan-badan yang bertanggung jawab atas pendidikan warga negara hendaknya turut serta dalam pensosialisasian kebudayaan Indonesia dalam rangka pembentukan karakter bangsa yang berbudaya Indonesia. Betapa hebatnya anak-anak bangsa jika mereka mampu menerapkan budaya sebagai dasar berpikir, bersikap, bertindak dalam mengembangkan dirinya sebagai individu, anggota masyarakat, dan warga negara Indonesia.

Semua warga negara wajib ikut serta dalam hal pembentukan karakter berbudaya Indonesia ini. Baik kaum muda maupun yang sudah tua hendaknya bekerja sama dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan budaya lokal Indonesia. Generasi terdahulu dituntut untuk mengajarkan atau memperkenalkan serta menanamkan sedini mungkin budaya lokal kepada generasi muda agar karakter kaum muda yang kelak akan menonjol adalah karakter yang berbudaya. Bagi generasi muda hendaknya mengetahui, mempelajari, dan memahami budaya-budaya yang ada di Indonesia yang sebenarnya bisa dijadikan landasan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya yaitu Jawa dengan budaya tata kramanya yang terkenal sangat baik. Apabila orang muda ingin berbicara pada orang yang lebih tua atau kepada orang yang dihormati maka hendaknya ia menggunakan bahasa krama inggil. Bahasa krama inggil ini dalam tata bahasa Jawa merupakan bahasa yang tertinggi

atau bisa dikatakan bahasa yang paling santun. Namun, karena pengaruh globalisasi budaya tersebut kini sudah mulai luntur. Saat ini banyak orang Jawa yang tidak bisa berbahasa Jawa krama sehingga jika mereka berbicara pada orang yang lebih tua atau pada orang yang dihormati mereka hanya menggunakan bahasa biasa atau bahasa Jawa ngoko yang biasa digunakan untuk berbicara dengan teman sebaya. Hal ini dianggap kurang sopan karena seakan-akan tidak ada bedanya antara orang yang dihormati dengan teman sebayanya.

Karakter berbasis budaya bisa ditanamkan maupun dikembangkan di mana saja. Baik di lingkungan pendidikan formal maupun informal. Di lingkungan formal misalnya di sekolah. Sebuah sekolah bisa dikatakan baik dan berkualitas jika ditinjau dari sisi prestasi serta etikanya baik. Sekolah yang baik tentunya tidak hanya akan menekankan pada prestasinya, tapi juga dalam hal tata kelakuan atau etika para siswanya. Dengan adanya pelajaran Seni Budaya diharapkan para peserta didik bisa mengetahui budaya-budaya lokal Indonesia. Begitu juga dengan adanya mata pelajaran Bahasa Jawa, dalam mata pelajaran ini akan dipelajari tentang budaya-budaya Jawa seperti tata krama dalam berbahasa dengan orang yang lebih tua dan orang-orang yang dihormati.

Sedangkan yang di lingkungan informal, misalnya dalam keluarga serta lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan keluarga dan masyarakat tentu akan diajarkan budaya sopan santun baik sopan santun dalam berbicara maupun berperilaku. Sebagai contoh yang di lingkungan keluarga yaitu ketika makan kita diharuskan sambil duduk, menggunakan tangan kanan, tidak boleh bergurau saat makan, dsb.

Peran masyarakat dalam hal mengembalikan atau penanaman kembali karakter budaya Indonesia sangatlah penting. Masyarakat terdahulu berperan dalam penyebaran atau pengenalan budaya lokal pada generasi sekarang. Sedangkan generasi sekarang berperan sebagai pelestari serta penerus budaya-budaya lokal agar kelak budaya-budaya tersebut tidak hilang. Kita sebagai generasi muda zaman sekarang hendaknya turut serta melestarikan budaya lokal Indonesia. Jangan terlalu meniru budaya orang lain, apalagi jika budaya tersebut kurang baik sebagai patokan berperilaku. Sebagai contoh budaya orang-orang Barat yang kurang baik, tapi banyak ditiru masyarakat Indonesia yaitu pola hidup yang konsumtif

serta cara berpakaian. Cara berpakaian orang Barat yang terkenal minim sebenarnya tidak baik untuk diterapkan di Indonesia terutama bagi masyarakat Jawa yang sangat menjunjung tinggi sopan santun.

Sebagai generasi penerus bangsa, tentu kita tidak ingin jika anak cucu kita kelak hidup dengan keadaan tidak mengetahui jati dirinya atau kebudayaannya sendiri, tapi justru hidup dengan kebudayaan orang lain yang mungkin lebih buruk dari kebudayaan kita sekarang ini. Maka dari itu, marilah mulai dari sekarang kita pelajari, kita pahami, dan kita lestarikan budaya lokal Indonesia dengan harapan kelak kebudayaan tersebut bisa kita turunkan pada generasi masa mendatang sebagai patokan dalam berperilaku serta sebagai pembentuk karakter bangsa Indonesia mendatang. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan maka jangan sampai budaya tersebut kemudian hilang seiring kemajuan zaman karena sebaik-baiknya budaya lain budaya ibu tetap yang terbaik.

Pendidikan karakter bangsa berbasis budaya adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dalam pendidikan karakter pada diri peserta didik sehingga menjadi dasar bagi mereka dalam berpikir, bersikap, bertindak dalam mengembangkan dirinya sebagai individu, anggota masyarakat, dan warganegara. Nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang dimiliki peserta didik tersebut menjadikan mereka sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kekhasan dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Menciptakan manusia yang bermoral, berbudi pekerti luhur, dan menjunjung tinggi semangat nasionalisme yang akhir-akhir ini mulai hilang dari kalangan remaja Indonesia. Oleh karena itu, sekolah sebagai agen pendidikan formal maupun masyarakat serta keluarga sebagai lembaga informal harus mampu menanamkan membentuk karakter berbudaya pada anak sedini mungkin.

Agar karakter bangsa Indonesia bisa sesuai dengan kebudayaan lokal maka harus dikembangkan dengan pendidikan karakter bangsa dan budaya agar tujuan dalam pendidikan tercapai, tidak hanya tujuan dalam prestasi semata, tapi juga dalam pembentukan etika yang baik serta etika yang menjunjung budaya lokal. Dalam membangun karakter yang baik itu berasal dari lingkungan sekolah yang positif, sehingga lingkungan sekolah pun harus menjadi pusat perhatian guru. Kemudian selain itu, kurikulum harus dipadukan dengan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat untuk menciptakan karakter anak yang baik.

## **BAB XII**

# **SUDUT PANDANG ISLAM TERHADAP PEMBELAJARAN IPS MULTIKULTURAL**

Allah Swt menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya berta'aruf, (Q.s. al-Hujurat/49: 13). Manusia dapat menjalani hidupnya dengan tenang dan tenteram apabila terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama manusia yang ada di sekitarnya. Jalinan komunikasi akan mudah terbangun dan terpelihara jika memiliki kesamaan dalam berbagai aspek kehidupan. Akan tetapi, kalau hidup di tengah-tengah masyarakat majemuk/plural diperlukan adaptasi dan pembauran yang sistemik, sehingga toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai dapat terwujud.

Setiap anggota masyarakat seyogyanya hidup dalam tatanan kehidupan yang menjunjung tinggi pluralitas, toleransi, rasionalitas, keterbukaan, persamaan, taat aturan, menghargai orang lain, menerima perubahan, serta menjamin kemerdekaan berpikir, berbicara, dan berkreasi untuk mencapai kemajuan. Seiring dengan itu, setiap warga negara dituntut mempersempit kecenderungan eksklusivitas, intoleransi, sikap merasa benar sendiri, reaktif dalam merespon persoalan dan mengedepankan kekerasan dalam mengatasi masalah.

Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural baik dari aspek suku, ras, agama serta status sosial memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Namun, kondisi yang demikian memungkinkan pula terjadinya benturan antarbudaya, antarras, etnik, agama dan nilai-nilai yang berlaku dalam

masyarakat. Kasus Ambon, Sampit, Poso, Aceh, konflik antara FPI dan kelompok Achmadiyah, dan sebagainya telah menyadarkan kita bahwa kalau hal ini dibiarkan, maka sangat memungkinkan terjadinya disintegrasi bangsa.

Tragedi kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis di akhir tahun 1990-an di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam Negara-Bangsa, betapa kentalnya prasangka antara kelompok dan betapa rendahnya nilai-nilai multikulturisme.

Azyumardi Azra, dalam Muhaemin El-Ma'hady menyatakan bahwa pada level nasional, berakhirnya sentralisme kekuasaan yang pada masa orde baru memaksakan “monokulturalisme” yang nyaris seragam, memunculkan reaksi balik, yang bukan tidak mengandung implikasi-implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang multikultural. Berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, terjadi peningkatan gejala “provinsialisme” yang hampir tumpang tindih dengan “etnisitas”. Kecenderungan ini, jika tidak terkendali akan dapat menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosio-kultural yang amat parah, tetapi juga disintegrasi politik.

Intensitas dan ekstensitas konflik sosial di tengah-tengah masyarakat terasa kian meningkat, terutama konflik sosial yang bersifat horisontal, yakni konflik yang berkembang di antara anggota masyarakat, meskipun tidak menutup kemungkinan timbulnya konflik berdimensi vertikal, yakni antara masyarakat dan negara. Konflik sosial dalam masyarakat merupakan proses interaksi yang alamiah. Konflik itu menimbulkan persoalan jika konflik sosial yang berkembang dalam masyarakat tidak lagi menjadi sesuatu yang positif, tetapi berubah menjadi destruktif bahkan anarkis.

Indonesia sebagai bangsa yang pluralistik, memiliki suku bangsa, etnis, dan potensi budaya yang sangat banyak, dalam membangun masa depan bangsa dipandang perlu untuk memberi tempat dan hak bagi berkembangnya kebudayaan dari berbagai suku bangsa dan agama yang ada di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan suku bangsa dan agama, telah hidup bersama dengan berpedoman kepada norma-norma berbangsa dan bernegara, mewarnai perilaku, dan kegiatan

masyarakat. Berbagai kebudayaan jalan beriringan, saling melengkapi dan saling mengisi, tidak berdiri sendiri-sendiri, bahkan mampu untuk saling menyesuaikan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya adalah menekankan pada pentingnya memberikan kesempatan bagi berkembangnya masyarakat multikultural yang masing-masing harus diakui haknya untuk mengembangkan dirinya. Hal ini juga berarti bahwa masyarakat multikultural harus memperoleh kesempatan yang baik untuk menjaga dan mengembangkan kearifan budaya lokal mereka ke arah kualitas dan pendayagunaan yang lebih baik. Unsur-unsur budaya lokal yang bermanfaat bagi diri sendiri bahkan perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat menjadi bagian dari kebudayaan bangsa, karena akan memperkaya unsur-unsur kebudayaan nasional. Meskipun demikian, misi utamanya adalah mentransformasikan kenyataan multikultural sebagai aset dan sumber kekuatan bangsa serta menjadikannya suatu sinergi nasional.

Untuk mengetahui apakah sesuatu pengetahuan atau gagasan sudah menjadi kebudayaan suatu masyarakat, dapat dilihat dari sikap dan perilaku masyarakat itu sendiri dalam kehidupan mereka sehari-hari. Budaya sebagai sistem pemikiran mencakup sistem gagasan, konsep-konsep, aturan-aturan serta pemaknaan yang mendasari dan diwujudkan dalam kehidupan yang dimilikinya melalui proses belajar. Masyarakat multikultural harus dihargai potensi dan haknya untuk mengembangkan diri sebagai pendukung kebudayaannya, namun pada saat yang sama, mereka juga harus tetap diberi ruang dan kesempatan untuk mampu melihat dirinya, serta dilihat oleh masyarakat lainnya yang sama-sama merupakan warga negara Indonesia, sehingga setiap warga negara mendapatkan peluang dan kesempatan membangun dirinya, membangun tanah leluhurnya, yang berarti membangun bangsa dan tanah air tanpa merasakannya sebagai beban, tetapi karena ikatan kebersamaan dan saling bekerjasama, bahkan diharapkan dapat membangkitkan semangat dan kesadaran sebagai tanggung jawabnya.

Indonesia, sebagai negara berkembang mengalami krisis yang berkepanjangan. Krisis ekonomi, krisis sosial budaya, krisis moral yang diikuti dengan berbagai krisis lainnya, menyadarkan kita akan pentingnya modal sosial. Modal sosial merupakan energi kolektif masyarakat yang berupa kebersamaan, solidaritas, kerjasama, toleransi, kepercayaan, dan tanggung jawab tiap anggota masyarakat dalam memainkan setiap

peran yang diamanahkan. Bila energi kolektif hancur maka hancur pulalah keharmonisan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam masyarakat. Untuk itu, dipandang sangat penting memberikan porsi pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional agar peserta didik memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama, dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya. Hal ini dapat diimplementasikan baik pada substansi maupun model pembelajaran yang mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya. perbedaan budaya, atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai corak kehidupan masyarakat. Multikulturalisme akan menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan kesukubangsaan, budaya, dan agama dalam masyarakat yang multikultural. Perbedaan itu dapat terwadahi di tempat-tempat umum, tempat kerja, dan pasar, dan sistem nasional dalam hal kesetaraan derajat secara politik, hukum, ekonomi, dan sosial.

Menurut Sosiolog UI Parsudi Suparlan, yang dikutip oleh Pupu Saeful Rahmat, multikulturalisme adalah konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman; dengan alasan multikulturalisme merupakan sebuah idiologi yang mengagungkan. Sejarah menunjukkan, pemaknaan secara negatif atas keragaman telah melahirkan penderitaan panjang umat manusia. Pada awal tahun 2000-an, paling tidak telah terjadi 35 pertikaian besar antar etnis di dunia. Lebih dari 38 juta jiwa terusir dari tempat yang mereka diami, paling sedikit 7 juta orang terbunuh dalam konflik etnis berdarah. Pertikaian seperti ini terjadi dari Barat sampai Timur, dari Utara hingga Selatan. Dunia menyaksikan darah mengalir dari Yugoslavia, Cekoslakia, Zaire hingga Rwanda, dari bekas Uni Soviet sampai Sudan, dari Srilangka, India hingga Indonesia. Konflik panjang tersebut melibatkan sentimen etnis, ras, golongan dan juga agama.

Berdasar gambaran di atas, maka dalam tulisan ini akan dibahas tentang pendidikan multikultural yang dinamis dan Islami, dalam arti, dengan melalui pendidikan perbedaan-perbedaan alamiah yang telah menjadi kultur dalam masyarakat tidak akan menjadi pemicu terjadinya konflik dalam masyarakat, akan tetapi tetap tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik berdasarkan norma-norma agama yang dianut, khususnya norma agama Islam.

## Peranan Pendidikan Multikultural dalam Masyarakat Plural

Menurut James. A. Banks Pendidikan multikultural adalah konsep, ide atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*set of believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara.

James Banks (1994) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu: *Pertama*, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu. *Kedua*, membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin). *Ketiga*, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya (*culture*) ataupun sosial. *Keempat* mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. Kemudian melatih kelompok-kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olah raga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif.

Wacana multikulturalisme di Indonesia menemukan momentumnya ketika sistem nasional yang otoriter-militeristik tumbang seiring dengan jatuhnya rezim Soeharto. Saat itu, keadaan negara menjadi kacau balau dengan berbagai konflik antarsuku bangsa dan antargolongan, yang menimbulkan keterkejutan dan kengerian para anggota masyarakat. Kondisi yang demikian membuat berbagai pihak semakin mempertanyakan kembali sistem nasional seperti apa yang cocok bagi Indonesia yang sedang berubah, serta sistem apa yang bisa membuat masyarakat Indonesia bisa hidup damai dengan meminimalisir potensi konflik.

Era reformasi ternyata tidak hanya membawa berkah bagi bangsa kita namun juga memberi peluang meningkatnya kecenderungan primordialisme. Untuk itu, dirasakan perlunya menerapkan paradigma pendidikan multikultur untuk menangkal semangat primordialisme tersebut. Paradigma pendidikan multikulturalisme sangat bermanfaat

untuk membangun kohesifitas, soliditas dan intimitas di antara keragamannya etnik, ras, agama, budaya, dan kebutuhan di antara kita. Paparan di atas juga memberi dorongan dan spirit bagi lembaga pendidikan nasional untuk mau menanamkan sikap kepada peserta didik untuk menghargai orang, budaya, agama, dan keyakinan lain. Harapannya, dengan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural, akan membantu siswa mengerti, menerima, dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, dan nilai kepribadian.

Pupu Saeful Rahmat menyebutkan lebih lanjut bahwa penanaman semangat multikulturalisme di sekolah-sekolah, akan menjadi medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis, dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai. Agar proses ini berjalan sesuai harapan, maka *seyogyanya* kita mau menerima jika pendidikan multikultural disosialisasikan dan didesiminasikan melalui lembaga pendidikan, serta ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang dan jalur pendidikan. Apalagi, paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu *concern* dari Pasal 4 UU NO. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Lebih jauh lagi, penganut agama dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan ketidaktoleranan, perang agama, diskriminasi, dan hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan uniformitas global.

Ide pendidikan multikulturalisme dijadikan komitmen global sebagaimana direkomendasi UNESCO pada bulan Oktober 1994 di Jenewa. Rekomendasi itu di antaranya memuat empat pesan. *Pertama*, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat, dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi, dan bekerja sama dengan yang lain. *Kedua*, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi

gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan, dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. *Ketiga*, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan. Karena itu, pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam diri dan pikiran peserta didik sehingga dengan demikian mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara.

Secara generik, pendidikan multikultural memang sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya. Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.

Gelombang demokrasi menuntut pengakuan perbedaan dalam tubuh bangsa Indonesia yang majemuk. Oleh sebab itu, pendidikan multikultural adalah jawaban atas beberapa problematika kemajemukan itu. Perlu disadari bahwa proses pendidikan adalah proses pembudayaan dan cita-cita persatuan bangsa merupakan unsur budaya bangsa. Pendidikan multikultural mencerminkan keseimbangan antara pemahaman. Persamaan. dan perbedaan budaya serta mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri.

Aspek-aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan pendidikan multikultural di lingkungan sekolah adalah tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis, dan jenis kelamin. Juga, harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, di antaranya mencakup pakaian, musik dan makanan kesukaan. Selain itu, juga memberikan kebebasan bagi anak dalam merayakan hari-hari besar umat beragama serta memperkokoh sikap anak agar merasa butuh terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis. Implementasi pendidikan multikultural tidak akan lepas

dari konsep-konsep pembaharuan pendidikan, karena pembaharuan pendidikan mempunyai konsep konstruktif yang membentuk terwujudnya pendidikan multikultural. Menurut Hujair

A.H. Sanaky (2003:157), dalam melakukan pembaharuan, pendidikan diharapkan mengorientasikan tujuannya lebih bersifat problematis, strategis, aspiratif, menyentuh aspek aplikasi, serta dapat merespon kebutuhan masyarakat. Kemudian dari kerangka ini, tujuan yang dirumuskan meliputi aspek *ilahiyyah* (teoritis), fisik dan intelektual, kebebasan (liberal), akhlak, profesionalisme, berkualitas, dinamis, dan kreatif sebagai insan kamil dalam kehidupannya. Kebijakan yang sentralistik dan pengawalan yang ketat terhadap isu perbedaan telah menghilangkan kemampuan masyarakat untuk memikirkan, membicarakan dan memecahkan persoalan yang muncul dari perbedaan secara terbuka, rasional dan damai. Pendidikan multikultural sangat penting diterapkan guna meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik di beberapa daerah. Melalui pendidikan berbasis multikultural, sikap dan pemikiran (*mindset*) siswa akan lebih terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman.

Dengan pengembangan model pendidikan berbasis multikultural diharapkan mampu menjadi salah satu metode efektif meredam konflik. Selain itu, pendidikan multikultural bisa menanamkan sekaligus mengubah pemikiran peserta didik untuk benar-benar tulus menghargai keberagaman etnis, agama, ras, dan antargolongan, toleransi merupakan sikap warga yang aktif, bukan sikap yang spontan. Artinya sikap toleran tidak akan tertanam dengan sendirinya tanpa ada usaha sadar yang mengintegrasikannya dalam pendidikan.

Sugiono menerangkan bahwa metodologi dan strategi pembelajaran multikultural dengan menggunakan sarana audio visual telah cukup menarik minat belajar anak serta sangat menyenangkan bagi siswa dan guru. Karenanya, siswa sekaligus dapat mendengar, melihat, dan melakukan praktik selama proses pembelajaran berlangsung. Sugiono menambahkan, program pendidikan multikultural dalam penerapannya saat ini bukanlah mata pelajaran yang berdiri sendiri, namun terintegrasi ke dalam mata pelajaran, sehingga dalam implementasinya perlu dilakukan oleh guru-guru yang kreatif dan inovatif. “Guru-guru dituntut kreatif dan inovatif sehingga mampu mengolah dan menciptakan desain

pembelajaran yang sesuai. Termasuk memberikan dan membangkitkan motivasi belajar.”

Model pembelajaran multikultural ini bisa berhasil, jika kepala sekolah mendukung program ini. Selain itu, para pengajar juga mau menerima pembaruan dan sekolah sudah terbiasa mengembangkan kurikulum sendiri di samping kurikulum dari Dinas Pendidikan Nasional. “Sementara, alat lain yang mendukung adalah adanya audio visual. Karena ini menjadi penting untuk menyaksikan film-film atau video bertema multikultural.

Menurut Tilaar krisis dewasa ini yang menonjol, yaitu: (1) bahwa pendidikan tidak terlepas dari keseluruhan hidup manusia di dalam segala aspeknya yaitu politik, ekonomi, hukum dan kebudayaan (2) krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia dewasa ini merupakan refleksi dari krisis pendidikan nasional. Krisis multi dimensi yang dialami oleh bangsa Indonesia tersebut, perlu diatasi dengan upaya-upaya terencana dan terarah menuju perubahan yang konstruktif. Oleh karena itu, fungsi pendidikan yang efektif menjadi signifikan dalam menuju perubahan atau dinamika sosial.

Di sinilah terletak dilema klasik. Pendidikan merupakan akses yang sangat penting-jika tidak satu satunya-untuk mencapai mobilitas sosial, tetapi kaum miskin tidak dapat menjangkau akses tersebut, karena mahalnya biaya. Akhirnya terciptalah *vicious circle* (lingkaran setan); kemiskinan menciptakan keterbelakangan pendidikan, dan sosial ekonomi, dan keterbelakangan pendidikan menghasilkan kebodohan dan kemiskinan.

Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin atau keluarga berantakan (*broken home*) dengan terpaksa mencari sendiri penghasilan di jalanan; menimbulkan kekhawatiran para pendidik dan orang tua, sebab mereka akan terbentuk kepribadian dan karakter yang dikembangkannya dalam kehidupan empirik. Mereka sebenarnya adalah komunitas anak yang telah kehilangan sebagian besar masa depan mereka dan mengalami tekanan hidup, sehingga mereka telah melarikan diri dari dunia nyata dan menikmati mimpi-mimpi tak sehat dengan cara menghisap lem karet yang mereka sebut sebagai *ngelem*.

Dalam konteks terakhir inilah kebutuhan pada kedermawanan (*filantropi*) secara khusus untuk pendidikan terasa semakin dibutuhkan

dan mendesak. Jika tidak, sekolah/madrasah yang berkualitas hanya bisa dimasuki anak-anak dari keluarga kaya. Padahal, kita juga tahu, terdapat cukup banyak anak dari kalangan miskin yang cerdas, berbakat, rajin, mau bekerja keras dan dengan demikian, cukup menjanjikan.

Apabila pendidikan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan bermutu tinggi, maka pendidikan menjadi instrumen yang ampuh dalam menciptakan mobilitas sosial, atau dinamika sosial. Oleh karena itu, maju dan mundurnya suatu masyarakat dan bangsa sangat tergantung pada pelaksanaan sistem pendidikannya. Itu artinya proses sosial atau dinamika sosial secara sistematis dipengaruhi oleh pelaksanaan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Fenomena itu terbukti dari, krisis ekonomi, politik, krisis hukum, dan krisis kebudayaan, termasuk krisis pendidikan.

Nilai-nilai yang diajarkan orang tua dan guru kepada anak-anak, akan berpengaruh secara efektif atau tidak, hanya kalau nilai-nilai tersebut dibagi oleh anak tersebut dengan yang lain. Di sinilah pentingnya guru-guru maupun orang tua harus bersiap menyeleksi nilai-nilai yang akan ditransformasikan atau dikesampingkan. Mengubah seseorang adalah dengan mengubah interaksinya, dunia sosialnya, kelompok referensi, dan persepsinya, sebab dengan demikian, hal itu akan mengubah definisi diri dan situasi orang tersebut.

Sekolah berfungsi sebagai sarana sosialisasi anak, selain keluarga dan lembaga-lembaga sosial lain yang ada di masyarakat. Proses sosialisasi anak di sekolah akan menentukan cara berpikir dan berperilaku yang sesuai dengan norma-norma yang diyakini dan dimiliki masyarakatnya. Kepribadian anak akan terbentuk sesuai dengan akar budayanya. Fungsi pendidikan bagi suatu masyarakat dan bangsa adalah bahwa peradaban-peradaban besar yang pernah dikenal dalam sejarah mengalami kehancuran sebagai akibat dari kegagalan pendidikan dalam menjalankan fungsinya. Secara esensial, manusia sebagai pribadi atau sebagai anggota masyarakat dan bangsa senantiasa mengalami perkembangan. Aktivitas manusia mewariskan dan mengembangkan kebudayaan itu terutama dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan. Untuk itu, pendidikan dilihat sebagai proses sedangkan kebudayaan adalah isi pendidikan. Hal itu dimaksudkan agar tercapai tujuan yakni meningkatkan perkembangan sosio-budaya bahkan martabat bangsa, kewibawaan, dan kejayaan negara.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan sarana untuk mengantarkan peserta didik menuju pada kesadaran sosial yang lebih tinggi dari sebelum ia mengenyam pendidikan. Namun, terkadang dalam pelaksanaan pendidikan justru memisahkan peserta didik dari kehidupan sosialnya. Hal ini terjadi bila pendidikan yang diberikan bukan lagi berbasis pada realitas masyarakat. Akan tetapi, lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar. Peserta didik setelah selesai mendapatkan pendidikan bukan peka akan realitas sosial malah hilang dari realitas sosial.

Pendidikan multikultural tidak cukup menjadi tanggung jawab guru mata pelajaran tertentu, tetapi perlu diimplementasikan secara integral ke dalam berbagai materi pembelajaran yang relevan dengan mata pelajaran yang bersangkutan. Tidak ada salahnya, peserta didik diajak berdialog dan belajar menumbuhkan kepekaannya terhadap kasus kekerasan yang terjadi. Bagaimana respon dan sikap peserta didik terhadap aksi-aksi kekerasan yang terjadi bisa dijadikan sebagai masukan berharga dalam proses pembelajaran berbasis pendidikan multikultural. Guru perlu memberikan kebebasan kepada subjek didik untuk merespon dan menyikapinya, sehingga mereka merasa dihargai dan diperlakukan sebagai sosok yang amat dibutuhkan kehadirannya dalam proses pembelajaran.

Meskipun demikian, guru dalam fungsinya sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran perlu memberikan penguatan agar pengalaman belajar yang mereka peroleh bisa dikonstruksi menjadi pengetahuan baru tentang nilai-nilai multikultural itu. Jika dikemas dalam proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, bukan mustahil kelak mereka akan menjadi generasi yang “sadar budaya” sehingga mampu menyandingkan keberagaman sebagai kekayaan budaya bangsa yang perlu dihormati dengan sikap toleran, tulus, dan jujur.

Arifin Assegaf mengemukakan ungkapan yang sangat terkenal dari filosof sekaligus seorang teolog, Hans Küng yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris “Tiada ada perdamaian di antara agama-agama tanpa dialog di antara agama-agama; tiada dialog-dialog jika tidak mempelajari fondasi agama-agama”. Selanjutnya dinyatakan bahwa tindakan saling membunuh yang tampaknya tak akan berkesudahan antara golongan Muslim, Yahudi, Kristen di Palestina; bentrokan berdarah antara golongan Katolik dan Protestan di Irlandia Utara serta kekejaman tak

berperikemanusiaan di Bosnia antara Kristen ortodoks, Katolik dan Muslim, adalah akibat dari mengabaikan ungkapan Hans Küng tersebut. Padahal semua agama mengajarkan kedamaian dan setiap pemeluk agama mendambakan/mengharapkan kerukunan hidup dan kehidupan.

Pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural senantiasa menciptakan struktur dan proses di mana setiap kebudayaan bisa melakukan ekspresi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan multikultural, yakni: *pertama*, adalah dialog. Pendidikan multikultural tidak mungkin berlangsung tanpa dialog. Dalam pendidikan multikultural, setiap peradaban dan kebudayaan yang ada berada dalam posisi yang sejajar dan sama. Dialog meniscayakan adanya persamaan dan persamaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan dialog, diharapkan terjadi sumbang pemikiran yang pada gilirannya akan memperkaya kebudayaan atau peradaban yang bersangkutan. *Kedua* adalah toleransi. Toleransi adalah sikap menerima bahwa orang lain berbeda dengan kita. Dialog dan toleransi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bila dialog itu bentuknya, toleransi itu isinya. Toleransi diperlukan bukan hanya pada tataran konseptual, melainkan juga pada tingkat teknis operasional. Sistem pendidikan kita selama ini terlalu menitikberatkan pada pengayaan pengetahuan dan keterampilan tetapi mengabaikan penghargaan atas nilai-nilai budaya dan tradisi bangsa.

Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada perubahan sosial yang sangat kompleks akibat globalisasi dan modernisasi tahap lanjut. Budaya hidup instan mewarnai sebagian masyarakat Indonesia. Kehidupan sosial budaya mengalami perubahan sosial yang kapitalistik, sehingga hampir semua aspek dikomersialkan termasuk menjualbelikan anak-anak dan organ tubuh manusia layaknya barang dagangan di pasar bebas. Bangsa Indonesia yang terkenal sebagai masyarakat religius, tidak boleh dibiarkan berwatak sekuler dan serba bebas. Dalam konteks inilah pentingnya pendidikan multikultural untuk membangun karakter keadaban yang Islami atau religius. Masyarakat Islami antara lain ditandai dengan upaya mempertahankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban yang luhur. Keadaban adalah bagian dari kebudayaan yang menunjukkan orientasi perilaku kolektif dalam relasi sosial masyarakat berdasarkan ajaran moral yang bersumber dari agama yang dianutnya.

Wawasan pluralis-multikultural dalam pendidikan agama merupakan bekal penting agar kalangan terpelajar dan masyarakat luas menghargai perbedaan, menghormati secara tulus, komunikatif, terbuka, dan tidak saling curiga, selain untuk meningkatkan iman dan taqwa. Pendidikan pluralis bukanlah mengajarkan anak didik untuk menjalankan agama dengan seenaknya sendiri, tanpa tanggung jawab dan ketulusan, tetapi justru mengajarkan untuk taat beragama, tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing. Wajah agama yang ditampilkan pendidikan pluralis adalah agama yang moderat dan ramah.

Pendidikan pluralis-multikultural adalah proses penyadaran yang berwawasan pluralis (secara agama) dan sekaligus berwawasan multikultural (secara budaya). Pendidikan pluralis-multikultural harus dilihat sebagai bagian dari usaha komprehensif menghindari, mencegah, dan menanggulangi konflik bernuansa etnis dan agama di masa mendatang. Pendidikan multikultural mempunyai beberapa karakteristik dalam pengimplementasiannya. Menurut Zakiyyudin Baidhaw (2005:78), karakteristik dari pendidikan multikultural tersebut meliputi tujuh komponen, yaitu belajar hidup dalam perbedaan, membangun tiga aspek mutual (saling percaya, saling pengertian, dan saling menghargai), terbuka dalam berpikir, apresiasi dan interdependensi, serta resolusi konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan. Kemudian dari karakteristik-karakteristik tersebut, diformulasikan dengan ayat-ayat Alquran sebagai *back up* strategis (baca:dalil), bahwa konsep pendidikan multikultural ternyata selaras dengan ajaran-ajaran Islam dalam mengatur tatanan hidup manusia di muka bumi ini, terutama sekali dalam konteks pendidikan. Pandangan tersebut didasarkan pada:

*Pertama*; karakteristik belajar hidup dalam perbedaan. Selama ini pendidikan lebih diorientasikan pada tiga pilar pendidikan, yaitu menambah pengetahuan, pembekalan keterampilan hidup (*life skill*), dan menekankan cara menjadi “orang” sesuai dengan kerangka berpikir peserta didik. Kemudian dalam realitas kehidupan yang plural, ketiga pilar tersebut kurang mumpuni dalam menjawab relevansi masyarakat yang semakin majemuk. Maka dari itu diperlukan satu pilar strategis yaitu belajar saling menghargai akan perbedaan, sehingga akan terbangun relasi antarpersonal dan interpersonal. Dalam terminologi Islam, realitas akan perbedaan tak dapat dipungkiri lagi, sesuai dengan Q.s. al-

Hujurat/49: 13 yang menekankan bahwa Allah swt. menciptakan manusia yang terdiri dari jenis kelamin yang berbeda, berbagai suku, bangsa, serta interpretasi yang berbeda-beda. Hal ini juga dipertegas dengan sikap Nabi saw. yang berdiam diri sebagai bentuk persetujuan beliau, ketika ada dua sahabatnya yang berbeda pendapat dalam suatu ketentuan hukum.

*Kedua*; membangun tiga aspek mutual, yaitu membangun saling percaya (*mutual trust*), memahami saling pengertian (*mutual understanding*), dan menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*). Tiga hal ini sebagai konsekuensi logis akan kemajemukan dan kehegemonian, maka diperlukan pendidikan yang berorientasi kepada kebersamaan dan penanaman sikap toleran, demokratis, serta kesetaraan hak. Banyak ayat Al-qur'an yang menekankan akan pentingnya saling percaya, pengertian, dan menghargai orang lain, di antaranya ayat yang menganjurkan untuk menjauhi berburuk sangka dan mencari-cari kesalahan orang lain (Q.s. al-Hujurat/49: 12), tidak langsung memvonis dan selalu mengedepankan klarifikasi (Q.s. al-Hujurat/49: 6), serta ayat yang menegaskan prinsip tidak ada paksaan dalam memeluk agama tertentu (Q.s. al-Baqarah/2: 256). Kebebasan beragama dan respek terhadap kepercayaan orang lain bukan hanya penting bagi masyarakat majemuk, tetapi bagi orang Islam, hal tersebut merupakan ajaran Al-qur'an. Membela kebebasan beragama dan menghormati kepercayaan orang lain merupakan bagian dari kemusliman.

*Ketiga*; terbuka dalam berpikir. Pendidikan seyogyanya memberi pengetahuan baru tentang bagaimana berfikir dan bertindak, bahkan mengadopsi dan beradaptasi terhadap kultur baru yang berbeda, kemudian direspons dengan pikiran terbuka dan tidak terkesan eksklusif. Peserta didik didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir sehingga tidak ada kejumudan dan keterkekangan dalam berfikir. Penghargaan Al-qur'an terhadap mereka yang mempergunakan akal, bisa dijadikan bukti representatif bahwa konsep ajaran Islam pun sangat responsif terhadap konsep berfikir secara terbuka. Salah satunya ayat yang menerangkan betapa tingginya derajat orang yang berilmu (Q.s. al-Mujadallah/58: 11), dan ayat yang menjelaskan bahwa Islam tidak mengenal kejumudan dan dogmatisme (Q.s. al-Baqarah/2: 170).

*Keempat*; apresiasi dan interdependensi. Karakteristik ini mengedepankan tatanan kepedulian (*social care*), yakni semua anggota

masyarakat dapat saling menunjukkan apresiasi dan memelihara relasi, keterikatan, kohesi, dan keterkaitan sosial yang rekat, karena bagaimanapun juga manusia tidak bisa *survive* tanpa ikatan sosial yang dinamis. Konsep seperti ini banyak termaktub dalam Al-qur'an, salah satunya Q.s. al-Maidah/5: 2 yang menerangkan betapa pentingnya prinsip tolong menolong dalam kebajikan, memelihara solidaritas, dan ikatan sosial (takwa), dengan menghindari tolong menolong dalam kejahatan.

*Kelima*; resolusi konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan. Konflik dalam berbagai hal harus dihindari, dan pendidikan harus mengfungsikan diri sebagai satu cara dalam resolusi konflik. Adapun resolusi konflik belum cukup tanpa rekonsiliasi, yakni upaya perdamaian melalui sarana pengampunan atau memaafkan (*forgiveness*). Pemberian ampun atau maaf dalam rekonsiliasi adalah tindakan tepat dalam situasi konflik komunal. Dalam ajaran Islam, seluruh umat manusia harus mengedepankan perdamaian, cinta damai, dan rasa aman bagi seluruh makhluk (Q.s. asy-Syura/42: 40), dan secara tegas Alquran juga menganjurkan untuk memberi maaf, membimbing ke arah kesepakatan damai dengan cara musyawarah, duduk satu meja dengan prinsip kasih sayang (Q.s. Ali Imran/3: 139).

Berangkat dari pemahaman karakteristik di atas, masih menurut Zakiyyudin Baidhawry (2005:85), pendidikan multikultural adalah gerakan pembaharuan dan inovasi pendidikan dalam rangka menanamkan kesadaran pentingnya hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan, dengan spirit kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami, dan menghargai persamaan, perbedaan dan keunikan agama-agama, sehingga terjalin suatu relasi dan interdependensi dalam situasi saling mendengar dan menerima perbedaan pendapat dalam pikiran terbuka, untuk menemukan jalan terbaik mengatasi konflik dan menciptakan perdamaian melalui kasih sayang antar sesama.

Arifin Assegaf menyimpulkan bahwa jelas bagi kita semua bahwa Islam yang benar adalah agama yang tidak menutup diri, mengajak kepada keterbukaan, menganut prinsip kebebasan dengan penuh toleransi. Dengan kata lain, Islam berkewajiban tegasnya kaum muslimin berkewajiban untuk mempertahankan tradisi pluralism. Berdasarkan makna-makna ayat Al-qur'an tersebut di atas, dapat dipahami bahwa

keberagaman/kemajemukan sudah merupakan sunnatullah, sehingga perbedaan-perbedaan tidak akan mungkin dapat dihindari, tetapi harus dipahami dan disikapi secara tepat dan arif atas dasar persamaan dan kesetaraan menurut petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-qur'an dan praktik hidup Rasulullah saw dalam berdampingan dengan masyarakat Madani yang plural, sehingga tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling menghargai dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Abdulsyani. (2001). *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Ahlul. (2008). Pendidikan Seks Pada Anak dan Remaja.
- Akhmad Zaini, & Agus Fathoni Prasetyo. (2019). Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran IPS di SMP NEGERI 1 LASEM. *Tadris : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 12(2), 1-18. <https://doi.org/10.51675/jt.v12i2.26>
- Ali, Muhammad. (2013). *Teologi pluralis-multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan*. Jakarta: Kompas.
- Alimuddin. (2007). *Pendidikan Islam Solusi Problematika Modern* Banda Aceh:Yayasan PENA.
- Amal, Bakhrul Khair. (2005). Pendidikan Anak Usia Dini. <http://www.waspada.co.id>. Diakses pada tanggal 30 September 2023
- Arif, M. *Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Ngejot di Desa Pegayaman Bali*. Jakarta: Publica Indonesia Utama
- (2008). Bandung: Cita Pustaka Media Perintis
- Banks, James A. (2002). *An Introduction to Multicultural Education*. Boston: Allyn Bacon.

- Bertens. K. (1993). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Cahyoto. (2002). *Budi Pekerti dalam Perspektif Pendidikan*. Malang: Depdiknas Pendidikan Dasar dan Menengah Pusat Penataan Guru IPS dan PMP Malang.
- Chaplin, J.R. and R.G. Messick. (1992). *Elementary Social Studies: a Practical Guide*. New York: Longman.
- Cholisin dan Jihad Hisyam. (2006). *Reorientasi dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial di Era Baru*. Yogyakarta: Efisiensi Press  
chromeextension://efaidnbmninnibpcapjcgiclfndmkaj/  
<http://repository.unsada.ac.id/783/2/BAB%20I.pdf>. Diakses 3 oktober 2023
- Daldjoeni, N. (1992). *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: Alumi.
- Darmadi, Hamid. 2007. *Konsep Dasar Pendidikan Moral*. Bandung: Alfabeta.
- Dede Wiliam. (2009). *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*. Bogor: Center for International Forestry Research CIFOR.
- Departemen Agama RI. (2002). *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka
- Destinawati, Arina. dkk. (2013). *Bahasa Indonesia untuk SMA/ MA Kelas XI Semester Gasal*. Jawa Tengah: Viva Pakarindo.
- Djamarah, Syaiful. (2002). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Endjun, J.J. 2007. *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi Murid Kelas VI SD*. [Http://www.scribd.com](http://www.scribd.com). 30 September 2023
- Faqih Samlawi dan Bunyamin Maftuh. (2001). *Konsep Dasar IPS*. Bandung: CV Maulana.
- Fatmawati, Laila. Kirana Prama Dewi. (2023). *Buku Ajar IPS Dasar. Berorientasi Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: K-Media.
- Ghazali, Abd. Moqsith. (2009). *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-qur'an* Cet. II. Jakarta: KataKita.
- Gofur, Muhammad A., Auliya, Muhamad F.R., & Nursikin, Mukh. (2022). *Konsep Dasar Pendidikan Multikultural*. Sinar Dunia: *Jurnal Riset*

- Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 1, No. 4 Desember 2022, e-ISSN: 2963-542X; p-ISSN: 2963-4997, Hal 124-142.
- Gunawan, R. (2013). *Pendidikan IPS Filosofi, Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hadiwinarto. (2014). Analisis Faktor Penilaian Budi Pekerti. *Jurnal Psikologi*. Vol.41, No.2, 229-240.
- Halimah, Siti. *Strategi Pembelajaran: Pola dan Strategi dalam Pengembangan KTSP*.
- Hamalik, Oemar. (1992). *Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Hudoyo, Herman. (1998). *Belajar Mengajar Matematika*. Dekdikbud.
- Hartato, Kasinyo dan Abduramansyah. (2009). *Metodologi Pembelajaran Berbasis Active Learning*. Palembang: Grafika Telindo.
- Hidayati, dkk. (2008). *Pengembangan Pendidikan IPS SD*. Surakarta: Direktorat. Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- [Http://www.edubencmark.com/pendidikan-seks-pada-anak-dan-remaja](http://www.edubencmark.com/pendidikan-seks-pada-anak-dan-remaja), Diakses pada tanggal 2 Oktober 2023
- <https://education.stateuniversity.com/pages/2252/Multicultural-Education.html> diakses pada 2 Oktober 2023 pukul 23:42
- <https://education.uw.edu/cme/view> diakses pada 2 Oktober 2023 pukul 23:42
- <https://eprints.umm.ac.id/40877/2/BAB%20I.pdf> diakses 3 oktober 2023
- <https://eprints.umm.ac.id/89449/2/BAB%20I.pdf> diakses 3 oktober 2023
- <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1278231.pdf> diakses pada 2 Oktober 2023 pukul 23:42
- <https://kemenag.go.id/daerah/mengenal-ngejot-tradisi-berbagi-umat-muslim-dan-hindu-di-bali-61swoq> diakses tanggal 1 Oktober 2023:
- [Https://Repository.Uksw.Edu/Handle/123456789/25385](https://Repository.Uksw.Edu/Handle/123456789/25385) Diakses Tanggal 2 Oktober 2023

- <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-akulturasi-dan-asimilasi/> diakses pada tanggal 3 Oktober 2023
- <https://www.studocu.com/id/document/universitas-riau/sosiologi/faktor-pendorong-akulturasi/45240823> diakses 3 oktober 2023 III; Jakarta: Kencana, 2007.
- Izzaty, Rita Eka dkk. (2008). *Perkembangan Peserta Didik*. Yogyakarta: UNY Press 2008.
- Kartono, Kartini. (1979). *Psikologi Anak*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Widodo, Soepri Tjahjono Moedji dan Vio Nita. (2019). Penerapan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Di Sekolah Dasar. *Jurnal Kesehatan Karya Husada*, No 7 Vol 1.
- Kemendikbud. (2017). “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.” Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Konvensi Hak Anak PBB (CRC). “Article 23 - Children with Disabilities.”
- Konvensi Hak Anak PBB (CRC). Konvensi Hak Anak PBB (CRC) dan UNESCO, “Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action.”
- Leo-Rhynie, E dan the Institute of Development and Labour Law.1999. „Gender mainstreaming in education a reference manual for governments and other stakeholders London: Commonwealth Secretariat <http://www.banulacht.ie/publications.htm> (Accessed 15 September2011).
- Ma'hady, Muhaemin El. Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural, <http://researchengines.com/muhaemin6-04.html>.
- Mahendra, P. R. A. (2023). Peran Pendidikan IPS dalam Pendidikan Multikultural. *Journal on Education*, Volume 05, No 02, Januari-Februari 2023, 4468–4475. website: <http://jonedu.org/index.php/joe>
- Mahendra, P. R. A., 2023. (2023). Peran Pendidikan IPS dalam Pendidikan Multikultural. *Jonedu. Org*, 05(02), 4468–4475. <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/1171>
- Mahfud, Choiril. (2008). *Pendidikan Multikulturisme Cet. II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mahfud, Choirul. (2011). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fakih, Mansour. (2016). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). "Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024." Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. (2016). Education in Indonesia: From Crisis to the Rise of a Nation. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/05/01/pendidikan-di-indonesia-dari-krisis-menuju-kebangkitan-bangsa>
- Modul Kesehatan Reproduksi. Perlindungan Anak TERPADUBERBASIS Masyarakat (PATBM) Gerakan PATBM Merupakan Satu Upaya Untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Yang Layak Anak Kerja Sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dengan Rutgers Wpf Indonesia, 2018
- Muasmarah, R., & Ajmain, N. (2020). Akulturasi Islam Dan Budaya Nusantara. *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 1(2), 111-125.
- Muhammad Zohar Hilmi. (2017). Implementasi Pendidikan IPS dalam Pembelajaran IPS di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 3 (2), 164-172.
- Murtadlo, A. (2009). Pendekatan Nilai: Kajian atas Implementasi Pendidikan Budi Pekerti dalam Proses Pembelajaran. *Innovatio*, VIII(1), 107-122.
- Musyarofah, dkk. (2021). *Konsep Dasar IPS*. Sleman: Kosmojoyo Press.
- Musyriyah Sunanto. (2010). *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mutakin, A. (2010). *Pengantar Ilmu Sosial*. Bandung. FKIP IKIP.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*.
- Nasikun. (2004). *Sistem Sosial di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Nasution, T. dkk. 2018. *Konsep dasar IPS*. Yogyakarta: Samudera biru.
- Nugroho, A. Y., Hartono, H., & Sudiyanto, S. (2020). Analisis Kebutuhan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 4(1), 15-25.
- Nurasmawi, & Ristiliana. (2021). Pendidikan Multikultural. Pekanbaru: Asa Riau.
- Nurasmawi. (2021). *Buku Pendidikan Multikultural*. In UIN Sultan Syarif Kasim Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/59272>
- Nurhayati, S., & Shintasiwi, F. (2023). Strategi Pembelajaran Ips Bermuatan Multikultural Sebagai Upaya Penguatan Nilai Toleransi di SMP Negeri 2 Wangon. *Sosiolium: Jurnal Pembelajaran IPS*, 5(1), 72-81. <https://doi.org/10.15294/sosiolium.v5i1.58846>
- Parni, P. (2020). *Pembelajaran IPS di Sekolah dasar*. Cross-border, 3(2), 96-105.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional.
- Poerwanto, Hari.(2005). *Kebudayaan dan Lingkungan: Dalam Perspektif Antropologi*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Popham & Baker.(1992). *Teknik Mengajar Secara Sistematis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Purwana, Agung Eko, dkk. (2009). *Pembelajaran IPS MI*. Surabaya: APrintA.
- Pramono, S. E. (2013). *Hakikat Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*. Semarang: Widya Karya.
- Pratiwi, P. H. (2019). Asimilasi dan Akulturasi: Sebuah Tinjauan Konsep. Diambil dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/poerwanti-hadipratiwi-spd-msi/asimilasi-akulturasi.pdf>.
- Purwanto, Ngalim. (2002). *Adminisrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.

- Putranto, A. (2018). Peran IPS dalam Pendidikan Multikultural di Indonesia. *JUSIE*, 111(2), 112-120. <https://doi.org/10.36665/jusie.v1i02.141>
- Rahmat, Pupu Saeful. <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/04/wacana-pendidikan-multikultural-di-indonesia/> 4 April 2008 by Akhmad Sudrajat.
- Rencana Aksi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, RAN-PPA Indonesia. 2020
- Republika, Senin (9/10/2023). KPAI Catat Ada Sebanyak 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak pada 2023. <https://news.republika.co.id/berita/s29ndx349/kpai-catat-ada-sebanyak-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-pada-2023>. diakses pada 10 Oktober 2023
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. (2008) *Modern Sociological Theory* dialih bahasakan oleh Alimandan dengan judul: *Teori Sosiologi Modern*. Cet. V; Jakarta: Kencana.
- Rogers, M. Evert., et.al. (1988). *Social Change in Rural Societies*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.
- Rohmana FS. (2019). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Sebagai Pengarusutamaan Hak Anak Di Mtsn 6 Jombang. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Volume 07 Nomor 02 Tahun 2019, 646-660.
- Rustan Efendy. 92014). Kesenjangan Gender Dalam Pendidikan. *Jurnal Al-Maiyyah*, 2144.
- Sairin, Sjafrin. (2002). *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samrin. (2014). Konsep Pendidikan Multikultural. *Jurnal Al-Ta'dib*, Volume 7. No. 2 Juli-Desember
- Samsuri, 2009. "Mengapa Perlu Pendidikan Karakter". Makalah, disajikan pada workshop tentang Pendidikan Karakter oleh FISE UNY. Yogyakarta.
- Sanjaya, Wina. (2007). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana.
- Sapriya, dkk. (2008). *Pendidikan IPS*. Bandung: Laboratorium PKN Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sapriya. (2012). *Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja.

- Sardiman, AM.(1996) Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar Pedoman bagi Guru dan Calon Guru, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sardjiyo, dkk. (2008). *Pendidikan IPS di SD*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sartika, Dewi. dkk., 2020. Pengaruh Penerapan Pendidikan Multikultural Terhadap Sikap Dan Toleransi. *Jurnal Edueksos*, Vol. IX (1). <https://jonedu.org/index.php/joe/article/download/1171/920>
- Setyowati. E. (2009). Pendidikan Budi Pekerti Menjadi mata Pelajaran di Sekolah. *Jurnal: Lembaran Ilmu Kependidikan* Jilid 39. No.2.
- Sipuan, dkk., (2022). Pendekatan Pendidikan Multikultural. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8 (2) P-ISSN 2407-8018 E-ISSN 2721-7310. <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.2.815-830.2022>
- Soeharto, Karti dkk. (2003) Teknologi Pembelajaran (Pendekatan Sistem, Konsepsi dan Model, SAP, Evaluasi, Sumber Belajar Media). Surabaya: Surabaya Intelectual Club.
- Soeprapto, R. Riyadi. (2002). *Interaksionisme Simbolik: Perspektif Sosiologi Modern*. Cet. I; Malang: Averroes Press.
- Solihatin, E. dan Raharjo. (2009). *Cooperative Learning Analisis Model Pembelajaran IPS*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudrajat, S. (2015). Pendidikan Multikultural Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. *Jipsindo*, 1(1), 1-19. <https://doi.org/10.21831/jipsindo.v1i1.2874>.
- Sudrajat. (2014). Pendidikan Multikultural Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Ips Di Sekolah Dasar. *JIPSINDO* 1 (1). <https://journal.uny.ac.id/index.php/jipsindo/article/download/2874/2399>
- Sugiharta, Andipostra dan Andi. <http://id.shvoong.com/social-sciences/1918568-pendidikan-multikultural>.
- Sulalah. (2001). Pendidikan Multikultural Didaktika Nilai-nilai Universitas Kebangsaan, (Malang-UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI) cet.1 , hal-138.
- Sumartana, Th. dkk. Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia.
- Sumber lain: <http://istanailmupengetahuan.blogspot.com/2013/01/pengembangan-kurikulum-karakter-bangsa.html>

- Suparlan, S. (2007). *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Suprpto. (2009). Penanaman dan Sikap Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Nilai-Nilai Multikultural. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol VII. No 1, Januari-Maret 2009
- Supriyono, Iskandar, dan Sucahyono. (2015). *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Masa Kini*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- Surya, Komang. (2020). Peran Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Pembentukan Karakter. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar* Vol. 1, No. 1, Maret 2020, pp. 11-20
- Susan, Novri. (2009). *Sosiologi Konflik: Isu-isu Konflik Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Sutrisno. (2005). *Revolusi Pendidikan Di Indonesia*. Yogyakarta: Ar Ruzz.
- Suwardi. (2007). *Manajemen Pembelajaran*. Surabaya: Jp Books.
- Syarifuddin Jurdi. (2013). *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Tafsir, Ahmad. (1994). *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Cet. II. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tanwif, dkk. *Ilmu Pengetahuan Sosial 1*, Surabaya: Lapis PGMI, 2009.
- Tilaar, H.A.R. (2004). *Multikulturalisme : Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta, Grasindo.
- Trianto. (2010). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*. Jakarta: Kencana.
- Zaini, Hisyam dkk.. (2008) *Strategi Pembelajaran Aktif*. Yogyakarta: Pustaka Insane Madani.
- Ubadah. (2022). *Pendidikan Multikultural: Konsep, Pendekatan dan Penerapannya dalam Pembelajaran*. Palu: Pesantren Anwarul Qur'an.
- Ulwan, Abdullah Nasih. *Pendidikan Anak dalam Islam*, pentj. Jamaluddin Miri, Jakarta: .
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- UNESCO. (2020). Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education - All Means All. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373435>.
- Unicef. (2019). "Pengarusutamaan Anak dalam Perencanaan Pembangunan di Indonesia." Jakarta: UNICEF Indonesia.
- United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>. untuk Demokrasi dan keadilan. Yogyakarta: Pilar Media.
- Walby, S. (2005). Introduction: comparative gender mainstreaming in a global era. *International Feminist journal of Politics*. 7(4): 453.
- Wardani, K. (2010). Peran Guru dalam Pendidikan Karakter menurut Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara. *Proceedings of The 4th International Conference on Tacher Education. Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia*, 230-239.
- Warni Tune Sumar. (2015). "Implementasi Keadilan Gender Dalam Bidang Pendidikan". *MUSAWA*, 1 (Juni, 2015), 166.
- Woodford-Berger, P. (2004). Gender mainstreaming: what is it (about) and should we continue doing it? *IDS Bulletin*. 35(4): 65-72.
- World Bank. (2018). "Indonesia - Memulihkan Hak dan Masa Depan Anak-anak: Agenda Reformasi Pendidikan 2020-2030." Washington, D.C.: The World Bank.
- Wulandari, Fitri. (2012). *Sosiologi untuk SMA/ MA Kelas X Semester Genap*. Jawa Tengah: Viva Pakarindo.
- Yaqin, Ainul. (2005). *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding*.
- Zuchdi, D. (2009). *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Zuchdi, D. Prasetya, Z.K., & Masruri, M.S. (2013). *Model Pendidikan Karakter: Terintegrasi dalam Pembelajaran dan Pengembangan Kultur Sekolah*. Yogyakarta: Multi Presindo.
- Zuriah. N. (2007). *Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.